

Laporan Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Berbasis E-Learning

Bogor, 11 s.d. 13 Desember 2025



Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya pelaksanaan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Berbasis *E-Learning* ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Terdapat beberapa rangkaian acara pada kegiatan ini yaitu Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Jurnalis, Peluncuran MKLC dan MKRI AI, serta *Focus Group Discussion* terkait kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara berbasis *e-learning*.

Keluaran (*output*) yang diharapkan pada kegiatan ini adalah para peserta kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Jurnalis memahami hukum acara Mahkamah Konstitusi terkait pengujian Undang-Undang terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan terdapat langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kualitas kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara melalui media *e-learning* di Pusdik Pancasila dan Konstitusi.

Akhir kata, demikian laporan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Berbasis *E-Learning* ini kami susun sebagai bentuk akuntabilitas, transparansi, dan integritas kami terhadap penggunaan keuangan negara dalam kegiatan ini. Karena kegiatan ini dibiayai sepenuhnya oleh APBN yang notabene uang rakyat sehingga laporan ini adalah bentuk pertanggungjawaban kami kepada rakyat dan negara. Selain itu sebagai bahan evaluasi dan pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan serupa. Semoga laporan ini juga membawa manfaat bagi para pemangku kepentingan Pusdik Pancasila dan Konstitusi pada khususnya dan Mahkamah Konstitusi pada umumnya.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LAMPIRAN.....	iii
A. PENDAHULUAN	1
A.1. Umum.....	1
A.2. Tujuan.....	3
B. PELAKSANAAN KEGIATAN	4
B.1. Nama Kegiatan.....	4
B.2. Waktu dan Tempat	4
B.3. Uraian Kegiatan	4
B.3.1. Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Jurnalis.....	4
B.3.2. Peluncuran MKLC dan MKRI AI.....	7
B.3.3. <i>Focus Group Discussion</i> Terkait Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Berbasis <i>E-learning</i>	8
C. PENUTUP.....	11
D. LAMPIRAN	12



DAFTAR LAMPIRAN

- 1. Dokumentasi Kegiatan**
- 2. Jadwal Kegiatan**
- 3. Bahan Penjelasan Teknis**
- 4. Panduan Penggunaan SIMULTAN**
- 5. Kumpulan Materi Narasumber**
- 6. Kumpulan Surat Undangan/Surat Dinas**
- 7. Surat Tugas**
- 8. Daftar Hadir**
- 9. Notulensi Kegiatan *Focus Group Discussion* Terkait Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Berbasis *E-learning***
- 10. Data Peserta Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Jurnalis**
- 11. Laporan Keuangan**



PENDAHULUAN



PELAKSANAAN KEGIATAN

**PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA
BERBASIS *E-LEARNING***

Kamis s.d. Sabtu, 11 s.d. 13 Desember 2025

A. PENDAHULUAN

A.1. Umum

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Keberadaan Mahkamah Konstitusi dibentuk berdasarkan perubahan tahap ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi diatur dalam pasal 24 ayat 2, pasal 24 C dan pasal 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Lebih lanjut, ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. memutus pembubaran partai politik, dan;
4. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Sementara kewajiban Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga:

1. telah melakukan pelanggaran hukum berupa:
 - a) pengkhianatan terhadap negara;
 - b) korupsi;
 - c) penyuapan;
 - d) tindak pidana berat lainnya; atau
 - e) perbuatan tercela; dan/atau:



2. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, maka Mahkamah Konstitusi dapat disebut sebagai lembaga negara pengawal konstitusi dan demokrasi.

Terkait posisi Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi memiliki tanggung jawab dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang nilai-nilai konstitusi. Nilai-nilai konstitusi bersumber dari nilai utama (*core value*) dalam ideologi Pancasila. Pemahaman tentang nilai utama yang akan membangun nilai konstitusional dapat membuka pemahaman masyarakat untuk melihat secara jelas keberadaan ideologi Pancasila. Pancasila tidak hanya dianggap sebagai simbol saja tanpa ada sebuah implementasi berupa nilai-nilai utama yang ada di dalamnya. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila menjadi pilihan terbaik bagi penyelesaian permasalahan bangsa. Namun demikian, Pancasila tidak boleh disakralkan dan didogmakan. Pancasila harus senantiasa dijaga agar tetap menjadi *open and living ideology*. Untuk itu perlu adanya upaya-upaya secara strategis dalam rangka melakukan pemaknaan relevansi dan reaktualisasi nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi yang hidup dan terbuka.

Dalam perspektif sebagai lembaga pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi berkepentingan terhadap setiap ikhtiar untuk meneguhkan Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorn* yang sekaligus merupakan “jiwa” dari konstitusi Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Terutama ikhtiar tersebut sejalan dengan visi Mahkamah Konstitusi Tahun 2025-2029, yaitu: “Tegaknya Konstitusi melalui Peradilan Konstitusi yang Merdeka”. Dengan misi antara lain: “Meningkatkan Kualitas Putusan dan Kesadaran Berkonstitusi Penyelenggara Negara dan Warga Negara”. Pada konteks inilah, tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi pada dasarnya mencakup pula tugas mengawal tumbuhnya kesadaran berkonstitusi seluruh Penyelenggara Negara dan setiap Warga Negara. Warga negara yang memiliki kesadaran berkonstitusi yang baik tentu juga akan sadar dan peduli dengan hak-hak konstitusionalnya yang terkandung di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan kata lain, di samping menjalankan fungsinya sebagai *the Guardian of Constitution*, pada dasarnya Mahkamah Konstitusi juga berperan sebagai *the Protector of The Citizen’s Constitutional Right*, pelindung hak konstitusional warga negara.



Peran Mahkamah Konstitusi sebagai pelindung hak konstitusional warga negara salah satunya dilaksanakan melalui penyelenggaraan kegiatan peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara. Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi agar warga negara dapat memahami dan berperan aktif dalam menumbuhkan kesadaran berkonstitusi dan menciptakan konstitusi yang bermartabat. Inovasi dalam menumbuhkan kesadaran berkonstitusi pada masyarakat juga terus dilakukan secara masif yaitu melalui peluncuran media pembelajaran MKLC dan MKRI AI. Adanya inovasi ini diharapkan dapat memperluas jangkauan pendidikan tentang Pancasila, konstitusi, hak konstitusional warga negara, dan Mahkamah Konstitusi, serta mempermudah masyarakat mendapatkan akses keadilan dan memperjuangkan hak-hak konstitusionalnya

Selain menyelenggaraan kegiatan pendidikan, pelaksanaan evaluasi kegiatan juga menjadi instrumen penting untuk menilai sejauh mana capaian tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi ini akan menjadi dasar dalam merancang strategi perbaikan dan pengembangan ke depan, khususnya dalam hal optimalisasi dan strategi kegiatan peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara melalui *e-learning*. Pada akhirnya, kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat posisi Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi sebagai pusat unggulan (*center of excellence*) dalam bidang pendidikan ideologi dan konstitusi, serta sebagai garda terdepan dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan yang kokoh bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

A.2 Tujuan

- a. Meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan ketaatan berkonstitusi;
- b. Meningkatkan pemahaman dan menyamakan persepsi mengenai Pancasila, Konstitusi dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi serta isu-isu ketatanegaraan;
- c. Memberikan informasi berbagai aspek mengenai Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, termasuk perkembangan terakhir pelaksanaan tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi;
- d. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi tentang pengujian Undang-Undang terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



PELAKSANAAN KEGIATAN



B. PELAKSANAAN KEGIATAN

B.1. Nama Kegiatan

“Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Berbasis *E-Learning*”.

B.2. Waktu dan Tempat

Kegiatan ini diselenggarakan pada hari Kamis s.d. Sabtu, 11 s.d. 13 Desember 2025 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Cisarua, Bogor, Jawa Barat.

B.3. Uraian Kegiatan

Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Berbasis *E-Learning* memiliki beberapa rangkaian acara yaitu Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Jurnalis, Peluncuran MKLC dan MKRI AI, serta *Focus Group Discussion* terkait kegiatan peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara berbasis *e-learning*. Seluruh rangkaian acara dilaksanakan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

B.3.1. Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Jurnalis

Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Jurnalis dilaksanakan pada hari Kamis s.d. Sabtu, 11 s.d. 13 Desember 2025. Peserta kegiatan sebanyak 30 orang jurnalis dari berbagai media massa. Peserta yang hadir akan mendapatkan *soft file* materi dari narasumber dan e-sertifikat yang dapat diakses melalui akun SIMULTAN masing-masing peserta. Sebelum mendapatkan materi, seluruh peserta mengikuti kegiatan penjelasan teknis yang disampaikan oleh Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Setelah sesi penjelasan teknis selesai, Penyuluh Hukum Ahli Muda menjelaskan tentang tata cara mengakses SIMULTAN pada masing-masing peserta.

Kegiatan ini diisi oleh narasumber yang terdiri atas Hakim Konstitusi dan Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol. Penyampaian materi dilaksanakan dengan metode ceramah oleh narasumber dari, kemudian dilanjutkan dengan diskusi atau tanya jawab antara peserta dengan narasumber. Sesi diskusi atau tanya jawab ini akan dipimpin oleh moderator yang mengatur lalu lintas peserta untuk bertanya. Berikut adalah grafik sebaran peserta dan

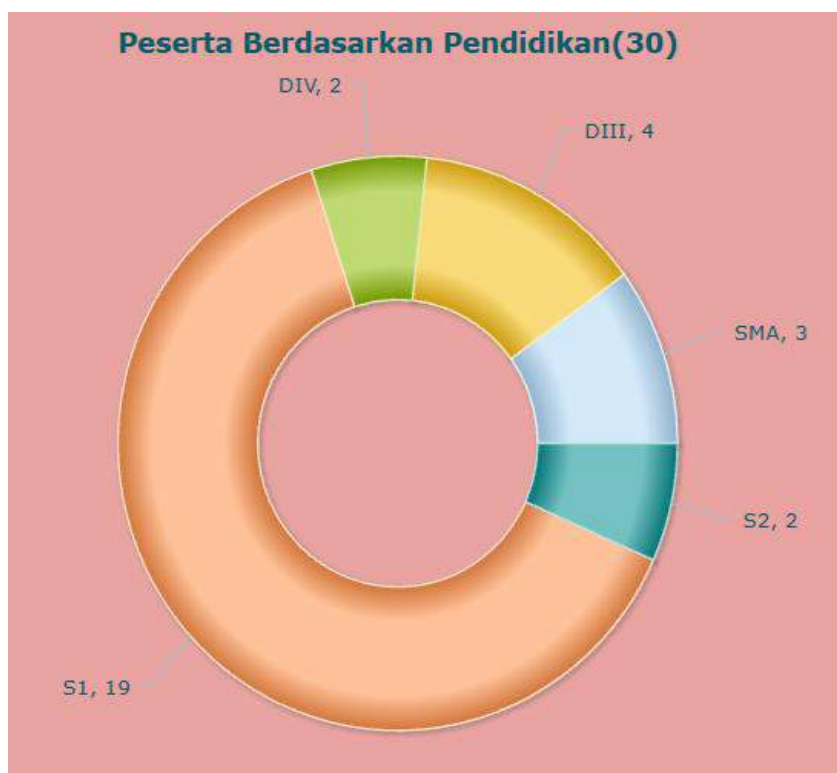


narasumber pada kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Jurnalis:

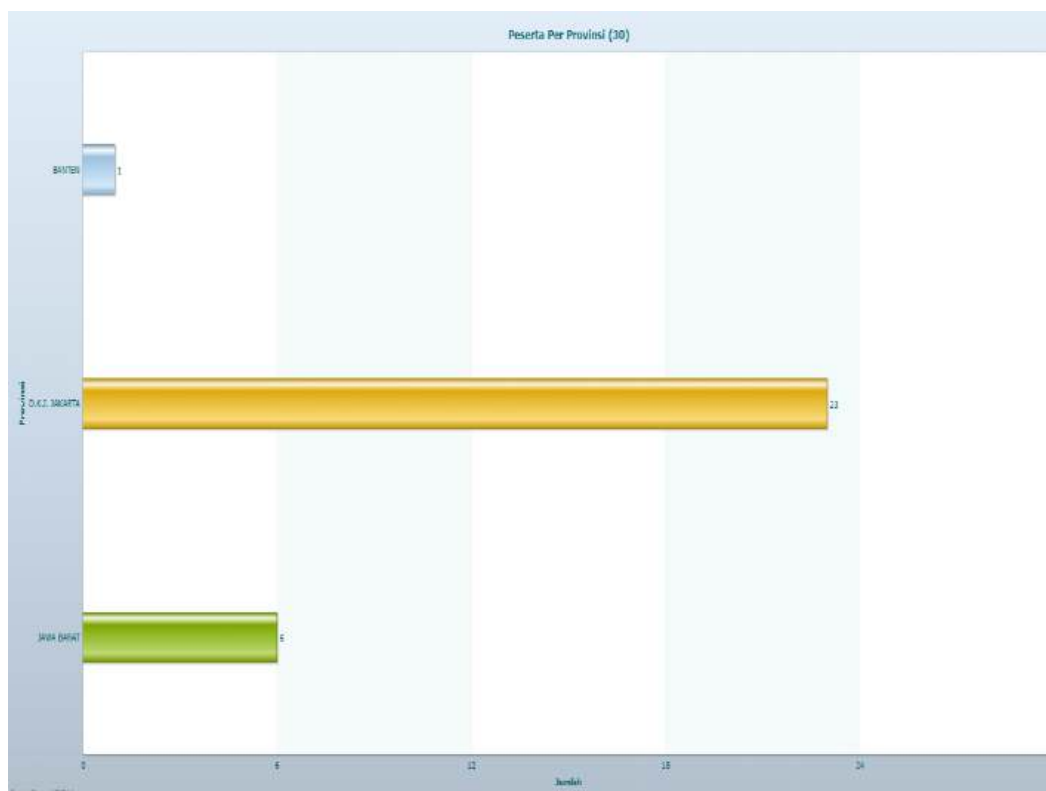
Grafik 1. Peserta berdasarkan Jenis Kelamin



Grafik 2. Peserta berdasarkan Pendidikan



Grafik 3. Peserta berdasarkan Asal Daerah



Tabel 1. Materi, Narasumber, dan Moderator

NO.	MATERI	NARASUMBER	MODERATOR
1.	Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila melalui <i>Experiential Learning</i>	Khai Event Organizer	-
2.	Peran Jurnalis dalam Penanganan Perkara di Mahkamah Konstitusi	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Dr. Andi Hakim, S.IP., M.A.
3.	Peran Wartawan sebagai Jurnalis dalam Menjaga Hak Konstitusionalitas dan Demokrasi melalui Penyampaian Berita yang Menjaga Etika dan Independensi di MK	1. YM Dr. Suhartoyo S.H., M.H. 2. YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.



B.3.2. Peluncuran MKLC dan MKRI AI

Mahkamah Konstitusi terus berupaya untuk meningkatkan kesadaran berkonstitusi warga negara dan penyelenggara negara. Upaya yang dilakukan yaitu melalui pembangunan dan peluncuran media pembelajaran MKLC (*Mahkamah Konstitusi Learning Center*) dan MKRI AI. Peluncuran MKLC dan MKRI AI adalah awal dari akses terbuka terhadap upaya peningkatan kesadaran berkonstitusi masyarakat dan fondasi kokoh bagi perwujudan supremasi konstitusi yang berkelanjutan di Indonesia.

Kegiatan peluncuran MKLC dan MKRI AI dilaksanakan pada hari Jumat, 12 Desember 2025 pukul 13.30 WIB di ruang aula Pusdik Pancasila dan Konstitusi. Dua inovasi ini secara resmi diluncurkan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi dan dihadiri oleh YM Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, Plt. Panitera Mahkamah Konstitusi, Kepala Biro/Pusat/Inspektur di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, BPKP, BPK, BAPPENAS dan peserta kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Jurnalis.

Secara umum, MKLC didirikan dengan harapan untuk menjadi *center of excellence* dalam pengembangan ilmu, pengetahuan, dan pemahaman tentang konstitusi dan hukum tata negara di Indonesia. Pengembangan media pembelajaran ini juga bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada seluruh warga negara Indonesia untuk mendapatkan informasi terkait Pancasila, konstitusi, Mahkamah Konstitusi, dan hukum acara Mahkamah Konstitusi. Penguatan kelembagaan dan jaringan juga diharapkan dapat terwujud dari adanya media pembelajaran MKLC. MKLC disusun sebagai sarana pembelajaran yang fleksibel dan efisien dalam proses belajar mengajar melalui pemanfaatan teknologi. Melalui MKLC, kegiatan belajar dapat dilakukan secara mandiri oleh peserta, sehingga kegiatan pembelajaran dapat lebih menjangkau area yang lebih luas tanpa adanya batasan ruang dan waktu.

MKLC dapat diakses oleh seluruh warga negara Indonesia melalui alamat web mklc.mkri.id. Media pembelajaran ini dapat diakses menggunakan laptop atau *smartphone* yang tersambung dengan internet. Di web tersebut terdapat beberapa menu yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh warga negara, diantaranya menu “Pendidikan” untuk melihat daftar pendidikan apa saja yang dapat diikuti dan menu “Membuat Akun” untuk membuat akun MKLC sebelum mengikuti



kegiatan pendidikan. Video tutorial lengkap penggunaan MKLC dapat diakses melalui link <https://www.youtube.com/watch?v=Z3u5DyXVVIM>.

Selain MKLC, Mahkamah Konstitusi juga meluncurkan inovasi baru bernama MKRI AI yang dapat diakses melalui alamat ai.mkri.id. MKRI AI adalah *generative AI* milik Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) yang berfungsi sebagai sarana pelayanan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hak konstitusionalnya. MKRI AI telah dibekali fitur yang sangat lengkap, mulai dari pencarian, analisis, peringkasan, perbandingan, prediksi, hingga penyusunan *resume* risiko, dampak, dan *drafting*.

MKRI AI dirancang untuk membantu pengguna memperoleh informasi dan layanan dengan lebih cepat dan tepat. Saat ini MKRI AI telah berada pada fase siap dipublikasikan, dengan sebagian besar fitur berjalan dengan baik meskipun beberapa masih memerlukan pengembangan tambahan khususnya terkait waktu respons. Agar kualitas jawabannya semakin optimal, MKRI AI tetap perlu dilatih dan terus diperkaya melalui proses pembelajaran berkelanjutan. Tugas *fine-tuning* ini menjadi tanggung jawab bersama demi mewujudkan MKRI AI yang semakin andal dan bermanfaat.

B.3.3. Focus Group Discussion Terkait Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Berbasis *E-learning*

Kegiatan *Focus Group Discussion* terkait kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara berbasis *e-learning* dilaksanakan pada hari Jumat, 12 Desember 2025 pukul 14.30 WIB secara luring di aula Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dan daring melalui Zoom Meeting. Kegiatan ini dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, Plt. Panitera Mahkamah Konstitusi, Kepala Biro/Pusat/Inspektur di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, BPKP, BPK, BAPPENAS, Kementerian Keuangan, APHAMK dan perwakilan peserta kegiatan di Pusdik Pancasila dan Konstitusi.

Tabel 2. Narasumber, Moderator, dan Peserta *Focus Group Discussion*

NO.	MATERI	INSTANSI	KETERANGAN
1.	Heru Setiawan	Sekretaris Jenderal MK	Narasumber



NO.	MATERI	INSTANSI	KETERANGAN
2.	Nanang Subekti	Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi	Narasumber
3.	Robbi Adhilni	Kepala Pusat Informasi Pengawasan BPKP	Narasumber
4.	Hanik Inayaturohman	Koordinator Perencanaan, Pengembangan, dan Pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan Pusdiklatwas BPKP	Narasumber
5.	• Fahrudin Latif • Iman Sufrian • Idola Pawestri	BPK	Narasumber
6.	• Tanti Dian Ruhama • Septian Dwi Wibowo • Sekar Ayu Garindra	BAPPENAS	Narasumber
7.	Victor Santoso Tandiasa	Perwakilan peserta kegiatan di Pusdik Pancasila dan Konstitusi	Narasumber
8.	Widodo Ekatjahjana	APHAMK (<i>online</i>)	Narasumber
9.	Istiyanti	Analisis Keuangan Ahli Muda Bidang Tugas Perencanaan dan Penganggaran DJA Kementerian Keuangan (<i>online</i>)	Narasumber
10.	Santhy Kustrihardiani	Pusdik Pancasila dan Konstitusi	Moderator
11.	Wiryanto	Plt. Panitia Konstitusi MK	Peserta
12.	Mundiri	Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	Peserta
13.	Tatang Garjito	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan	Peserta
14.	Sri Handayani	Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi	Peserta
15.	Fajar Laksono	Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan	Peserta
16.	Pan Mohamad Faiz Kusuma W.	Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol	Peserta
17.	Budi Wijayanto	Kepala Biro Umum	Peserta
18.	Sigit Purnomo	Inspektur	Peserta



NO.	MATERI	INSTANSI	KETERANGAN
19.	Kurniasih Panti Rahayu	Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan	Peserta

Terdapat beberapa *point* masukan tentang kegiatan peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara berbasis *e-learning* yang disampaikan oleh narasumber dalam kegiatan ini, yaitu:

- MKLC:
 - a) Untuk mengoptimalkan dampak positif penggunaan MKLC dan MKRI AI, perlu memperhatikan akses internet di seluruh daerah di Indonesia;
 - b) Perlu adanya selektifitas konten untuk menjelaskan konsep konstitusional yang abstrak dan kompleks kepada masyarakat;
 - c) Perlu inovasi tentang pengemasan konten agar lebih membumi;
 - d) Perlu ada langkah strategis untuk menjangkau masyarakat adat dan masyarakat di perbatasan untuk memahami hak-hak konstitusionalnya;
 - e) Perlu ada program *offline*, seperti *file* pdf yang bisa diunduh atau video dengan kapasitas rendah agar masyarakat yang berada di daerah susah sinyal dapat ikut belajar tentang konstitusi;
 - f) Perlu dikembangkan konten pembelajaran yang mudah dipahami masyarakat dan di dalam konten tersebut perlu dilekatkan logo-logo Mahkamah Konstitusi untuk menghindari konten hoaks yang banyak beredar;
 - g) Perlu ditekankan tentang apa pentingnya sertifikat untuk peserta pendidikan;
 - h) Perlu memperhatikan tentang perlindungan data pribadi, khususnya terkait NIK yang harus dimasukkan di akun MKLC;
 - i) Pengisian biodata ketika membuat akun di MKLC dapat membuat demotivasi pada masyarakat yang ingin belajar. Akan lebih baik jika pengisian biodata muncul ketika e-sertifikat akan diterbitkan;
 - j) Perlu memperhatikan terkait penamaan “MKRI AI” dan “MKLC” karena masih terlalu kaku dan sulit untuk diucapkan oleh masyarakat;
 - k) Diharapkan untuk MKLC dapat lebih *user friendly* dan menarik, terutama pada gen Z karena saat ini pengguna internet terbanyak adalah gen Z.



- MKRI AI:
 - a. Informasi yang dikeluarkan oleh MKRI AI harus akurat;
 - b. Perlu memperhatikan kerahasiaan interaksi pribadi di MKRI AI;
 - c. MKRI.AI diharapkan dapat membuat sebuah *directory* yang isinya adalah putusan-putusan MK yang lengkap sehingga terjaga akurasi;
 - d. Perlu menambahkan akses untuk MKLC dan MKRI AI di web mkri.id.
 - e. Agar MKLC dan MKRI.AI dapat berlanjut di masa yang akan datang, perlu adanya SDM khusus yang mengawal kedua program ini, misalnya *content creator* dan tenaga IT.

C. PENUTUP

Demikian laporan ini dibuat sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan ini.

Bogor, 06 Januari 2026
Kepala Pusat Pendidikan
Pancasila dan Konstitusi

Mundiri
NIP. 19690808 199012 1 001



LAMPIRAN



DOKUMENTASI KEGIATAN



Peserta PPHKWN bagi jurnalis tiba di gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menggunakan bis yang disediakan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.



Peserta PPHKWN bagi jurnalis melakukan registrasi.



Penjelasan teknis yang disampaikan oleh Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.



Penjelasan sistem informasi peserta (SIMULTAN) disampaikan oleh Penyuluh Hukum Ahli Muda MK.



Peserta mengikuti materi Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila melalui *Experiential Learning* yang dipimpin oleh Khai Event Organizer.



Penyampaian materi Peran Jurnalis dalam Penanganan Perkara di Mahkamah Konstitusi yang disampaikan oleh Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.



Peluncuran MKLC dan MKRI AI yang dihadiri oleh YM Ketua MK, YM Wakil Ketua MK, Sekretaris Jenderal MK, Plt. Panitera MK, Kepala Biro/Pusat/Inspektur di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK, BPKP, BPK, BAPPENAS dan peserta kegiatan PPHKWN bagi Jurnalis.



Penyampaian materi Peran Wartawan sebagai Jurnalis dalam Menjaga Hak Konstitusionalitas dan Demokrasi melalui Penyampaian Berita yang Menjaga Etika dan independensi di MK oleh YM Dr. Suhartoyo S.H., M.H. dan YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.



Pelaksanaan kegiatan FGD Terkait Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Berbasis *E-learning*



Kegiatan ditutup secara resmi oleh Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi serta dihadiri oleh Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat MK dan seluruh peserta kegiatan.

JADWAL KEGIATAN
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA
BERBASIS *E-LEARNING*

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER	LOKASI
PERTAMA				
Kamis, 11 Desember 2025	10.00 – 12.00	<i>Check in</i> dan Registrasi Peserta	Panitia	Lobby Grha Konstitusi 2
	12.00 – 13.30	Ishoma		
	13.30 – 14.00	Penjelasan Teknis	Kapusdik	Aula Grha Konstitusi 3
	14.00 – 15.30	Sesi I : Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila melalui <i>Experiential Learning</i>	Khai Event Organizer	<i>Outdoor</i>
	15.30 – 16.00	Coffee Break		
	16.00 – 18.00	Lanjutan Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila melalui <i>Experiential Learning</i>	Khai Event Organizer	<i>Outdoor</i>
	18.00 – 19.00	Ishoma		
	19.00 – 21.00	Pentas Seni Musik	Panitia	Grha Konstitusi 7
KEDUA				
Jumat, 12 Desember 2025	06.00 – 07.00	Senam pagi		
	07.00 – 09.00	Makan Pagi		
	09.00 – 11.00	Sesi II : Peran Jurnalis dalam Penanganan Perkara di Mahkamah Konstitusi	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Aula Grha Konstitusi 3
	11.00 – 13.30	Ishoma	Panitia	

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER	LOKASI
	13.30 – 14.30	Peluncuran MKLC dan MKRI AI: 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Hymne Mahkamah Konstitusi 3. Laporan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 4. Penayangan VT MKLC 5. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi 6. VT Pengenalan MKLC dan MKRI AI 7. Mars Mahkamah Konstitusi 8. Pembacaan Doa 9. Foto Bersama	Sekjen MK Ketua MK	Aula Grha Konstitusi 3
	14.30 – 17.30	Sesi III : Peran Wartawan sebagai Jurnalis dalam Menjaga Hak Konstitusionalitas dan Demokrasi melalui Penyampaian Berita yang Menjaga Etika dan independensi di MK	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Ruang Kelas
	14.30 – 16.30	FGD Optimalisasi Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara	Pimpinan FGD Sekjen MK Kapustik MK Narasumber: 1. BPK 2. DJA 3. Ketua APHAMK 4. Advokat MK	Aula Grha Konstitusi 3

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER	LOKASI
		FGD Strategi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara melalui <i>e-learning</i>	Pimpinan FGD Sekjen MK Kapustik MK Narasumber: 1. Bappenas 2. BPKP	
	16.30 – 19.00	Ishoma	Panitia	
KETIGA				
Sabtu, 13 Desember 2025	06.00 – 08.00	Penutupan: 1. Sambutan dan Penutupan Kepala Pusdik Pancasila dan Konstitusi 2. Pembacaan Doa	Kapusdik	Aula Grha Konstitusi 3
	08.00	Check out	Panitia	



PENJELASAN TEKNIS

Peningkatan Pemahaman Hak
Konstitusional Warga Negara Bagi
Wartawan

Kamis, 11 Desember 2025





SELAMAT DATANG DI

ZONA INTEGRITAS

Wilayah Bebas Korupsi (WBK)

PUSAT PENDIDIKAN
PANCASILA & KONSTITUSI

**MENUJU WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI
(WBBM)**

“ MEWUJUDKAN PERUBAHAN
UNTUK PELAYANAN YANG
PROFESIONAL DAN BERINTEGRITAS ”



www.mkri.id



[mahkamahkonstitusi](https://www.instagram.com/mahkamahkonstitusi)



[officialMKRI](https://www.facebook.com/officialMKRI)



[Mahkamah Konstitusi RI](https://www.youtube.com/MahkamahKonstitusiRI)



[officialMKRI](https://www.facebook.com/officialMKRI)



[@officialMKRI](https://twitter.com/officialMKRI)



[@mahkamahkonstitusi](https://www.instagram.com/mahkamahkonstitusi)



[Mahkamah Konstitusi RI](https://www.youtube.com/MahkamahKonstitusiRI)

www.mkri.id



Terima Kasih,
Bantu Kami
Menjaga Integritas
dengan
tidak memberi Uang
atau
pemberian apapun



**Integritas Kami
Tak akan Anda Bisa Beli.**

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
MAHKAMAH KONSTITUSI RI
upg@mkri.id



UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI



officialMKRI



@officialMKRI



@mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI

www.mkri.id



MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK

KAMI MENYATAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK SESUAI STANDAR YANG DITETAPKAN SECARA PROFESIONAL, TRANSPARAN, AKUNTABEL, TANPA BIAYA. MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS-MENERUS. BERSEDIA MENERIMA SANKSI DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR.

JAKARTA, 13 APRIL 2024
SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI
HERU SETIAWAN



Sekretaris Jenderal
Heru Setiawan - NIP. 19690809 199303 1001
Digital Signature
mk841709954240413112703



MAKLUMAT PELAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

KAMI MENYATAKAN SIAP DAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DENGAN SEBAIK-BAIKNYA SESUAI DENGAN AMANAT UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.

JAKARTA, 13 APRIL 2024
SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI
HERU SETIAWAN



PAKTA INTEGRITAS

-  **Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:**
 - ❖ Menyelenggarakan kegiatan sesuai jadwal yang ditetapkan.
 - ❖ Menyediakan tempat kegiatan, bahan ajar, dan narasumber.
 - ❖ Menerbitkan Sertifikat Keikutsertaan kepada peserta yang memenuhi syarat.
-  **Peserta:**
 - ❖ Hadir tepat waktu pada setiap sesi kegiatan/pembelajaran.
 - ❖ Tidak memberikan tip dalam bentuk apapun kepada pegawai Pusat Pendidikan Pancasila & Konstitusi.
 - ❖ Mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku.
-  **Narasumber:**
 - ❖ Menyampaikan materi sesuai jadwal yang ditetapkan.
 - ❖ Tidak menerima tip dalam bentuk apapun.
 - ❖ Mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku.



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

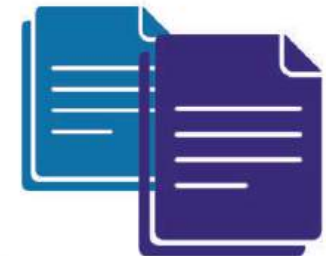
1 Persyaratan Pelayanan

Persyaratan Teknis Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

1. Calon peserta sesuai nama yang terdapat pada surat tugas dari instansi/organisasi;
2. Calon peserta hanya dapat digantikan jika mendapatkan surat rekomendasi dan ditugaskan oleh instansi/organisasi dan sesuai dengan kriteria yang ditentukan;
3. Calon peserta belum pernah mengikuti kegiatan pendidikan pancasila dan konstitusi sebelumnya yang sejenis;
4. Tidak diperkenankan membawa anak/keluarga;
5. Khusus bagi calon peserta wanita yang sedang hamil menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter serta surat pernyataan bahwa yang bersangkutan mampu mengikuti kegiatan dan bertanggung jawab atas kesehatan dan kehamilannya selama mengikuti kegiatan Pendidikan Pancasila dan konstitusi.

Persyaratan Administratif Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

1. Mengisi dan menyerahkan biodata peserta sesuai formulir yang disiapkan panitia (dilakukan secara kolektif oleh instansi/organisasi);
2. Membawa dan atau bersedia menandatangani Surat Pernyataan Sehat;
3. Membawa laptop yang memiliki fasilitas wifi;
4. Membawa gawai dengan sistem operasi *android/ios/ windows phone*;
5. Membawa surat tugas dari instansi/ organisasi;
6. Membawa kartu Askes/BPJS/ asuransi lain (bagi yang memiliki), yang akan digunakan oleh peserta untuk pemeriksaan dan/atau pengobatan di klinik atau rumah sakit terdekat;



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

2 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

A. Persiapan:

1. Kalender Pendidikan;
2. Rancangan Kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Kurikulum Pendidikan;
4. Jadwal Kegiatan;
5. Panduan Kegiatan;
6. Daftar Peserta Pendidikan;
7. Surat jawaban atas surat permohonan sebagai peserta kegiatan.

B. Pelaksanaan Pendidikan:

1. Registrasi Peserta;
2. Pelaksanaan Pendidikan:
 - Metode ceramah umum (aula);
 - Diskusi dan praktek (kelas khusus);
 - Outbound (untuk kegiatan tertentu).
3. Evaluasi Diklat:
 - Evaluasi Kepuasan Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Evaluasi Pemahaman Peserta Pendidikan.

C. Pelaporan:

1. Sertifikat;
Sertifikat diberikan kepada peserta yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - Memenuhi target minimum kehadiran;
 - Mengikuti dan memenuhi target minimum nilai praktek.
2. Setelah kegiatan selesai dilaksanakan maka disusun laporan kegiatan sebagai salah satu laporan evaluasi kinerja dan pertanggungjawaban keuangan.

3 Jangka Penyelesaian

Penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan jadwal kegiatan dari masing-masing kegiatan Pendidikan.

4 Biaya Tarif

Tanpa dikenakan biaya/tarif.



5 Produk Layanan

1. Tingkat pemahaman peserta pembelajaran hak konstitusional warga negara;
2. Tingkat kualitas layanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

6 Sarana dan Prasarana/Fasilitas

1. Ruang dilengkapi dengan *air conditioner* (AC) dan akses internet;
2. Alat bantu pengajaran berbasis komputer LCD dan audio visual;
3. Kelengkapan kelas (papan tulis, spidol, penghapus, *flip chart*, *sound system*, *proyektor*, LCD);
4. Kelengkapan peserta:
 - a. Seminar kit;
 - b. Dokumentasi kegiatan dalam bentuk *link google drive*;
 - c. Buku panduan kegiatan dalam bentuk PDF;
 - d. Bahan ajar dari Narasumber.
5. Ruang Makan;
6. Ruang Penunjang: mushola dan toilet;
7. Posko kesehatan;
8. Sarana parkir kendaraan;
9. Akomodasi dan konsumsi;
10. Sarana prasarana bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus seperti *step lobby/ramp* bagi pengguna kursi roda, tempat parkir khusus, toilet khusus, *lift* khusus, kamar khusus bagi disabilitas, dan kulkas untuk menyimpan Air Susu Ibu (ASI);
11. Sarana olahraga, yaitu tenis meja dan tempat senam;
12. Pojok digital;
13. Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan).

7 Kompetensi Pelaksana

1. SDM yang memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pendidikan melalui analisis kebutuhan pendidikan;
2. SDM yang mampu merancang, mengembangkan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. SDM yang memiliki kemampuan di bidangnya masing-masing sesuai dengan tugasnya dalam penyelenggaraan Pendidikan;
4. Tenaga pengajar atau Narasumber yang memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktek sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
5. SDM yang memiliki perilaku santun, ramah, dan inisiatif dalam memberikan pelayanan Pendidikan.



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

8 Pengawasan Internal

1. Dilakukan oleh atasan langsung;
2. Dilakukan pemantauan dan monitoring;
3. Dilakukan evaluasi terhadap peserta dan penyelenggaraan pendidikan;
4. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah).

10 Jumlah Pelaksana

Pelaksana Penyelenggara Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, terdiri dari:

1. Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Narasumber;
3. Mancadaya;
4. Panitia dari instansi/organisasi;
5. Dukungan teknis pihak lainnya.

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Layanan langsung:

Meja Informasi dan Pengaduan
Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM.83, Tugu Selatan, Kec. Cisarua, Bogor, Jawa Barat 16750.

Layanan tidak langsung:

- Telepon: 021 23529000
- Whatsapp: 085157929660
- Email: pusdik@mkri.id atau office@mkri.id
- Web/Microsite: www.mkri.id atau pusdik.mkri.id
- Melalui Kotak Saran
- Melalui sistem pengaduan LAPOR pada tautan www.lapor.go.id

Jaminan Pelayanan

1. Setiap penjelasan atau pelayanan informasi sesuai dengan Maklumat Pelayanan Publik;
2. Setiap peserta mendapatkan pelayanan yang sama dengan peserta lainnya (tidak diskriminatif);
3. Rancangan kegiatan pendidikan mengacu pada pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan konstitusi;
4. Materi pendidikan sesuai dengan pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
5. Pengajar pendidikan memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktik sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
6. Evaluasi penyelenggaraan pendidikan pancasila dan konstitusi dari peserta, narasumber dan penyelenggara.



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

12 Jaminan Keamanan, Keselamatan Pelayanan

1. Perjanjian Kerjasama antara Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK dengan Instansi/Organisasi tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Pelayanan akomodasi dan konsumsi yang telah disediakan sesuai dengan standar;
3. Tersedia posko kesehatan;
4. Demi menciptakan rasa aman dan nyaman bagi peserta:
 - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan CCTV;
 - Petugas Security berjaga 24 jam;
 - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan);
 - Tangga darurat dan titik kumpul.
5. Keselamatan pengguna layanan atas kelalaian petugas menjadi tanggung jawab Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama berada dilingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

13 Evaluasi Kinerja Pelaksana

1. Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal secara berkala, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;
2. Laporan Pengukuran Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

14 Masa Berlaku Izin

Tidak ada

15 Waktu Pelayanan

1. Senin s.d. Kamis: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 12.00 WIB - 13.00 WIB);
2. Jumat: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 11.30 WIB - 13.00 WIB);
3. ATAU menyesuaikan dengan jadwal kegiatan pendidikan.



Sampaikan Aspirasi dan Pengaduan Anda !



**Kuesioner
Online**



**Masukan dan
Saran di Microsite**

Contact Center Pusdik:

0851-5792-9660



officialMKRI



@officialMKRI



@mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI

www.mkri.id

TIM PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

Santhy Kustrihardiani
Kepala Bidang
Program dan
Penyelenggaraan



Mastiur Afrilidiany Pasaribu
Kepala Bagian
Umum



Santi Widiastuti
Kepala Subbidang Program
dan Evaluasi



Hadian Taofik Rochman
Kepala Subbidang
Penyelenggaraan



Mundiri
Kepala Pusat

Bambang Sukmadi
Kepala Subbagian Tata
Usaha



Medi Kurniadi
Kepala Subbagian
Sarana dan
Prasarana



Hafidz Ikhsan Baihaki
Pranata Komputer



Chafid Sugianto
Penyuluh Hukum



Edwin Aditya Irawan
Penyuluh Hukum



Angga Putri Gardina
Penyuluh Hukum



Muhlis Nova



Penelaah Teknis
Kebijakan

Suhardi



Penelaah Teknis
Kebijakan

**William Ivan Nathanael
Panggabeen**



Pengolah Data dan
Informasi

Bambang Sugito



Pengadministrasi
Perkantoran

KURIKULUM KEGIATAN

Peningkatan
Wawasan
Kebangsaan &
Reaktualisasi
Implementasi
Nilai-Nilai
Pancasila melalui
Experiential
Learning

Peran Jurnalis
dalam
Penanganan
Perkara di
Mahkamah
Konstitusi

Peran Wartawan
sbg Jurnalis dlm
Menjaga Hak
Konstitusionalitas
dan Demokrasi
melalui
Penyampaian
Berita yg Menjaga
Etika & Indepen-
densi di MK

PELAKSANAAN KEGIATAN

- **Waktu :** Kamis s.d. Sabtu
11 s.d. 13 Desember 2025
- **Tempat :**
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.
Jl. Raya Puncak Km. 83 Cisarua – Bogor



JADWAL KEGIATAN

HARI	WAKTU	KEGIATAN
Kamis, 11 Desember 2025	10.00 – 13.30 WIB	Check in dan Registrasi Peserta, <i>Coffee Break</i> , & Ishoma
	13.30 – 14.00 WIB	Penjelasan Teknis
	14.00 – 15.30 WIB	Sesi I: Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila melalui <i>Experiential Learning</i>
	15.30 – 16.00 WIB	<i>Coffee Break</i>
	16.00 – 18.00 WIB	Lanjutan: Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila melalui <i>Experiential Learning</i>
	18.00 – 19.00 WIB	ISHOMA
	19.00 – 21.00 WIB	Pentas Seni Musik

HARI	WAKTU	KEGIATAN
Jumat, 12 Desember 2025	06.00 – 07.00 WIB	Senam Pagi
	07.00 – 09.00 WIB	Makan Pagi
	09.00 – 11.00 WIB	Sesi II: Peran Jurnalis dlm Penanganan Perkara di MK Narasumber: Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol – Pan Mohamad Faiz K.W., S.H., M.C.L., Ph.D
	11.00 – 13.30 WIB	ISHOMA
	13.30 – 14.30 WIB	Peluncuran Mahkamah Konstitusi <i>Learning Center</i> (MKLC) 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya & Hymne MK 2. Laporan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 3. Penayangan Video MKLC 4. Ceramah Kunci & Pembukaan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi 5. Video Tayangan Pengenalan MKLC & MKRI AI 6. Mars Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa
	14.30 – 17.30 WIB	Sesi III: Peran Wartawan sebagai Jurnalis dalam Menjaga Hak Konstitusionalitas dan Demokrasi melalui Penyampaian Berita yang Menjaga Etika dan Independensi di MK Narasumber: YM Ketua & Wakil Ketua MK

JADWAL KEGIATAN

HARI	WAKTU	KEGIATAN
Sabtu, 13 Desember 2025	05.00 – 06.00 WIB	Pengkondisian/Persiapan Penutupan
	06.00 – 07.00 WIB	Penutupan Kegiatan 1. Kesan dan Pesan Perwakilan Peserta 2. Sambutan dan Penutupan oleh Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi 3. Pembacaan Doa
	07.00 WIB-selesai	Check Out dan Kepulangan Peserta



KETENTUAN UMUM



Durasi Kegiatan adalah 3 hari, wajib melakukan presensi dan mengikuti kegiatan yang telah ditetapkan



Peserta Wajib menggunakan perangkat smartphone untuk keperluan kegiatan dan akses sistem informasi diberikan



Peserta wajib mengisi kuesioner online yang telah disediakan.



Diwajibkan untuk mengikuti tata tertib selama kegiatan berlangsung

E-SERTIFIKAT

- Peserta akan diberikan e-sertifikat keikutsertaan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara berbasis E-Learning.
- E-sertifikat diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan (kehadiran 100%) dan mengikuti segala ketentuan.

PEMBIAYAAN

Biaya akomodasi dan konsumsi peserta selama kegiatan menjadi beban Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Biaya bahan dan/atau materi pembelajaran menjadi beban Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Panitia memberikan uang harian kepada peserta

Peserta tidak dipungut biaya apapun selama mengikuti kegiatan



SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PESERTA LANGSUNG DAN TRANSPARAN (SIMULTAN)

pusdik.mkri.id

- ❖ Registrasi dan Absensi
- ❖ *PreTest* dan *Post Test*
- ❖ Kuesioner Evaluasi Narasumber dan Evaluasi Kegiatan
- ❖ *Softcopy* materi kegiatan
- ❖ e-Sertifikat



officialMKRI



@officialMKRI



@mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI

www.mkri.id

INTERNET / WI-FI



Pusdik_MK
password: pusdikmkri9



officialMKRI



@officialMKRI



@mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI

www.mkri.id



FASILITAS DI PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI



officialMKRI



@officialMKRI



@mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI

www.mkri.id

Grha Konstitusi 1



- Rumah Istirahat bagi para Hakim, Narasumber, dan Tamu VIP
- Terdiri dari 12 Ruangan

Grha Konstitusi 2



- Gedung Kantor Administrasi
- Poliklinik





Grha Konstitusi 3

- Gedung Penyelenggaraan Kegiatan Pembelajaran yang terdiri dari 2 Lantai
- Terdapat *Roof Top* di Atas Gedung

KONSTITUSI



officialMKRI



@officialMKRI



@mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI

www.mkri.id

Grha Konstitusi 3



- Aula Penyelenggaraan Kegiatan Pembelajaran dengan Kapasitas 160 Peserta dan Dilengkapi dengan Videotron



- 4 Ruang Kelas Besar dengan Kapasitas 40 Orang per Kelas
- Dapat Dibagi Menjadi 8 Kelas Kecil dengan Kapasitas 20 Orang



Grha Konstitusi 4



Grha Konstitusi 5



Gedung yang digunakan sebagai tempat istirahat para peserta kegiatan



officialMKRI



@officialMKRI



@mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI

www.mkri.id

Kamar Peserta di Grha Konstitusi 4 dan 5



Grha Konstitusi 7



Tempat Makan Peserta

Mushola



Di Samping Grha Konstitusi 7



officialMKRI



@officialMKRI



@mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI

www.mkri.id

Fasilitas di Dalam Grha Konstitusi 7



Fasilitas Lainnya



Ruang Registrasi dan Ruang Tunggu Peserta di Grha Konstitusi 2



officialMKRI



@officialMKRI



@mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI

www.mkri.id

Fasilitas Lainnya



Parkir Khusus Disabilitas
di Depan Grha Konstitusi 4



Lift
di Lobby Grha Konstitusi 2



Ruang Laktasi
di Grha Konstitusi 4



Fasilitas Lainnya



Poliklinik
di Grha Konstitusi 2



Pojok Digital
di Grha Konstitusi 2

MAHKAMAH KONSTITUSI

TERIMA KASIH





MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

PEDOMAN PENGGUNAAN SIMULTAN

SIMULTAN (Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan)



officialMKRI



@officialMKRI



@mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI

www.mkri.id

FUNGSI SIMULTAN



Pre & Post Test

Mengerjakan *Pre Test* dan *Post Test* secara online dengan login sesuai ID peserta



Evaluasi Narasumber dan Kegiatan

Mengisi *Kuesioner Evaluasi Narasumber dan Kuesioner Evaluasi Kegiatan* (di akhir kegiatan) secara online



Booklet & Materi

Mengunduh pedoman kegiatan dan bahan paparan narasumber



Daftar Hadir

Daftar hadir/ presensi kami sediakan dalam bentuk digital



E-Sertifikat

Mengunduh e-Sertifikat setelah kegiatan berakhir



Akses laman pusdik.mkri.id pada *browser*



Klik LOGIN pada bagian SIMULTAN

pusdik.mkri.id

 **PusdikMK**

Beranda Tentang Pusdik **Simultan** Kegiatan Alumni Zona Integritas Informasi Publik Kontak

SIMULTAN

SIMULTAN



Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan

Simultan adalah sistem informasi untuk memudahkan para peserta kegiatan untuk mendapatkan informasi terkait kegiatan seperti:

- ✓ Profil Peserta
- ✓ Booklet Kegiatan
- ✓ Materi Kegiatan
- ✓ Manajemen Kamar
- ✓ Pre-Test dan Post-Test
- ✓ Kuesioner Evaluasi
- ✓ E-Sertifikat

Login

Masukan Username dan Password

← → ↻ pusdik.mkri.id/index.php?page=web.Login 🔍 📄 ☆ ☰ 🗖 👤 ⋮



Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Login Pusdik MKRI

User Name

Password

Login

PUSDIK
PANCASILA & KONSTITUSI

© Copyright 2019 Mahkamah Konstitusi. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.



Profil Peserta

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

Nama Lengkap	:	Dr. Konstitusi, S.H., M.H.
Tempat/tgl lahir	:	Bogor / 2013-02-26
Usia	:	9 tahun 9 bulan 1 hari
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Pendidikan Terakhir	:	S3
Asal Instansi	:	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Alamat Rumah	:	Jalan Raya Puncak Km. 83, Cisarua Kab. Bogor, Jawa Barat
Nomor Handphone (WhatsApp wajib aktif)	:	085157929660
E mail	:	pusdik@mkri.id

Profil Peserta



Meng-edit Profil Peserta



Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

ProfilBarcodeMateriPresensiKuesionerE-SertifikatLogout



NIK	:	
Nama Lengkap	:	Safira Putri Purnama, S.Kom
Tempat/tgl lahir	:	Jakarta / 1985-09-26
Usia	:	37 tahun 4 bulan 21 hari
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Pendidikan Terakhir	:	S2
Asal Instansi	:	Mahkamah Konstitusi RI
Jabatan	:	Programmer Utama
Alamat Rumah	:	Desa Satriamekar D.K.I. JAKARTA, KOTA JAKARTA TIMUR
Nomor Handphone (WhatsApp wajib aktif)	:	
E mail	:	
Kamar	No.	Grha

Edit Profile

Klik “Edit Profile”

Catatan:

***Nama Lengkap dan Gelar
yg tercantum pada Profil
Akun Sistem Informasi
Peserta (SIMULTAN) yg
akan Diketak pada e-
Sertifikat***

Edit Profil Peserta
Tas Bimtek jangan di hapus dulu ya

NIK * :

Gelar Depan * :

Nama Lengkap * :
Usulan Perbaikan Nama :
Usulan Perbaikan Nama (Isiah Purnama) menunggu persetujuan panitia, terima kasih.

Gelar Belakang * :

Tempat/Tanggal Lahir * :

Jenis Kelamin * :

Pendidikan * :

Instansi * :

Jabatan * :

Alamat * :

Desa/Kelurahan * :

Provinsi * :

Kabupaten/Kota * :

HP * :

Email * :

[Update Data](#)

Meng-edit Profil Peserta

Peserta Dapat:

1. Revisi Nama Lengkap (Perlu Persetujuan Pusedik MK melalui Sistem);
2. Tambahkan Gelar; dan
3. Lengkapi Data yg Masih Kosong.

Selanjutnya, klik “Update Data” pada Bagian Bawah Laman.



Meng-edit Profil Peserta

Profil Peserta
Tes Bimtek jangan di hapus dulu ya



NIK	:	
Nama Lengkap	:	Safira Putri Purnama, S.Kom (Usulan Perbaikan Nama (Ishak Purnama) menunggu persetujuan panitia, terima kasih)
Tempat/tgl lahir	:	Jakarta / 1985-09-20
Usia	:	37 tahun 4 bulan 21 hari
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Pendidikan Terakhir	:	S2
Asal Instansi	:	Mahkamah Konstitusi RI
Jabatan	:	Programmer Utama
Alamat Rumah	:	Desa Satriamekar D.K.I. JAKARTA, KOTA JAKARTA TIMUR
Nomor Handphone (WhatsApp wajib aktif)	:	
E mail	:	
Kamar	No	Grha

Edit Profile

Setelah peserta Klik “Update Data” pada Laman sebelumnya, maka Peserta akan kembali ke Laman Profil Peserta.

Apabila peserta merevisi Nama Lengkap, akan ada notifikasi “Usulan Perbaikan Nama menunggu persetujuan panitia. Terima kasih.”



Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

#	Judul	Pemateri	File
1	Eksistensi dan Pemberdayaan Masyarakat Adat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia	Mahkamah Konstitusi	File
2	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	Mahkamah Konstitusi	File
3	Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	Mahkamah Konstitusi	File
4	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum	Mahkamah Konstitusi	File

Mendownload Materi atau Bahan Paparan Narasumber



Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

#	Judul	Waktu	Absen
1	Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	27-11-2022 07:30 WIB s/d 29-11-2022 09:30 WIB	Presensi 27-11-2022 07:30 WIB s/d 29-11-2022 10:00 WIB
2	Konstitusi dan Konstitusionalisme	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:00 WIB	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:30 WIB
3	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945	29-11-2022 13:00 WIB s/d	29-11-2022 13:00 WIB s/d

Klik tombol “Presensi” yang berwarna biru

*Tombol “Presensi” berwarna biru hanya akan muncul ketika materi dimulai sesuai jadwal hingga 30 menit setelah materi selesai sesuai jadwal.

*Presensi dilakukan pada setiap sesi Materi



Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

#	Judul	Waktu	Absen
1	Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	27-11-2022 07:30 WIB s/d 29-11-2022 09:30 WIB	Sudah Absen 27-11-2022 07:30 WIB s/d 29-11-2022 10:00 WIB
2	Konstitusi dan Konstitusionalisme	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:00 WIB	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:30 WIB
3	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945	29-11-2022 13:00 WIB s/d	29-11-2022 13:00 WIB s/d





Bimbingan Teknik atau PPHKWN

[E-Sertifikat](#)

Mengunduh e-Sertifikat



622ae73b0c0f7.pdf

1 / 2



54%



Klik Tanda Panah Bawah untuk Mengunduh (*Download*)

Mengisi *Pre Test* dan *Post Test*



Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Profil Barcode Materi Presensi **Kuesioner** Sertifikat Logout

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

SOAL PRE TEST

SOAL POST TEST

EVALUASI KEGIATAN

Nilai Pre Test

:

0

Nilai Post Test

:

0

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner



officialMKRI



@officialMKRI



@mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI

www.mkri.id



Nilai Pre Test

Nilai Post Test

14

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
1	Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila		29-11-2022 07:30 s/d 29-11-2022 09:30	Isi Kuesioner
2	Konstitusi dan Konstitusionalisme		29-11-2022 10:00 s/d 29-11-2022 12:00	Isi Kuesioner
3	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945		29-11-2022 13:00 s/d 29-11-2022 15:00	Isi Kuesioner

Mengisi Kuesioner Evaluasi Narasumber





Kuesioner Evaluasi Narasumber Oleh Peserta

Contoh Kegiatan Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Konstitusi & Persiapan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019
Bagi Karyawan Mancadaya Mahkamah Konstitusi Angkatan II

Penilaian oleh Peserta

NO	Penilaian Pelaksanaan Kegiatan	Sangat Buruk	Buruk	Baik	Sangat Baik
1.	Kemampuan Menyajikan Materi	☐	☐	☒	☐
2.	Sistematika Penyajian Materi	☐	☐	☐	☐
3.	Interaksi Dengan Peserta	☐	☐	☐	☐
4.	Penggunaan Bahasa Lisan	☐	☐	☐	☐

Halaman

“Kuesioner Evaluasi Narasumber”

***Mohon diisi setelah atau menjelang setiap sesi materi berakhir**





Saran dan Perbaikan

1.

2.

Simpan

Isi

Isi lembar **Kuesioner Evaluasi Narasumber** dengan memilih salah satu jawaban, **setelah selesai** klik “**simpan**”

*** Seluruh penilaian wajib diisi, kecuali kolom saran dan perbaikan**



Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

SOAL PRE TEST

SOAL POST TEST

EVALUASI KEGIATAN

Nilai Pre Test

:

0

Nilai Post Test

:

0

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
----	-------	----------	-------	-----------

Mengisi Evaluasi kegiatan





Kuesioner Evaluasi Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

Penilaian oleh Peserta

NO	A. Materi	Tidak Setuju	Kurang Setuju	Setuju	Sangat Setuju
1.	Kesesuaian antara materi yang diberikan dengan mata ajar	☐	☐	☐	☐
2.	Materi yang disampaikan mampu memberikan informasi dan bermanfaat	☐	☐	☐	☐
3.	Materi yang diberikan mudah dipahami	☐	☐	☐	☐
4.	Alokasi waktu masing-masing materi telah sesuai	☐	☐	☐	☐
5.	Materi yang disajikan merupakan isu yang problematis	☐	☐	☐	☐
6.	Materi meningkatkan keterampilan analisis	☐	☐	☐	☐
Materi yang paling menarik		Pilih Materi ▼			





Secara umum berikan pendapat anda mengenai keseluruhan hasil pelayanan kami (skor 1-100)

Saran dan Perbaikan

1.

2.

3.

Simpan



Mengisi *Pre Test* dan *Post Test*



Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

[Profil](#) [Barcode](#) [Materi](#) [Presensi](#) [Kuesioner](#) [E-Sertifikat](#) [Logout](#)

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

SOAL PRE TEST

SOAL POST TEST

EVALUASI KEGIATAN

Nilai Pre Test

:

0

Nilai Post Test

:

0

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner



officialMKRI



@officialMKRI



@mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI

www.mkri.id

Klik pada tulisan
“SOAL PRE TEST”



Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia



**Peningkatan Pemahaman Hak
Konstitusional Warga Negara bagi Ikatan
Arsitek Indonesia**

SOAL PRE TEST

No	Judul	Pemateri	
1	Penjelasan Teknis Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Ikatan Arsitek Indonesia		





SOAL PRE TEST BIMTEK PHPU 2019

Contoh Kegiatan Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Konstitusi & Persiapan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019
Bagi Karyawan Mancadaya Mahkamah Konstitusi Angkatan II

Sisa Waktu : 19 Menit 48 Detik

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan memilih salah satu jawaban yang tepat !

1. Lembaga negara di bawah ini memiliki tugas dan fungsi terkait dengan pemilihan umum kecuali....

- ☐ Badan Pengawas Pemilu
- ☐ Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
- ☐ Komisi Pemilihan Umum
- ☐ Mahkamah Konstitusi
- ☐ Pemantau Pemilu

Halaman

“Lembar *Pre Test* & *Post Test*”

*Waktu mengerjakan soal *Pre test* dan *Post test* : **20 menit**



- ☐ Putusan
- ☐ Putusan Sela

15. Layanan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi yang disediakan oleh Mahkamah Konstitusi kepada para pihak adalah...

- ☐ Akses terhadap berkas permohonan Pemohon melalui laman (website)
- ☐ Pengajuan permohonan secara daring (online)
- ☐ Persidangan jarak jauh (video conference)
- ☐ Siaran langsung proses persidangan melalui media internet (live streaming)
- ☒ Semua benar

Simpan

Isi

Isi lembar kerja ***Pre Test*** dan ***Post Test*** dengan memilih salah satu jawaban, **setelah selesai 10 soal** klik “**simpan**”

Hasil *Pre Test* dan *Post Test*



Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

[Profil](#) [Barcode](#) [Materi](#) [Presensi](#) [Kuesioner](#) [E-Sertifikat](#) [Logout](#)

Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

SOAL PRE TEST

SOAL POST TEST

EVALUASI KEGIATAN

Nilai Pre Test

:

11

Nilai Post Test

:

14



officialMKRI



@officialMKRI



@mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI

www.mkri.id

TERIMA KASIH



officialMKRI



@officialMKRI



@mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI

www.mkri.id

Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Berbasis E-Learning

Oleh Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum

Ketua Umum Asosiasi Pengajar Hukum Acara
Mahkamah Konstitusi (APHAMK)



Pendahuluan: Fondasi Demokrasi Konstitusional

Kesadaran akan hak konstitusional adalah fundamental bagi tegaknya negara hukum di Indonesia. Mahkamah Konstitusi (MKRI) tidak hanya berfungsi yudisial, tetapi juga edukatif, melalui putusan terbuka, riset, dan program diseminasi seperti Constitutional Law Lecture.

Namun, pemahaman masyarakat belum merata. Perubahan sosial dan dominasi media daring menuntut strategi pendidikan konstitusi yang inovatif. E-learning menjadi kebutuhan strategis untuk memperluas akses pendidikan konstitusi secara nasional.



Landasan Konseptual dan Urgensi E-Learning

Hak Konstitusional

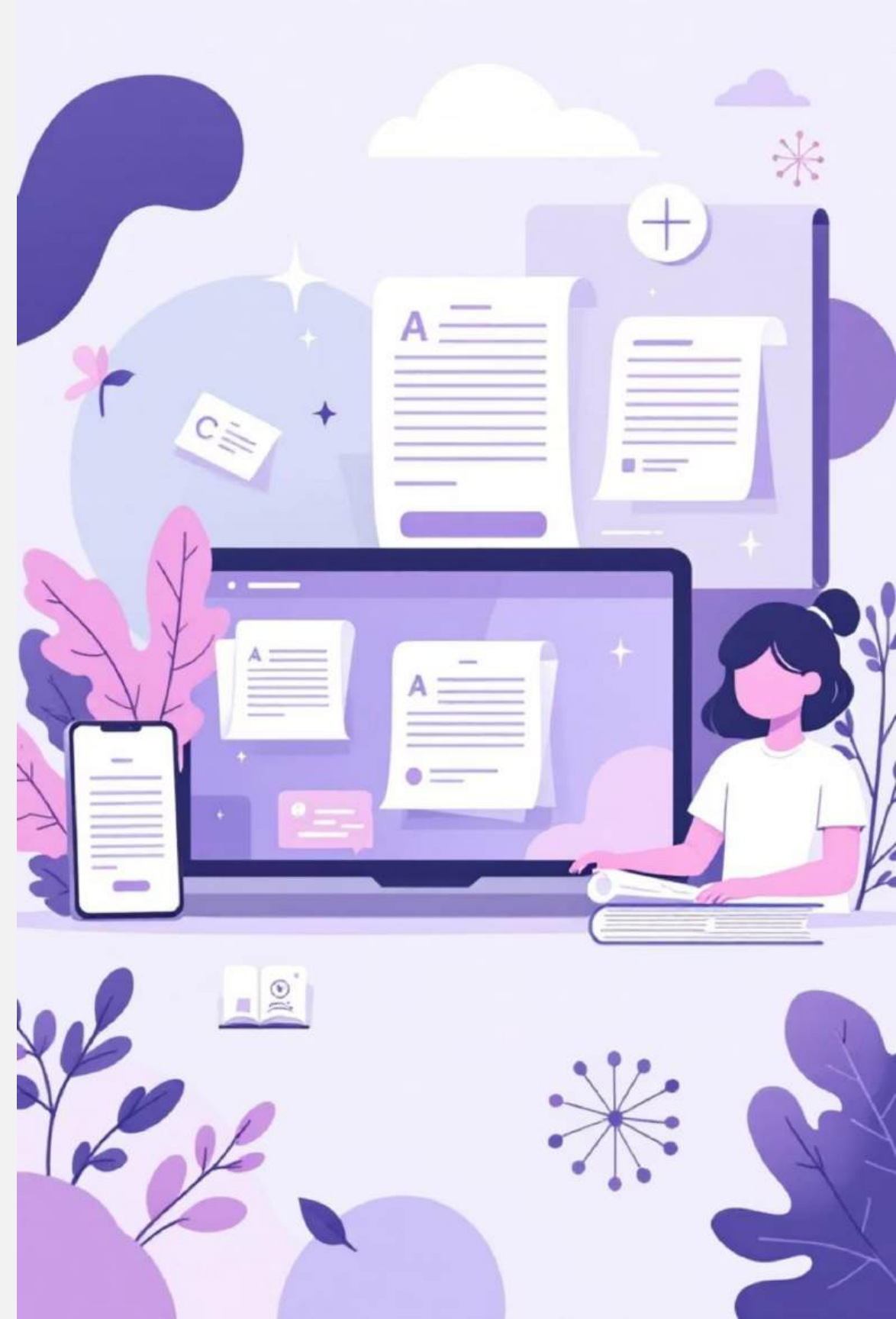
Dijamin UUD 1945, meliputi hak politik, ekonomi, sosial, budaya, dan personal. Sifatnya abstrak, butuh interpretasi yudisial.

Pendidikan Konstitusi

Bukan sekadar tambahan, melainkan fondasi demokrasi. MK memiliki mandat moral untuk memastikan konstitusi dipahami semua warga.

Peran E-Learning

Pola konsumsi informasi bergeser ke digital. E-learning menembus batas geografis, adaptif, dan interaktif, mempercepat pemahaman hak konstitusional.



Model E-Learning Inovatif



Konstitusi Learning Hub

MOOC dengan modul hak konstitusional, putusan MK, video, kuis, dan forum diskusi.



Simulasi Persidangan Digital

Peserta berperan sebagai pemohon/hakim, menganalisis isu konstitusional.



Aplikasi Konstitusi Pintar

Informasi pasal konstitusi relevan dengan masalah sehari-hari warga.



AI untuk Putusan MK

Meringkas putusan ke bahasa populer, visual storytelling, atau animasi.



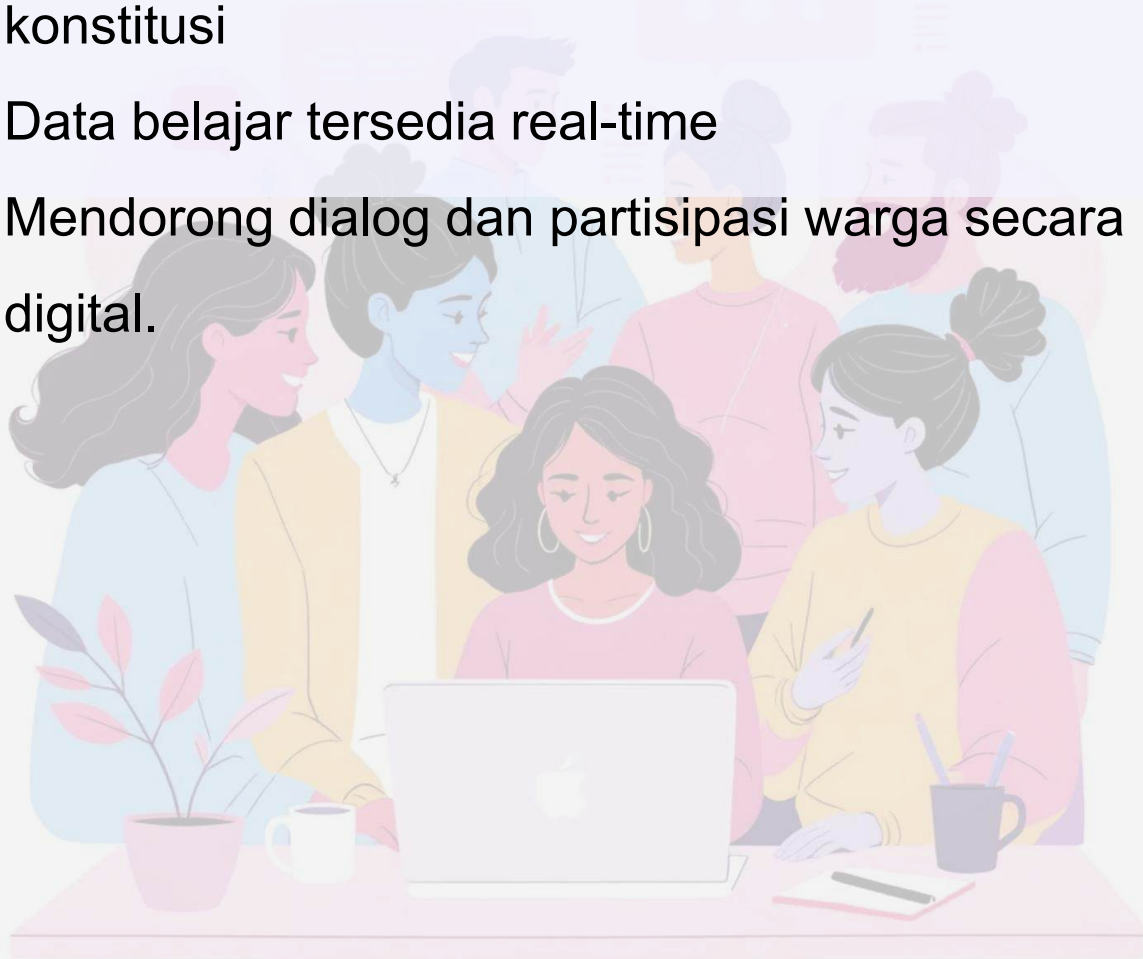
Kelas E-Learning Komunitas

Untuk guru PPKn, perangkat desa, siswa, dan kelompok rentan.

Manfaat dan Tantangan E-Learning

Manfaat Signifikan

- Akses pendidikan lebih luas dan hemat biaya
- Konten mudah diperbarui dan belajar fleksibel
- Multimedia mempermudah pemahaman konsep konstitusi
- Data belajar tersedia real-time
- Mendorong dialog dan partisipasi warga secara digital.



Kelemahan & Tantangan

- Akses internet dan literasi digital belum merata
- Materi konstitusi kompleks dan perlu penyederhanaan
- Motivasi belajar mudah turun karena distraksi digital
- Perlu desain pembelajaran yang menarik
- Kurasi konten wajib oleh lembaga kredibel (MKRI, APHAMK)



PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BERBASIS E-LEARNING: SEBUAH KAJIAN AKADEMIS DAN GAGASAN INOVATIF

Oleh

Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum

**Ketua Umum Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
(APHAMK)**

Pendahuluan

Dalam perkembangan demokrasi konstitusional Indonesia, kesadaran dan pemahaman warga negara mengenai hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menjadi syarat fundamental bagi tegaknya negara hukum. Sebagai lembaga negara yang berperan mengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) tidak hanya menjalankan fungsi yudisial, tetapi juga fungsi edukatif bagi masyarakat luas. Putusan-putusan MK yang bersifat *open access*, publikasi riset konstitusi, serta program diseminasi seperti *Constitutional Law Lecture*, *Constitutional Law Clinic*, hingga kegiatan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi merupakan bentuk komitmen MK untuk membangun literasi konstitusional masyarakat.

Namun, tantangan masih besar. Pemahaman masyarakat terhadap hak-hak konstitusional belum merata dan cenderung terpusat pada kalangan terdidik atau mereka yang bersentuhan dengan lembaga hukum dan perguruan tinggi. Perubahan sosial yang cepat, mobilitas digital, dan dominasi media daring menuntut pembaruan strategi pendidikan konstitusi agar lebih sesuai dengan pola belajar masyarakat kontemporer. Dalam konteks ini, pemanfaatan **e-learning** menjadi kebutuhan strategis sekaligus peluang untuk memperluas akses pendidikan konstitusi secara nasional.

Makalah ini mengkaji konsep hak konstitusional, pentingnya pendidikan publik berbasis *e-learning*, manfaat dan kendalanya, serta menawarkan gagasan inovatif yang dapat dikembangkan oleh MKRI, lembaga pendidikan hukum, dan komunitas akademik untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hak konstitusional secara lebih efektif.

Landasan Konseptual Hak Konstitusional dan Pendidikan Konstitusi

Hak konstitusional adalah hak yang dijamin oleh UUD 1945 secara langsung kepada warga negara maupun penduduk. Dalam berbagai putusannya, Mahkamah Konstitusi memberikan definisi operasional bahwa hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dan dijamin dalam konstitusi dan dapat diklaim dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang. Konsep ini sangat penting terutama dalam menilai kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon dalam perkara pengujian undang-undang.

Hak konstitusional bersifat luas, meliputi hak politik, hak ekonomi, hak sosial, hak kebudayaan, dan hak-hak personal. Namun pemahaman terhadap hak ini tidak selalu mudah karena sifat konstitusi yang bersifat abstrak, normatif, dan sering kali membutuhkan interpretasi yudisial. Karena itu, pendidikan publik mengenai hak konstitusional bukan sekadar tambahan, tetapi merupakan fondasi bagi kualitas demokrasi.

Mahkamah Konstitusi memiliki mandat moral dan kelembagaan untuk memastikan konstitusi dipahami bukan hanya oleh aparat negara, tetapi oleh seluruh warga negara. Implementasi pendidikan konstitusi harus bersifat modern, inklusif, dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Di sinilah teknologi digital dapat berperan sebagai katalis transformasi pembelajaran konstitusi.

Urgensi Pengembangan E-Learning untuk Pendidikan Hak Konstitusional

Dalam satu dekade terakhir, pola konsumsi informasi masyarakat berubah drastis. Media digital, platform video, dan aplikasi mobile telah menjadi sumber utama informasi publik. Generasi muda menghabiskan lebih banyak waktu di dunia digital daripada di kelas fisik. Kesempatan ini dapat menjadi batu loncatan bagi MKRI untuk merancang transformasi pendidikan konstitusi melalui e-learning.

E-learning menghadirkan pembelajaran yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Model ini menembus batas wilayah geografis, tidak terikat infrastruktur ruang kelas, dan mampu mengadaptasi metode visual serta interaktif yang tidak tersedia dalam media pendidikan konvensional. Pembelajaran konstitusi melalui e-learning juga dapat memanfaatkan mekanisme evaluasi otomatis, personalisasi konten, serta interaksi daring yang memperluas ruang diskusi publik secara nasional.

Dengan demikian, e-learning dapat menjadi medium efektif bagi warga negara untuk memahami hak konstitusionalnya secara lebih cepat, tepat, dan relevan dengan perkembangan zaman.

Model E-Learning Inovatif untuk Pendidikan Hak Konstitusional

Model e-learning yang efektif tidak hanya mentransfer materi, tetapi juga menciptakan pengalaman belajar yang mendorong partisipasi aktif. Berikut gagasan yang dapat dikembangkan sebagai program pendidikan konstitusi berbasis teknologi:

Pertama, platform **Konstitusi Learning Hub** dapat dikembangkan sebagai MOOC yang menyajikan modul khusus tentang hak konstitusional, putusan MK penting, dan contoh kasus yang telah disederhanakan. Setiap modul dapat dilengkapi dengan video pendek, kuis interaktif, dan forum diskusi.

Kedua, pengembangan **simulasi persidangan konstitusi** berbasis digital. Peserta dapat berperan sebagai pemohon, hakim, atau pemerintah dan diminta menganalisis isu konstitusional berdasarkan data fiktif maupun putusan nyata yang disederhanakan. Simulasi ini memperkuat pemahaman substantif sekaligus memperkenalkan mekanisme kerja MK secara menyenangkan.

Ketiga, pengembangan **aplikasi mobile Konstitusi Pintar**, yang mampu memberikan informasi mengenai pasal-pasal konstitusi yang relevan dengan masalah yang dialami warga negara sehari-hari, seperti pelayanan publik, diskriminasi, perlindungan sosial, dan kebebasan berekspresi.

Keempat, penggunaan **kecerdasan buatan** untuk merangkum putusan MK ke dalam bahasa populer, visual storytelling, atau video animasi. Dengan format ini, putusan MK tidak hanya menjadi dokumen hukum teknis, tetapi juga narasi edukatif yang lebih mudah dipahami publik.

Kelima, pembentukan **kelas e-learning berbasis komunitas** untuk guru PPKn, perangkat desa, siswa, aktivis, dan kelompok rentan. Program ini menggabungkan pembelajaran mandiri dengan diskusi kelompok daring yang difasilitasi oleh pengajar dari MK, perguruan tinggi, atau APHAMK.

Manfaat dan Keunggulan E-Learning dalam Pendidikan Hak Konstitusional

Model e-learning membawa sejumlah manfaat signifikan. Dari aspek pemerataan pendidikan, pembelajaran digital menjangkau warga yang sebelumnya tidak tersentuh program diseminasi hukum. E-learning juga mengurangi biaya penyelenggaraan pendidikan, menyediakan akses konten yang dapat diperbarui secara cepat, dan mendukung pembelajaran sesuai kecepatan masing-masing peserta.

Secara pedagogis, penggunaan multimedia mempermudah penjelasan konsep konstitusional yang abstrak. Animasi dapat memvisualisasikan struktur lembaga negara, infografik mempermudah pemahaman prosedur pengujian undang-undang, dan video dapat menghadirkan narasi yang lebih komunikatif. E-learning juga menyediakan data pembelajaran yang dapat dipakai untuk mengukur tingkat pemahaman masyarakat secara real-time.

Keunggulan lain adalah terciptanya ruang demokrasi digital, di mana warga negara dapat berdiskusi, bertanya, dan terlibat dalam dialog konstitusional. Dengan cara ini, pendidikan konstitusi tidak hanya bersifat top-down, tetapi berubah menjadi proses interaksi dua arah yang memperkaya wawasan publik.

Kelemahan dan Tantangan Model E-Learning

Dengan segala keunggulannya, e-learning tetap menghadapi sejumlah kelemahan. Ketimpangan akses internet menjadi kendala utama. Banyak warga negara, terutama di daerah terpencil, belum memiliki fasilitas yang memadai untuk mengikuti pembelajaran daring. Selain itu, kemampuan literasi digital masyarakat juga tidak merata.

Materi konstitusi bersifat kompleks. Jika modul digital tidak disederhanakan dengan tepat, e-learning justru dapat menimbulkan kebingungan. Tantangan lain adalah motivasi belajar. Pembelajaran daring sering tidak diikuti dengan konsistensi karena distraksi digital sangat besar. Oleh karena itu, desain pembelajaran harus kreatif, interaktif, dan menarik.

Selain itu, integritas informasi menjadi isu penting. Penyajian konten konstitusional harus dikurasi oleh lembaga yang kredibel seperti MKRI dan APHAMK untuk menghindari misinformasi atau pemahaman keliru.

Penutup

Pemanfaatan e-learning dalam pendidikan hak konstitusional merupakan langkah strategis untuk memperkuat demokrasi, memperluas literasi hukum, dan meneguhkan peran Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi yang tidak hanya mengadili, tetapi juga mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan memanfaatkan inovasi teknologi, pendidikan konstitusi dapat hadir lebih inklusif, dinamis, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat modern.

E-learning bukan sekadar pilihan alternatif, tetapi sudah menjadi kebutuhan masa kini dan masa depan. Dengan desain pembelajaran yang tepat, dukungan institusi yang kuat, dan kurasi konten yang berkualitas, literasi konstitusi dapat tumbuh menjadi kesadaran kolektif yang memperkuat fondasi negara hukum Indonesia.



Kementerian PPN/
Bappenas



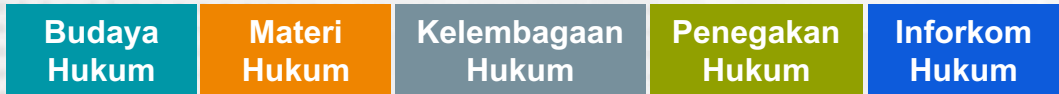
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSI WARGA NEGARA MELALUI E-LEARNING

Direktorat Pembangunan Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan
Kementerian PPN/Bappenas

Desember 2025



Indeks Pembangunan Hukum (IPH)

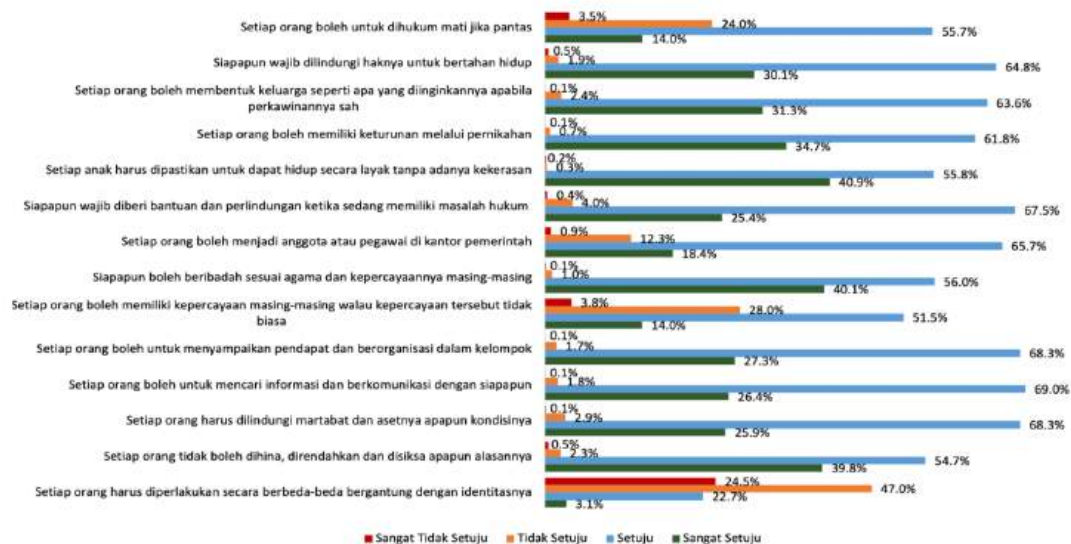


Sumber : Bappenas, 2024

Indikator Tingkat pemahaman Masyarakat terkait hak konstitusional = 0,97 (Baik)

- Melihat tingkat pemahaman terhadap hak sebagai warga negara (aspek pemahaman terhadap hak sipil, ekososbud)
- Aspek fundamental untuk melihat kesadaran hukum masyarakat
- 97 % responden mengetahui hak-hak dasar warga negara (1.361 responden)

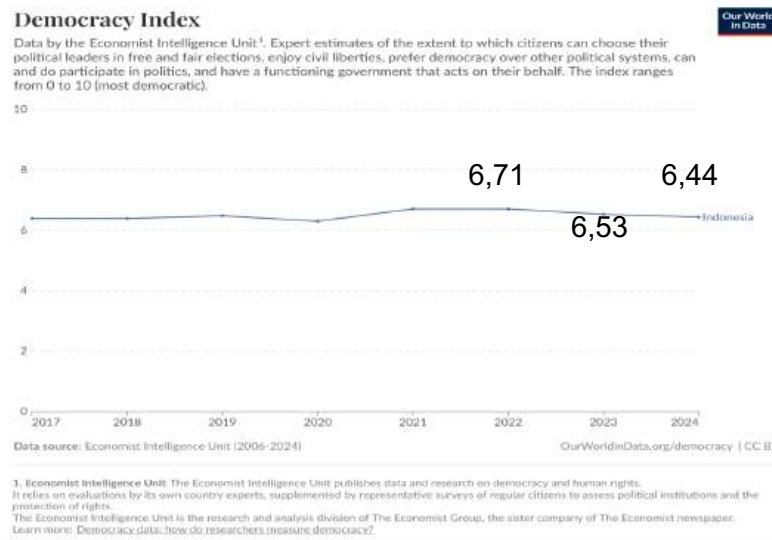
Grafik 3.3 Pemahaman Masyarakat terkait Hak Konstitusional



Selama 3 tahun terakhir, Indonesia mendapatkan skor yang cukup buruk berada di kategori negara dengan demokrasi yang cacat atau *flawed democracy* terhadap dua komponen yaitu budaya politik dan kebebasan sipil

Nilai 0 hingga 10 (paling demokratis).

<https://www.tempo.co>
<https://ourworldindata.org>

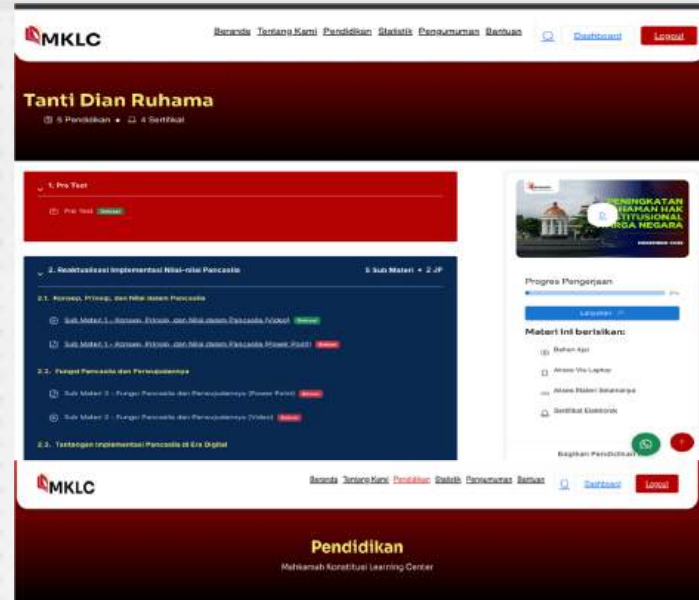


Pengembangan MKLC

- MKLC merupakan pengembangan dari kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara yang sebelumnya dilaksanakan secara luring di Pusdiklat Mahkamah Konstitusi
- Modernisasi memudahkan MK untuk meningkatkan jangkauan terhadap upaya peningkatan kesadaran berkonstitusi bagi masyarakat ke seluruh wilayah di Indonesia.

Rekomendasi :

- Perlu memperhatikan basis wilayah dan target audiens antara Masyarakat umum dan pejabat publik, akademisi dll. Karena akan berbeda dari sisi tampilan pembelajaran, modul ajar, dll
- Pengembangan modul e-learning yang terstruktur, pembuatan konten yang menarik dan informatif dan penyusunan kurikulum modular yang berbasis level sehingga memungkinkan peserta dapat melakukan pembelajaran secara terstruktur.
- Integrasi AI dalam e-learning, memungkinkan peserta untuk melakukan tanya jawab secara *real time* dan simulasi kasus sesuai dengan perkara yang telah terdata.
- Pengembangan aplikasi dengan *interface* yang mudah digunakan dan fleksibel untuk diakses dari berbagai media baik laptop maupun gadget.
- Monitoring dan evaluasi berkala sebagai rujukan untuk peningkatan dan perbaikan sistem.



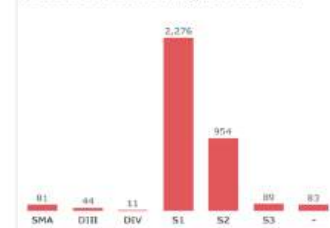
Jumlah Peserta Berdasarkan Asal Wilayah



Jumlah Peserta Berdasarkan Kategori Umur



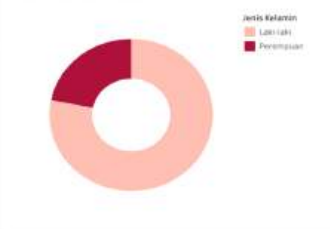
Jumlah Peserta Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Jumlah Peserta Berdasarkan Target Grup



Jumlah Peserta Berdasarkan Jenis Kelamin



Tingkat Pemahaman, Tingkat Kepuasan, dan Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Menurut Kegiatan Bimtek

- Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta
- Tingkat Kepuasan Peserta
- Tingkat Pemahaman Peserta

3,6



Kementerian PPN/
Bappenas



TERIMA KASIH

Dukungan BPK bagi Pencapaian Program Strategis Nasional

Mendukung e-learning Mahkamah Konstitusi
Ringkasan: dasar hukum, tugas, nilai dasar, kriteria topik pemeriksaan, dan implikasi audit bagi efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas program



Fahrudin Latif
BPK RI



Mandat BPK: Dasar Hukum Utama

Landasan konstitusional dan undang-undang
untuk legitimasi pemeriksaan



UUD 1945 (Pasal 23E)

Menetapkan BPK sebagai lembaga yang bebas
dan mandiri



UU No. 15 Tahun 2004

Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara



UU No. 15 Tahun 2006

Tentang Badan Pemeriksa Keuangan sebagai
institusi pemeriksa negara

Tugas Utama BPK: Ruang Lingkup Pemeriksaan

Menjamin akuntabilitas dan transparansi
pengelolaan keuangan negara



01 Pemeriksaan Keuangan

- Menilai **kewajaran** laporan keuangan entitas
- Memeriksa kepatuhan terhadap standar akuntansi dan peraturan
- Menghasilkan opini audit atas laporan keuangan



02 Pemeriksaan Kinerja

- Menilai **efisiensi** penggunaan anggaran
- Menilai **efektivitas** program dan kegiatan
- Mengevaluasi ekonomi dan hasil kebijakan publik

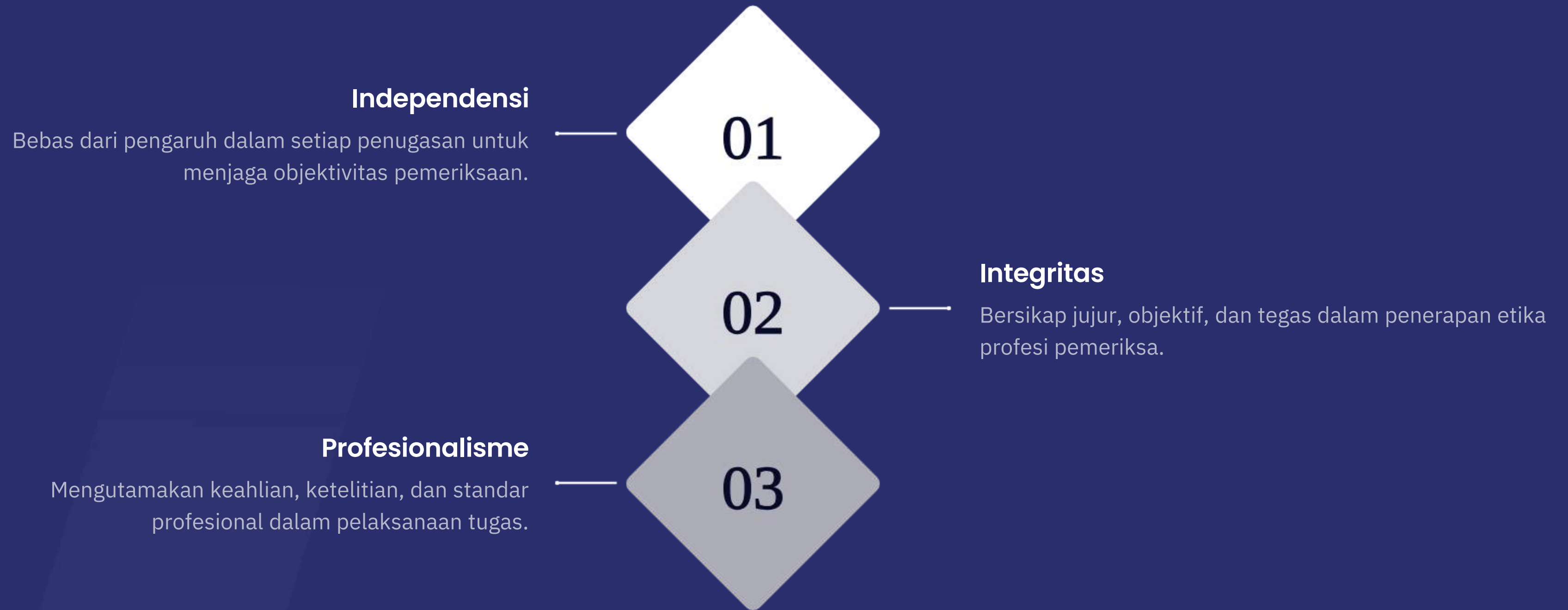


03 Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (PDTT)

- Menangani isu investigatif dan temuan spesifik
- Pemeriksaan fokus pada risiko atau dugaan penyalahgunaan
- Memberikan rekomendasi terarah untuk tindak lanjut

Nilai Dasar BPK: Independensi, Integritas, Profesionalisme

Pedoman etis dan operasional pemeriksa sesuai RENSTRA BPK 2025-2029



Fokus Pemeriksaan untuk Isu Strategis

Mengawal agenda pembangunan dan tata kelola keuangan publik

01

Mengawal agenda pembangunan nasional

Pastikan program prioritas mendapat pengawasan audit yang relevan

02

Menangani isu strategis yang mendapat perhatian publik

Audit diarahkan ke topik yang berdampak luas bagi masyarakat

03

Antisipatif terhadap emerging issues

Deteksi dini isu baru yang dapat memengaruhi tata kelola keuangan

04

Memastikan kesesuaian dengan kewajiban menurut UUD 1945

Audit memeriksa kepatuhan pemerintah pada mandat konstitusi



Pemilihan Area Kunci

Proses berorientasi risiko untuk maksimalisasi akuntabilitas publik



Peran BPK pada Program e-learning MK: Audit Kinerja vs Audit Kepatuhan

Bandingkan tujuan dan fokus; evaluasi efektivitas, efisiensi, transparansi

Audit Kinerja

- Tujuan: menilai pencapaian target pembelajaran dan hasil program
- Fokus: efektivitas metode pengajaran, capaian peserta, output pembelajaran
- Indikator: capaian kompetensi, peningkatan pengetahuan, tingkat kelulusan

Vs

Audit Kepatuhan

- Tujuan: memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan penggunaan anggaran APBN
- Fokus: prosedur administrasi, pengadaan, pelaporan keuangan, tata kelola
- Indikator: dokumen lengkap, proses sesuai regulasi, bukti transaksi

Kesimpulan: Kontribusi BPK untuk Program e-Learning MK

Peran akuntabel, aman, dan berdampak bagi peningkatan kesadaran konstitusional



BPK memiliki kapasitas dan mandat untuk mendukung program e-Learning MK secara akuntabel, aman, dan berdampak.



Audit kinerja akan memastikan peningkatan pemahaman hak konstitusional warga sesuai target nasional.



Keberhasilan program akan memperkuat akuntabilitas keuangan negara dan kesadaran konstitusional masyarakat.



Ajakan: Koordinasi teknis antara MK dan BPK untuk implementasi dan monitoring lanjutan.

Referensi Utama

Daftar referensi yang digunakan dalam bahan ini

01 Undang-Undang No. 15
Tahun 2004

02 Undang-Undang No. 15
Tahun 2006

03 Peraturan BPK No. 3 Tahun
2020 tentang Renstra BPK
2024 -2029

04 Standar Pemeriksaan
Keuangan Negara (SPKN)
BPK – Peraturan BPK No.
12017

05 UUD 1945 (Pasal 23E)

06 Peraturan Presiend No. 12
tahun 2025 tentang RPJMN
2025 – 2029

Terima Kasih



GIACorpu



EKOSISTEM DIGITAL LVC: E-LEARNING BERORIENTASI PENGGUNA

Hanik Inayatur Rohmah

Koordinator Perencanaan, Pengembangan, dan Pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan

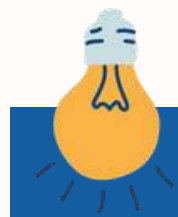
Bogor, 12 Desember 2025



AGENDA

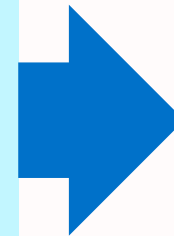
- 1. Sekilas GIA Corpu**
- 2. Rantai Nilai Pembelajaran
(Learning Value Chain/LVC)**
- 3. E-Learning Berorientasi Pengguna**

Tata Kelola GIA Corpu



Before

- Skema Training Center
- Metode Pembelajaran Klasikal (tatap muka)
- Sebagian besar proses bisnis manual
- Cakupan layanan diklat terbatas (Pelatihan Teknis Substansi, Pelatihan JFA)



After

- Framework GIA CORPU
- Metode Pembelajaran klasikal dan Non klasikal
- Proses bisnis sudah otomasi
- Cakupan layanan diklat yang lebih luas (Pelatihan Teknis Substansi, Pelatihan JFA & Sertifikasi non JFA)

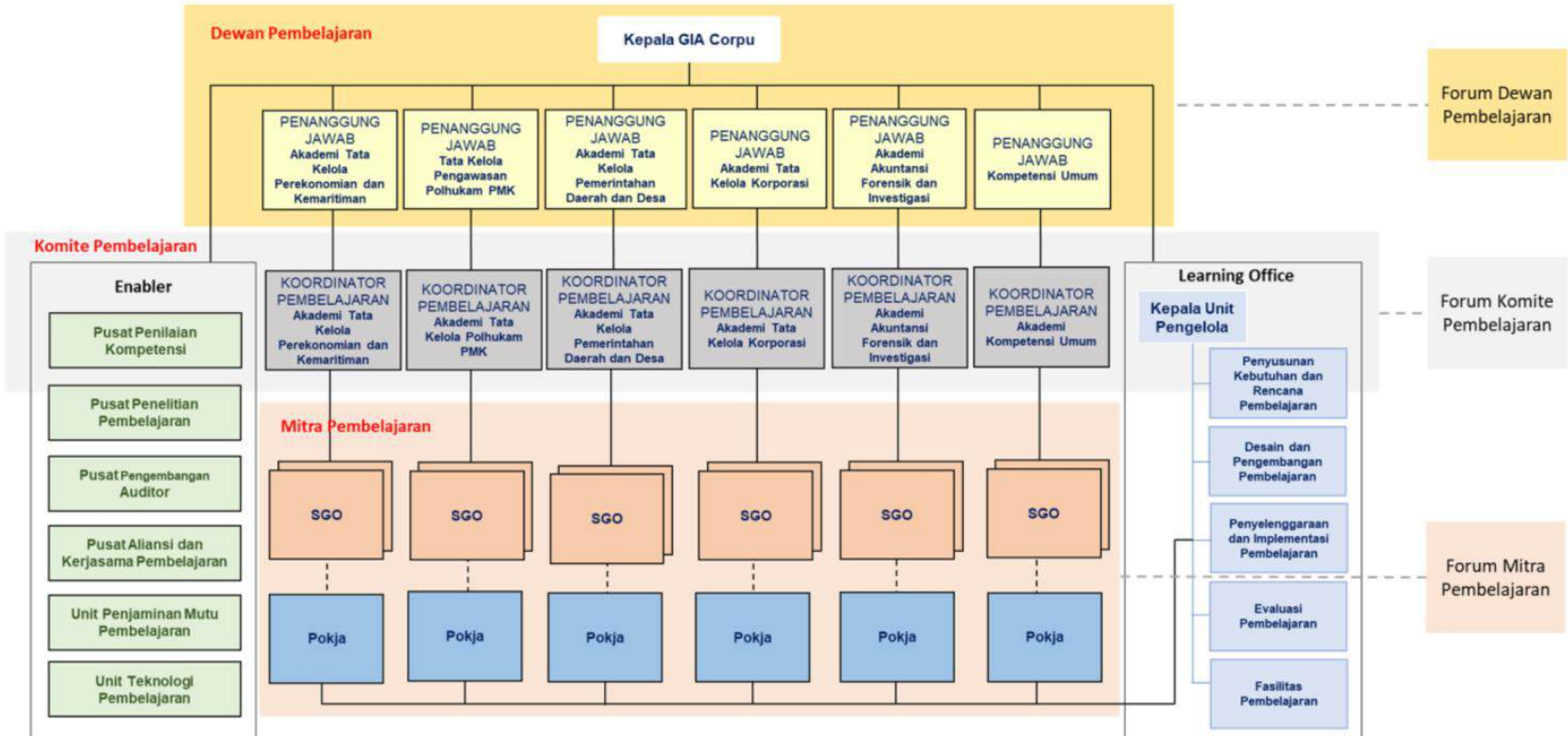
- KLP
- Peningkatan
- Efisiensi
- Efektivitas
- Peningkatan



Our Certification



Struktur Tata Kelola GIA Corpu



Meet Our Amazing Learning Office Team



Chief Learning Officer

Visi

“Menjadi Lembaga Diklat Pengawasan Intern Pemerintah Berkelas Dunia”

Misi

1. Membangun Sumber Daya Manusia Pengawasan Intern Pemerintah yang Berkualitas
2. Meningkatkan Kapabilitas Manajemen dan Sumber Daya Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi



HARI SANTOSA
Kepala Bagian Umum



HANIK INAYATUR ROHMAH
Koordinator Perencanaan, Pengembangan, dan Pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan



GINREY SHANDY ALGAM
Koordinator Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Pengawasan



HENDRO NOVIANTO SUJARWO
Koordinator Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan



DEWI NUR AINI
Subkoordinator Keuangan



AKHMAD MUZAKKI
Subkoordinator Keuangan



GEMA PUJA YUNIARSO
Subkoordinator Pengelolaan Barang Milik Negara, Rumah Tangga, dan Kearsipan



HERY WIJANARKO
Subkoordinator Perencanaan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan Pendidikan dan Pelatihan



ISMET ELISKAL
Subkoordinator Pengembangan Kurikulum dan Materi



MUHAMMAD ISA ARIFANTO
Subkoordinator Pengembangan Metodologi dan Teknologi Pembelajaran



MAHMUDDIN WIGUNA
Subkoordinator Pengelolaan Peserta dan Fasilitator Pendidikan dan Pelatihan



NOVA INDRIANI
Subkoordinator Pendidikan dan Pelatihan Teknis Substansi Pengawasan



EKO FIRMAN PRATOMO
Subkoordinator Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan JFA



DANANG DESTA YUDHA
Subkoordinator Pendidikan dan Pelatihan Teknis Substansi Manajemen Pengawasan



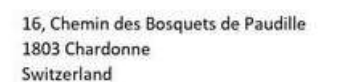
EKO MARDIONO
Subkoordinator Pendidikan dan Pelatihan Kedinasan dan Manajerial



MARTHA ULLY NURFAONI
Subkoordinator Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Non-Jabatan Fungsional Auditor



Badan Usaha





RANTAI NILAI PEMBELAJARAN (LEARNING VALUE CHAIN/LVC)

Kolaborasi Membangun Budaya Pembelajaran



- Biro SDM
- PusbinJFA
- Skill Group Owner
- Pusdiklatwas
- K/L/D/BU

- Skill Group Owner
- PusbinJFA
- Pusdiklatwas

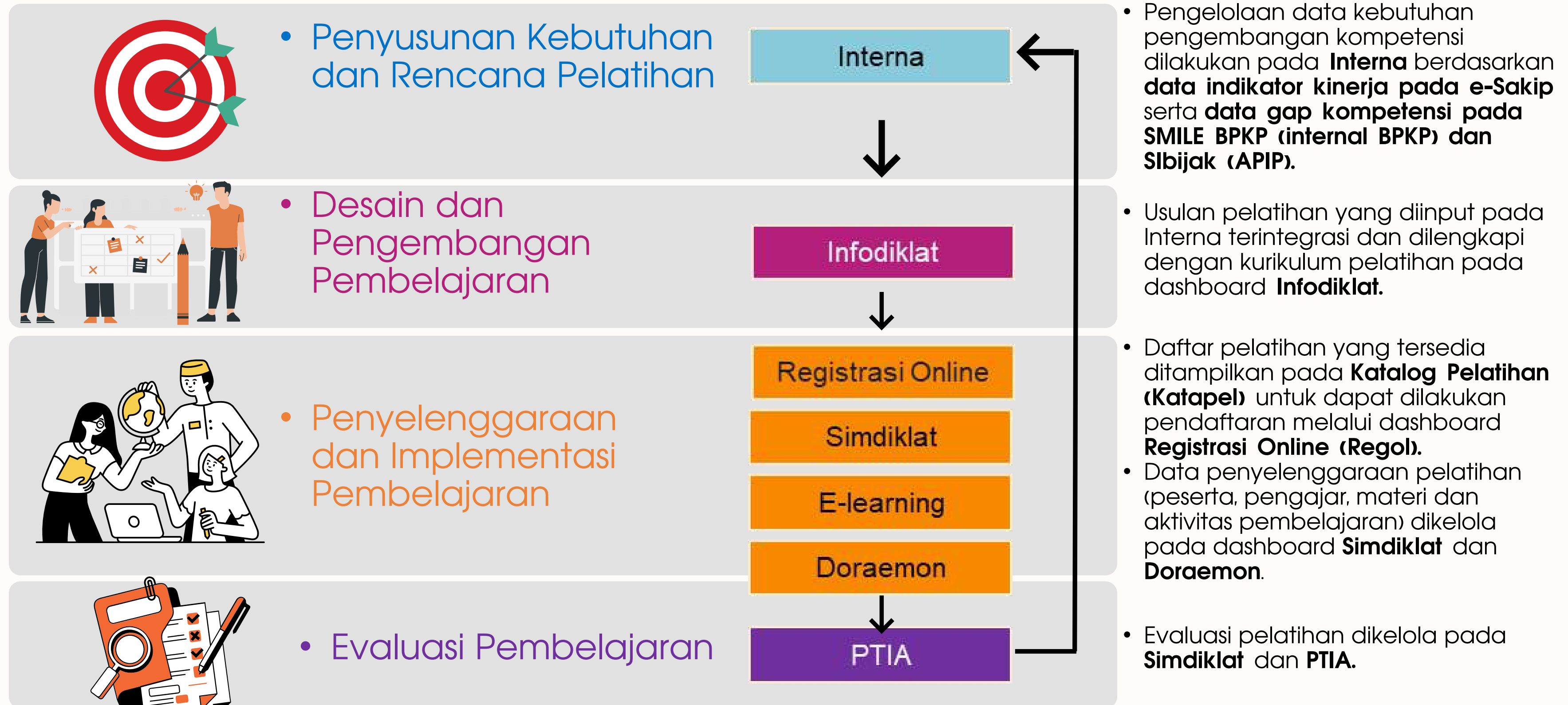
- Pusdiklatwas
- Skill Group Owner
- K/L/D/BU
- International practitioner

- Pusdiklatwas

Hasil evaluasi dikelola oleh Pusdiklatwas sebagai masukan kepada para stakeholders (Biro SDM, PusbinJFA, dan SGO) dalam mengembangkan pembelajaran GIA Corpu.

Ekosistem Pembelajaran Digital

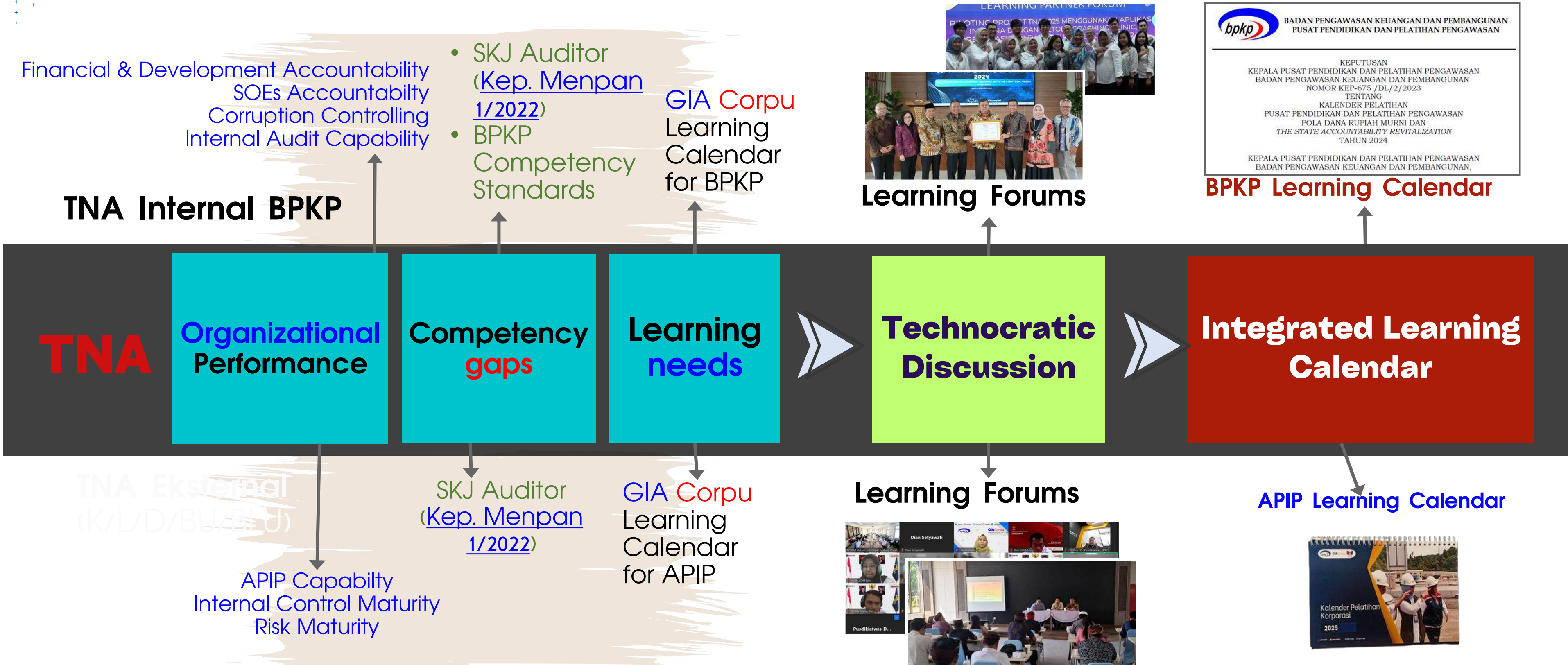
Seluruh manajemen data LVC terintegrasi pada ekosistem yang sama, berbasis pada kebutuhan pengembangan kompetensi dan kinerja pengguna.



Hasil evaluasi pada Simdiklat dan PTIA digunakan sebagai masukan untuk desain materi (pada Interna dan Infodiklat) dan usulan pengajar (pada Infodiklat) pada pelatihan yang akan datang.

Penyusunan Kebutuhan Pelatihan Berorientasi pada Pengguna

Kebutuhan pengembangan kompetensi dan kinerja sebagai dasar dalam penyusunan kalender pelatihan.



The bottom of the slide features two logos. On the left is the logo for BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), consisting of a blue and red stylized oval with the letters 'bpkp' in black. On the right is the logo for GIA Corporate University, with 'GIA' in blue and 'Corpu' in red, followed by the text 'Government Internal Audit Corporate University' in black.

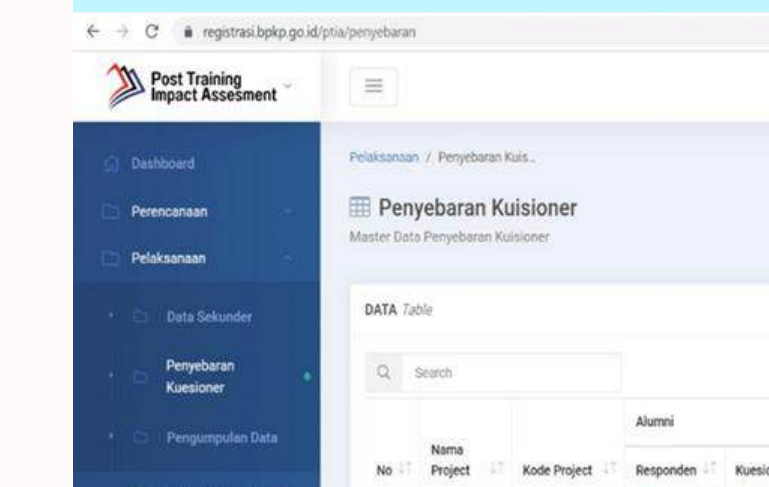
A photograph of a man in a light blue shirt and a purple patterned tie, standing in a classroom and speaking into a microphone. He is gesturing with his right hand. In the foreground, the back of a person wearing a grey hijab is visible, sitting at a desk. A whiteboard is behind the speaker, and a wooden cabinet is to the right. The image is part of a presentation slide with a blue header and footer.



After

- Terintegrasi (10:20:70)
- MOOC
- Microlearning*
- Post Training Impact Assessment (PTIA)

➔

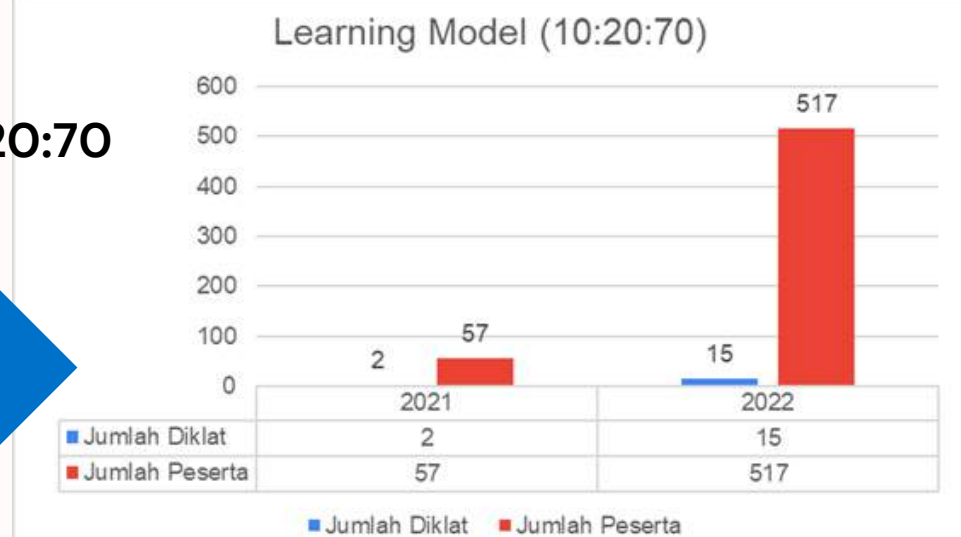


P

Post Training Impact Assessment



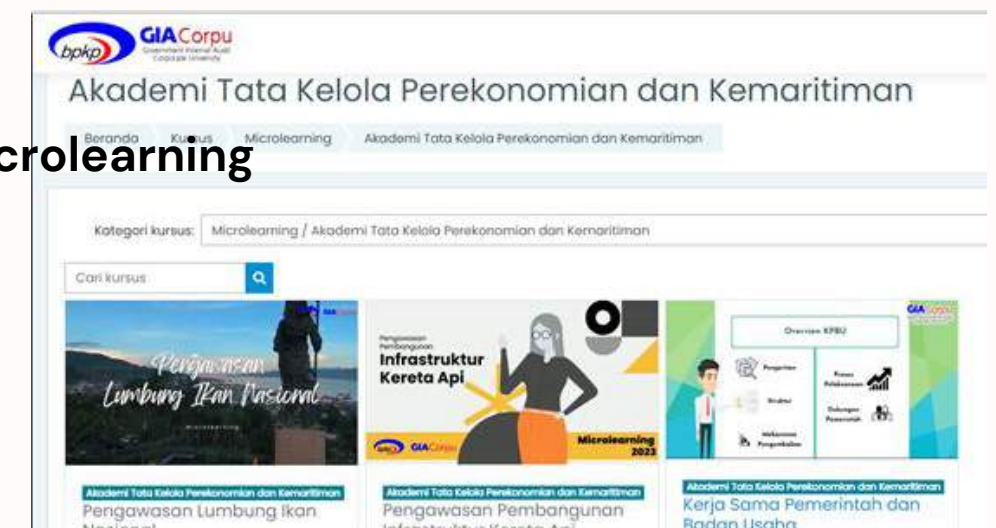
10:20:70



MOOC



Microlearning



Infrastruktur Pendukung Pembelajaran

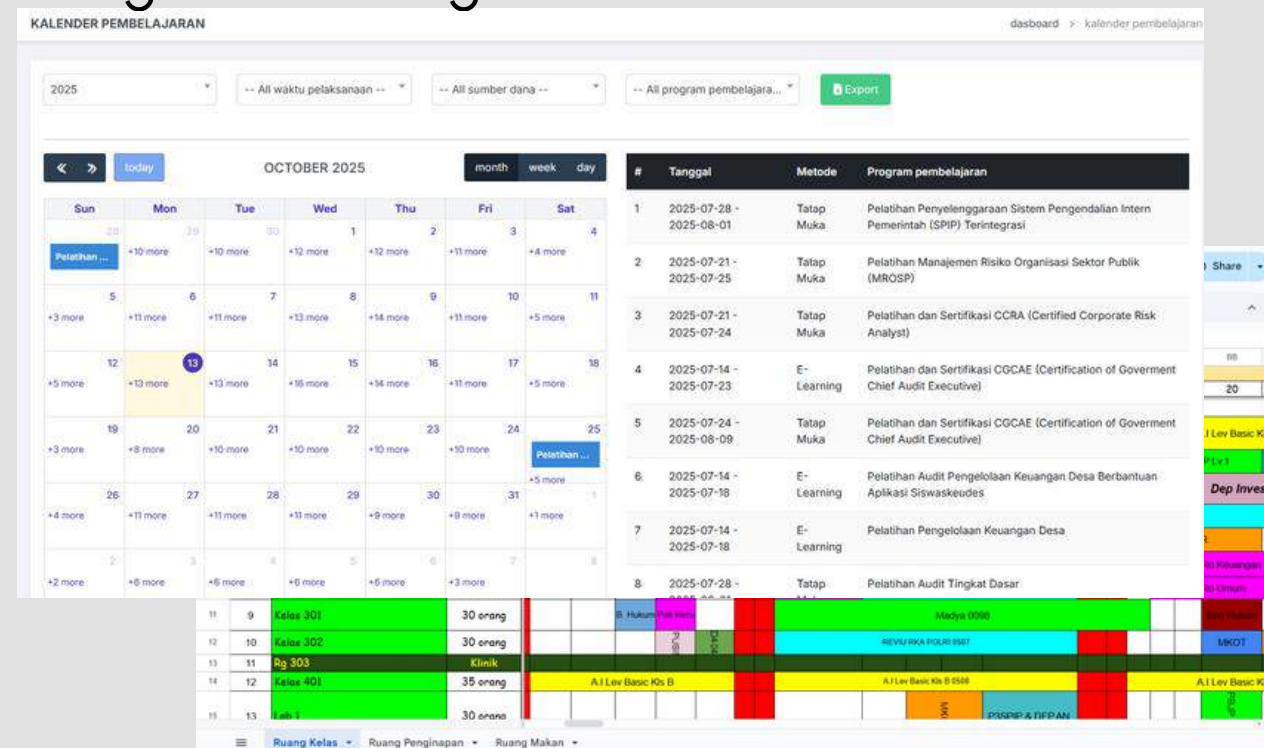
GIA Corpu menyediakan berbagai sarana dan prasarana baik fisik maupun digital untuk mendukung efisiensi dan efektivitas pembelajaran.



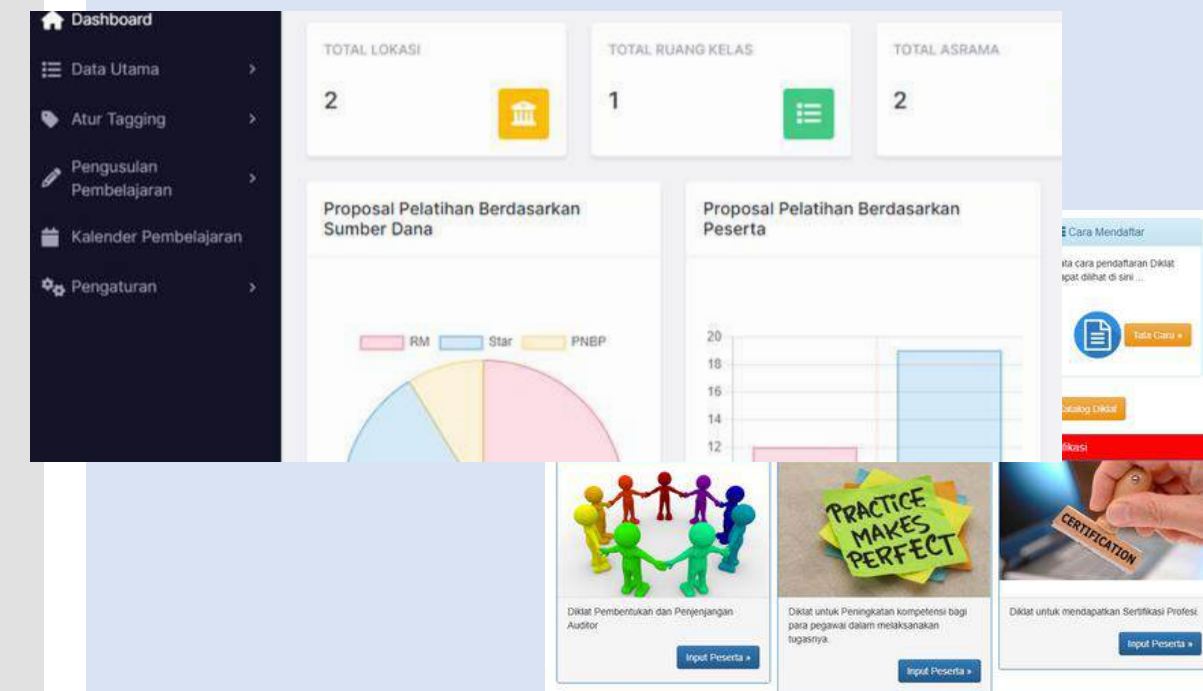
Seluruh kelas di GIA Corpu dirancang untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran peserta yang dilengkapi dengan teknologi multimedia



GIA Corpu juga memiliki ruang terbuka publik yang nyaman seperti rooftop untuk menunjang kenyamanan peserta pelatihan



Seluruh fasilitas pembelajaran dan penunjang (kelas, kamar, dll) dikelola dengan sistem informasi yang terintegrasi dengan seluruh aplikasi di GIA Corpu

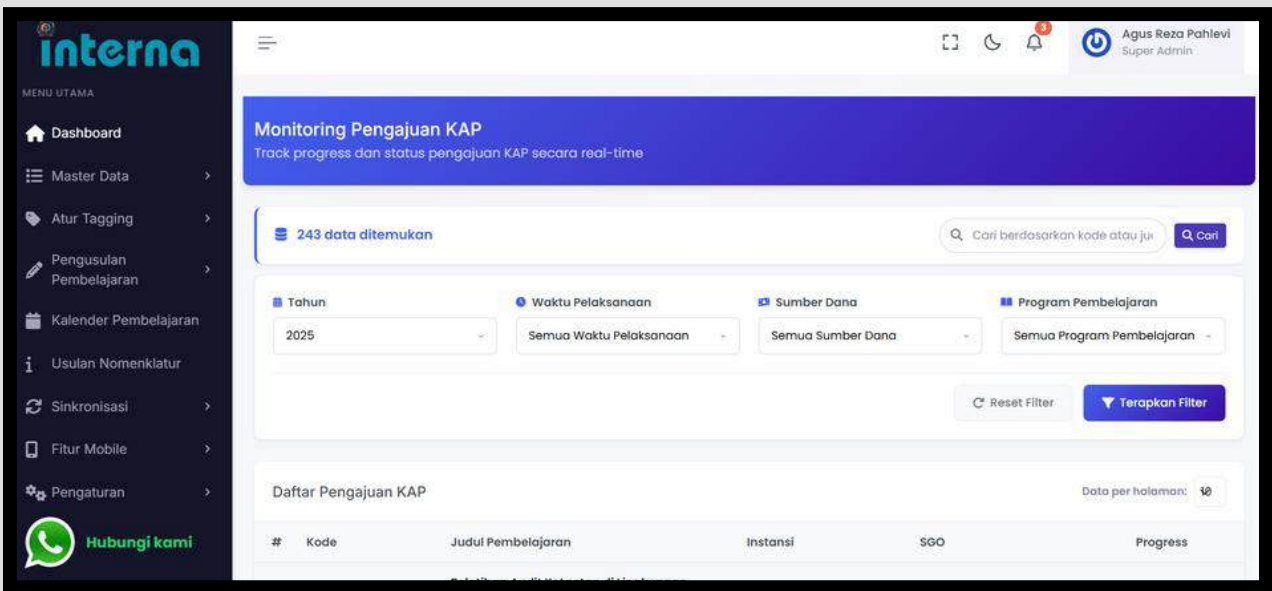


- database LVC merupakan database yang terintegrasi dengan seluruh sistem informasi di BPKP.
- Hasil pelatihan dapat diakses secara realtime.
- Peserta pelatihan mendapat akses virtual class secara realtime dan dapat diakses dimanapun

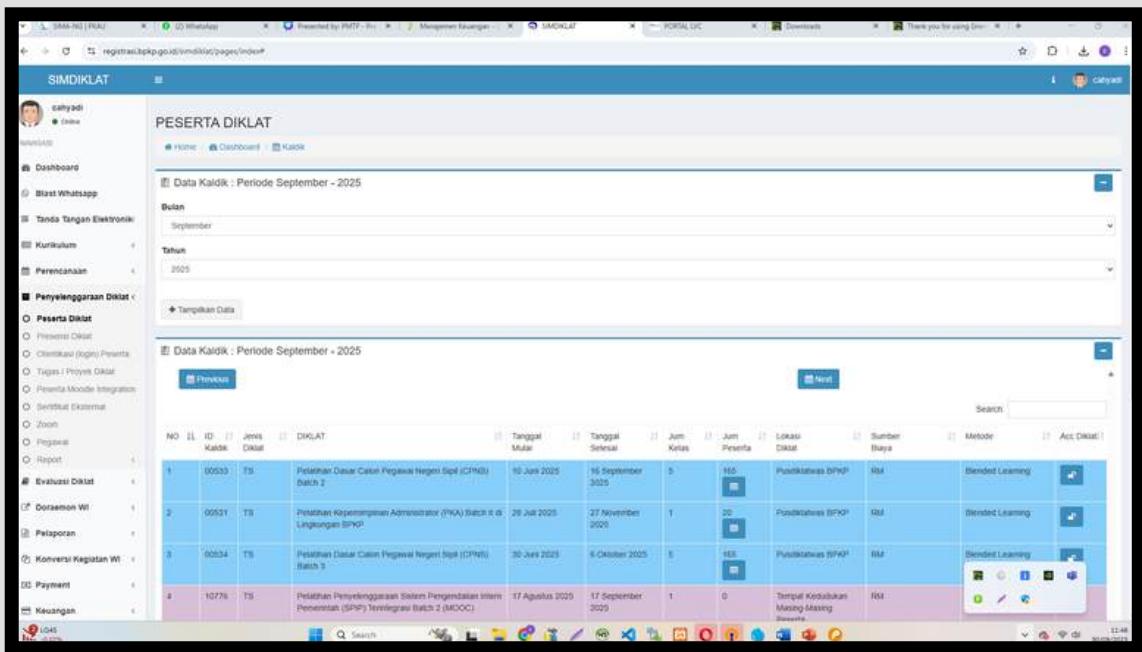
Digitalisasi LVC



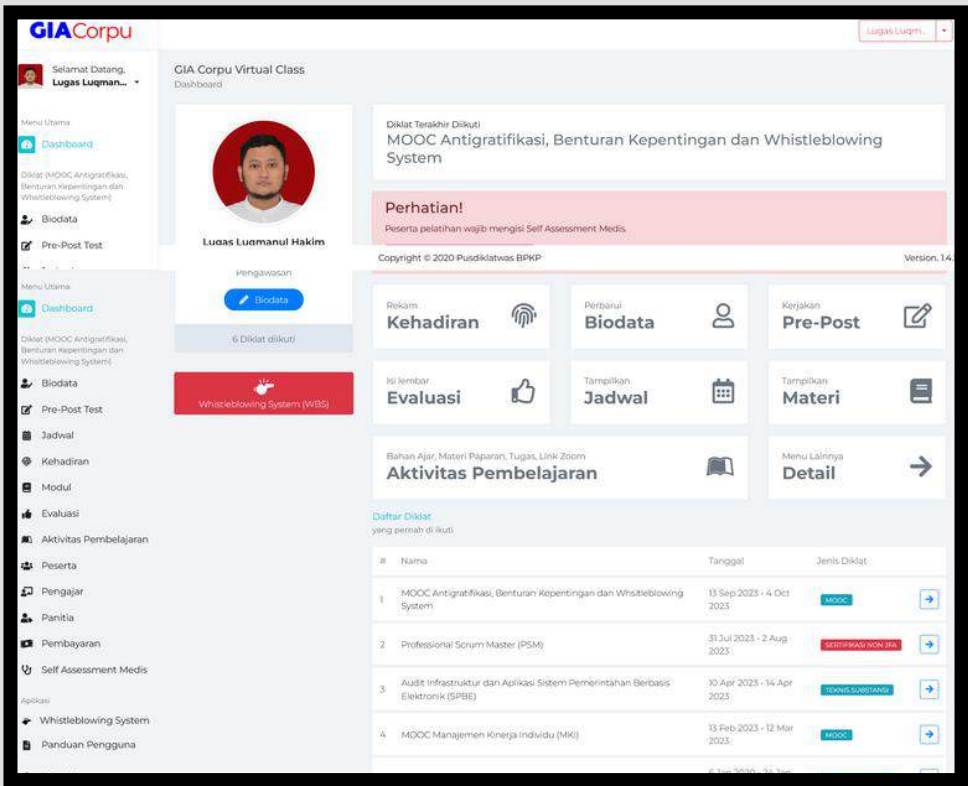
GIACorpu
Government Internal Audit
Corporate University



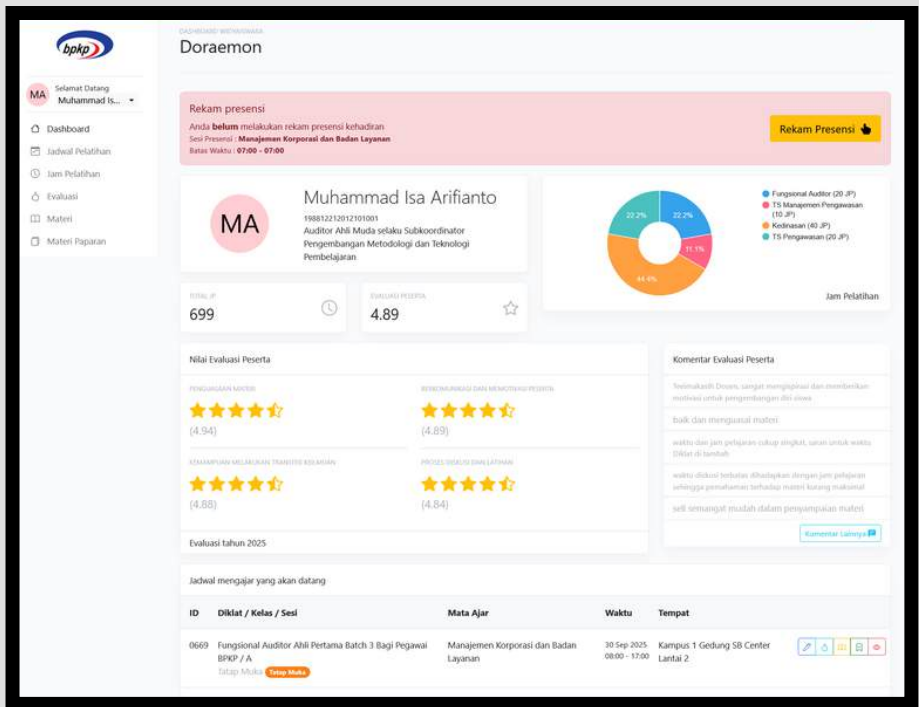
INTERNA



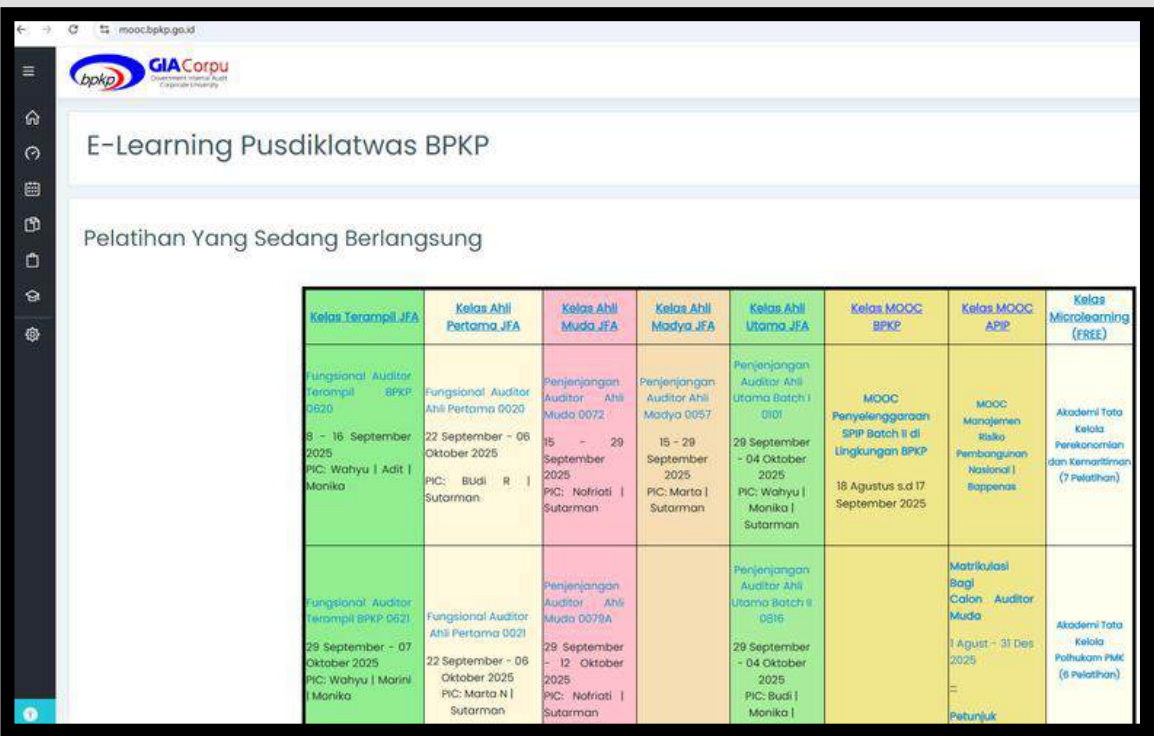
SIMDIKLAT



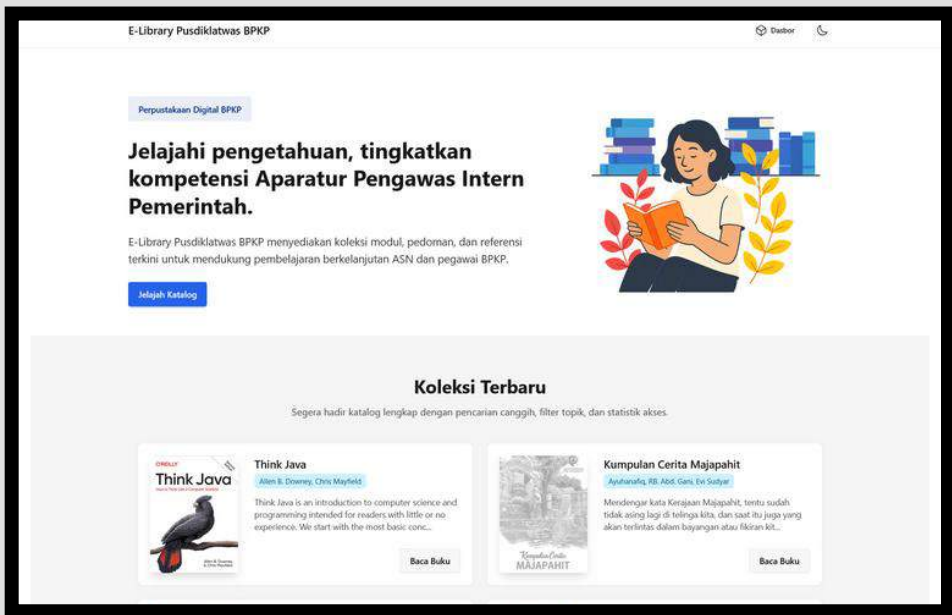
Dashboard Peserta



Dashboard Pengajar



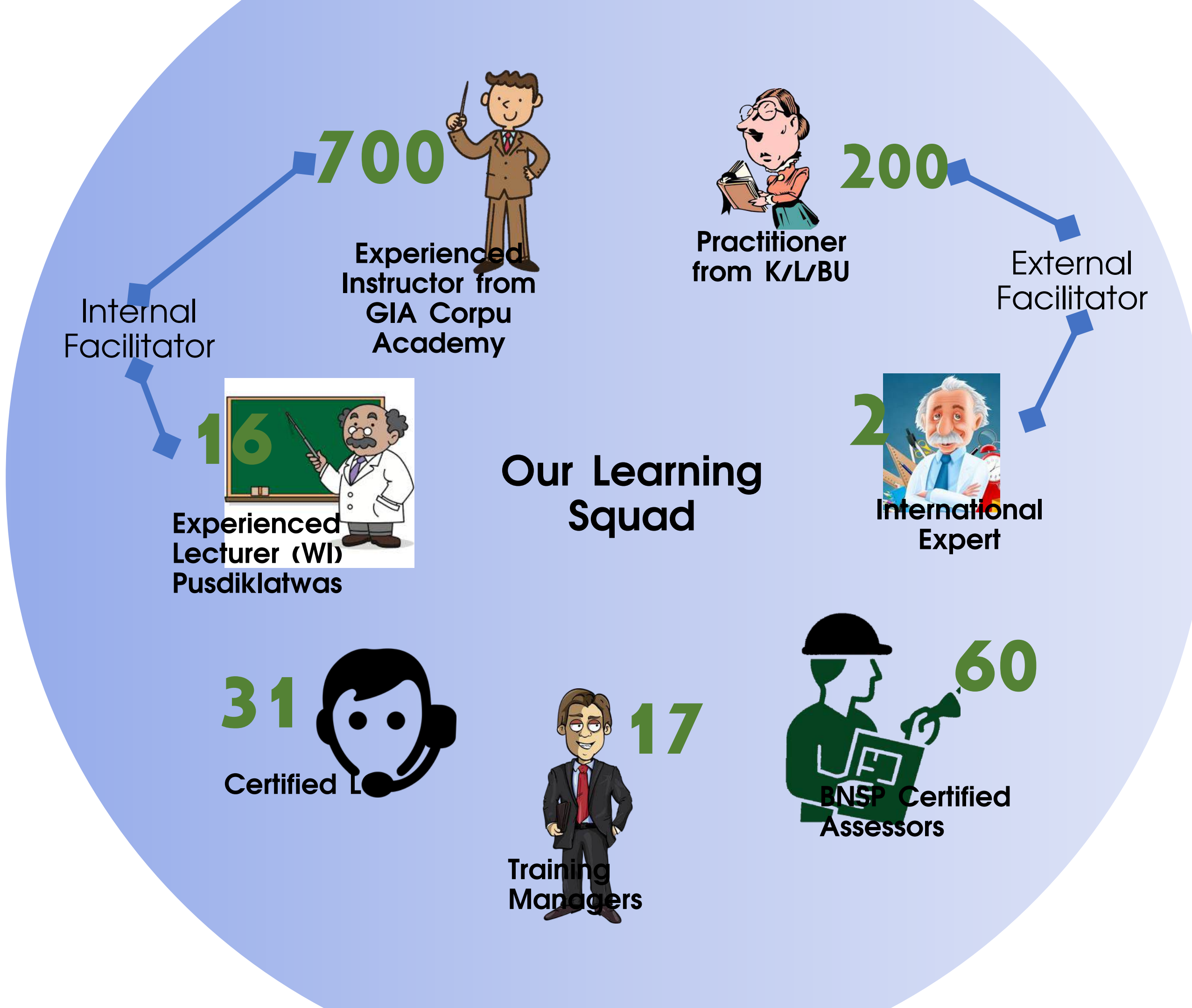
MOOC



e-Library

Sumber Daya Manusia Pembelajaran

GIA Corpu berkomitmen penuh dalam menyediakan anggaran dan sumber daya manusia terbaik untuk menyelenggarakan berbagai jenis pelatihan.



Perluasan Jangkauan Pembelajaran



GIACorpu
Government Internal Audit
Corporate University



**Balai Pelatihan
Provinsi Sumatra
Utara**

2 ruang
kelas
40 kamar
inap

**Balai Pelatihan
Provinsi Sulawesi
Selatan**



4 ruang
kelas
40 kamar
inap

Pusdiklatwas BPKP

12 ruang
kelas
280 kamar
inap



**Balai
Pelatihan
Provinsi Bali**



4 ruang
kelas
70 kamar
inap

E-LEARNING BERORIENTASI PENGGUNA



Metode Pembelajaran GIA Corpu

Pengguna dapat memilih pendekatan pembelajaran yang paling sesuai dengan kebutuhan. Tersedia beragam pilihan metode dari tatap muka langsung, pembelajaran jarak jauh, e-learning, hingga blended learning.



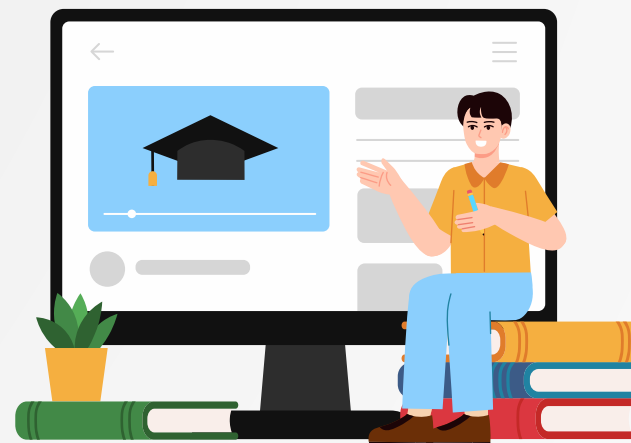
Synchronous Learning

- tatap muka langsung
- **Pelatihan Jarak Jauh (PJJ)**



Asynchronous Learning

- **e-learning via LMS**
- **MOOC dan Microlearning**



Blended Learning

perpaduan synchronous dan asynchronous

Pelatihan Berbasis Elektronik

Pelatihan Berbasis Elektronik dirancang dengan fokus pada kebutuhan pengguna. Setiap pendekatan, desain materi, dan pengalaman belajar dirancang untuk memastikan relevansi, kemudahan, serta dampak nyata bagi peserta.

Massive Open
Online Course
(MOOC)

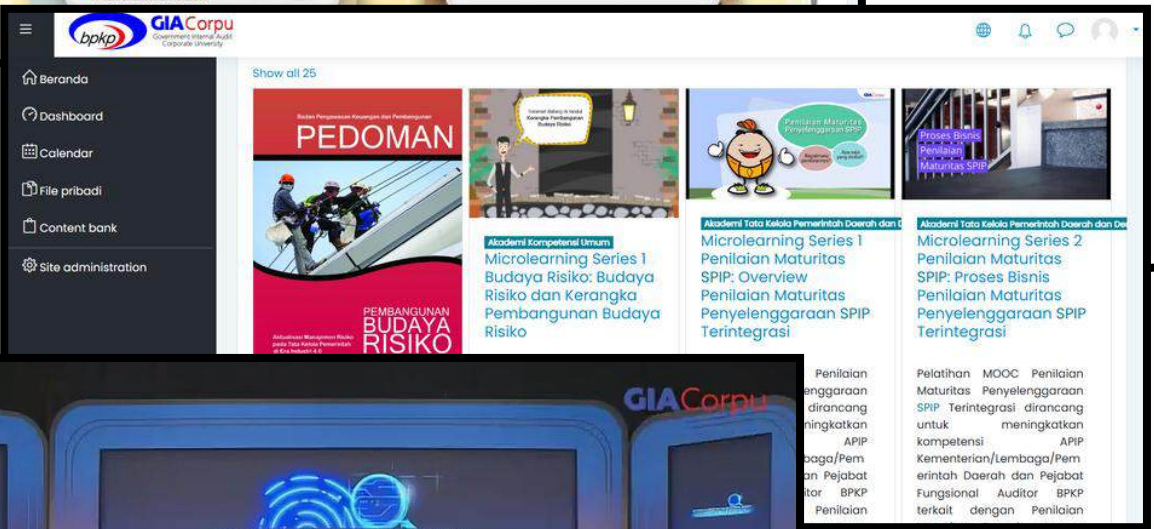
Microlearning

E-learning

Webinar



MOOC berupa konten video lecture, podcast, animasi, dll

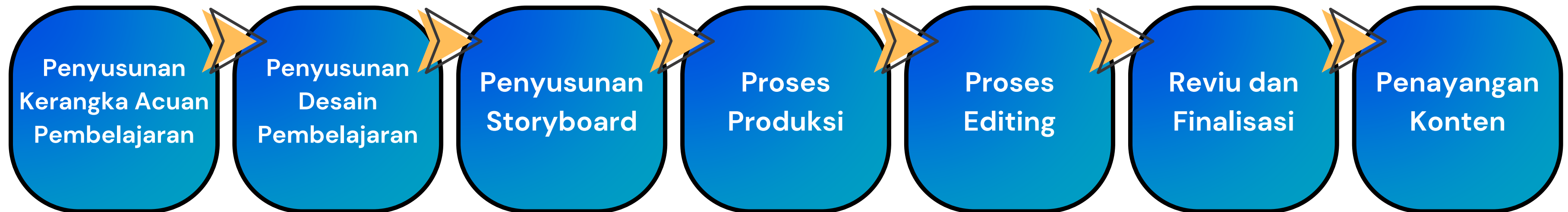


Micro learning dengan durasi pendek



Webinar dengan lebih dari **5000** peserta

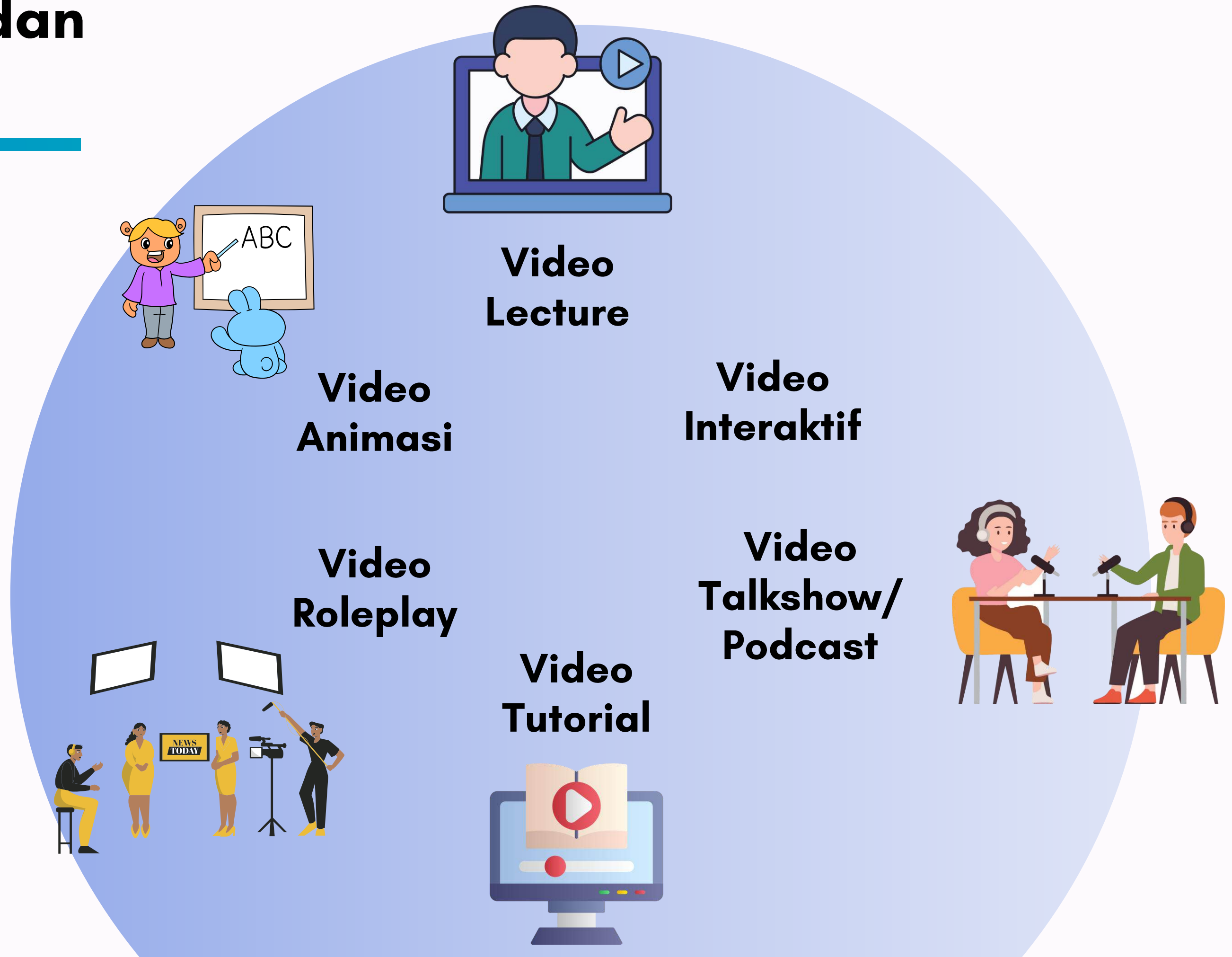
Pembuatan Konten MOOC dan Micro Learning



Pembuatan konten pembelajaran dilakukan melalui proses kolaboratif yang melibatkan berbagai unit kerja GIA Corpu.

Konten MOOC dan Micro Learning

MOOC dan Micro Learning di GIA Corpu disajikan melalui berbagai jenis konten yang dirancang untuk memenuhi tujuan dan kebutuhan pembelajaran yang beragam.



Penjaminan Mutu, Menjamin Pelatihan Berkualitas



GIACorpu
Government Internal Audit
Corporate University

Penjaminan Mutu dilakukan baik oleh internal maupun eksternal menggunakan standar ISO

- Dalam rangka menjaga mutu pembelajaran, pelatihan diselenggarakan mengacu pada **Quality Procedure (QP)**.
- Mutu pembelajaran diawasi oleh Tim **Audit Mutu Internal (AMI)** GIA Corpu.



Mutu pembelajaran GIA Corpu mendapatkan **pengakuan dari berbagai institusi**, antara lain:

- **Lembaga Pelatihan Terakreditasi A untuk Pelatihan Fungsional, Teknis Substantif, Pelatihan Dasar, PKP dan PKA dari LAN**
- **Lembaga Terakreditasi A untuk penyelenggaraan Pelatihan Sertifikasi PB dari LKPP**
- **ISO 9001:2015 tentang Standar Manajemen Mutu**
- **ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan**
- **Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dari Kementerian PAN RB**

PENGHARGAAN



Pada November 2025, GIA Corpu memperoleh penghargaan:

- **Corporate University Berdampak** (Kategori KL)
- **Lembaga Pelatihan Berprestasi** Terbaik II (Kategori Lembaga Penyelenggara Pelatihan Pemerintah Pusat)





***"Innovation Starts Here —
Where Learning Becomes Transformation."***

Government Internal Audit Corporate University

Pengembangan AI Pengawasan

Login



SAKURA

Sign In

Sign in to explore all application features.

Username

Password



☐ Remember me

Sign In

Smart Advance Knowledge Management & Understanding Reference Assistance

- ★ Mendukung transformasi digital pengawasan BPKP
- ★ Mempercepat akses informasi dan analisis awal
- ★ Berbasis AI on-premise yang menjaga kerahasiaan data



Pengembangan AI berbasis pengetahuan internal BPKP untuk membantu auditor:

1) Aplikasi Gen AI :

1. Menelusuri dan memanfaatkan data hasil pengawasan.
2. Menemukan pedoman atau regulasi yang relevan.
3. Menyusun analisis awal berbasis dokumen.

2) Knowledge Management System berbasis AI yang memanfaatkan:

1. Pencarian semantik.
2. Natural Language Processing (NLP).
3. Document understanding dan terintegrasi dengan berbagai aplikasi pendukung pengawasan BPKP.

Transformasi Digital Pengawasan

AI mendorong transformasi pengawasan. IIA dan INTOSAI menekankan pentingnya data analytics dan machine learning untuk pengawasan publik yang adaptif dan bernilai tambah. BPKP mengembangkan SAKURA sebagai asisten digital pengawasan.

Integrasi

Integrasi dengan Ekosistem Aplikasi BPKP:

- ★ Regulasi terkait pengawasan yang dikelola dalam Aplikasi JDIH BPKP
- ★ Pedoman audit/pengawasan yang dihasilkan BPKP dan dikelola dalam Aplikasi e-TOP
- ★ Data hasil pengawasan BPKP dalam Aplikasi SIMA

Layanan AI

SAKURA berbeda dari aplikasi AI umumnya karena dijalankan dengan GPU on-premise di BPKP. Seluruh data pengawasan dikuasai BPKP, tanpa keluar ke pihak lain atau cloud publik.

Manfaat

- ★ Efisiensi: Waktu penelusuran dokumen, analisis awal, dan pencarian regulasi.
- ★ Kualitas: Program kerja, langkah kerja, dan penyusunan risiko lebih seragam dan sesuai dengan pedoman BPKP
- ★ Knowledge Management: Temuan, rekomendasi, dan FAQ terakumulasi secara kelembagaan yang terus berkembang

Pengendalian Risiko

- ★ Tidak menyusun LHP/SHP: Mencegah bias & halusinasi seperti pada Gen AI umumnya.
- ★ Anonimisasi Identitas Sensitif: Nama, instansi, lokus di-blur untuk menjaga kerahasiaan.
- ★ Fokus AI mendukung auditor dalam mempercepat proses analisis, bukan menggantikan judgement.

Konsekuensi Risiko

- ★ Informasi hasil pengawasan bersifat rahasia, namun substansi temuan tetap dibutuhkan untuk eksplorasi audit, pedoman, dan analisis pola penyimpangan.

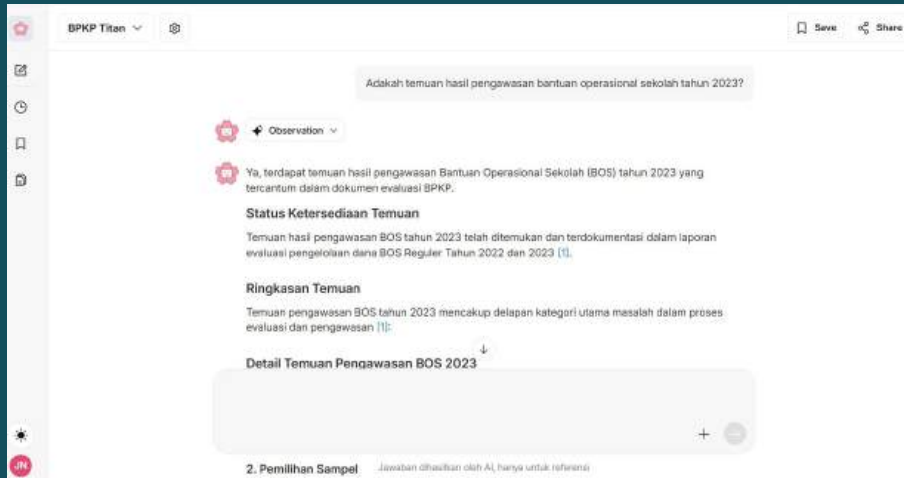
Risiko Laporan

- ★ Laporan harus berbasis fakta & pengujian lapangan.

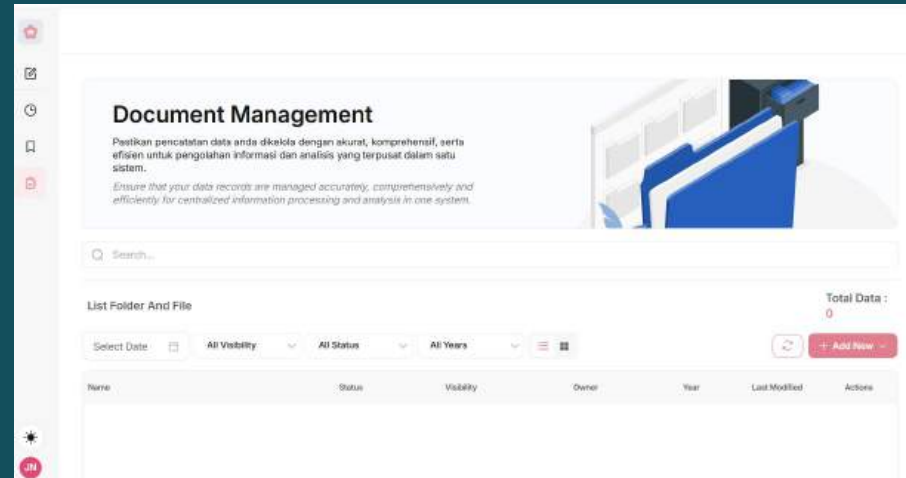
Risiko Lain

- ★ Keamanan & integritas sistem: Kontrol akses on-premise di bawah kendali BPKP.

Layout SAKURA



Chatbot



Document Management

“SAKURA MEMPERKUAT EFEKTIVITAS DAN
KUALITAS PENGAWASAN,
TANPA MENGGANTIKAN PROFESIONALISME,
SKEPTISISME, DAN PERAN AUDITOR”

Terima Kasih



PENINGKATAN PEMAHAMAN dan OPTIMALISASI PENYAMPAIAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA KEPADA MASYARAKAT INDONESIA MELALUI E-LEARNING

Oleh:

VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Pentingnya mengetahui Hak Konstitusional Warga Negara (HKWN)

01

Konsep Konstitusi sebagai Pelindung: UUD NRI 1945 adalah jaminan tertinggi negara terhadap hak dasar individu.

02

Kebutuhan Masyarakat Memahami HKWN

Mencegah Pelanggaran :

- Mengenali HKWN menolak tindakan yang melanggar hak dasar (HKWN).

Menuntut Keadilan :

- Mengetahui Jalur Hukum ketika HKWN dilanggar oleh Kebijakan atau Undang-Undang.

Partisipasi Aktif:

- Berperan serta dalam mensosialisasikan HKWN serta membantu advokasi pelanggaran HKWN melalui jalur Mahkamah Konstitusi

03

Tantangan : Sulitnya akses informasi untuk memahami HKWN dan Memitigasi potensi pelanggaran serta menanggulangi pelanggaran HKWN

Jurang Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

Warga Masyarakat masih banyak yang belum mengetahui hak-hak Warga Negara yang dijamin dan dilindungi oleh Negara ada dalam UUD 1945.

Warga Masyarakat masih banyak yang belum mengetahui apa saja hak-hak warga negara yang dijamin dan dilindungi dalam UUD 1945.

Warga Masyarakat masih banyak sulit mengidentifikasi, kapan hak konstitusionalnya dilanggar oleh suatu undang-undang.

Jurang Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

Kurangnya pemahaman upaya memperjuangkan hak-hak setiap Warga Negara yang dijamin dalam UUD 1945 yang dilanggar oleh berlakunya suatu undang-undang.

Kurangnya pengetahuan cara mengakses Putusan MK dan Prosedur / tata cara Pengujian Undang-Undang yang sering dinilai rumit, sulit dan Mahal

Solusi:

Membangun Ekosistem E-Learning dapat menjadi jembatan kesenjangan ini.

The background image shows a large, ornate legislative chamber, likely the Indonesian House of Representatives (DPR). It features a semi-circular arrangement of desks and chairs for members of parliament. A large yellow banner is superimposed over the top half of the image, containing the title in white text. In the upper right corner, a small inset shows a man in a suit speaking at a podium.

SASARAN DAN TUJUAN E-LEARNING

Sasaran Utama :

Seluruh Lapisan Masyarakat Indonesia (Pelajar, Mahasiswa, Pekerja, Aktivis, Aparatur Desa/Negara, Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal serta Masyarakat Pesisir, di wilayah 3T

A photograph of the facade of the Mahkamah Konstitusi (Constitutional Court) building, featuring large columns and the name of the institution in raised letters.

Tujuan Program:

1

MENINGKATKAN LITERASI HUKUM KONSTITUSI :

Membuat Materi Konstitusi lebih mudah dipahami dan relevan.

2

Membentuk Kesadaran Kritis :

Memungkinkan masyarakat menganalisis apakah suatu kebijakan/norma dalam UU berpotensi atau melanggar hak mereka secara langsung

3

Membuka Akses Informasi MK :

Mempermudah akses terhadap prosedur/tata cara pengujian Undang-Undang

Manfaat Kegunaan E-Learning Bagi Masyarakat

Manfaat bagi Warga Masyarakat:

1

Peningkatan Rasa Aman karena Tahu bahwa dirinya mempunyai hak-hak yang dilindungi oleh Konstitusi sebagai Hukum Tertinggi

2

Kemampuan Advokasi Diri karena mampu menyuarakan keberatan secara terstruktur dan legal serta konstitusional

3

Pengembangan diri karena dapat mengakses materi pendidikan bermutu tanpa batasan biaya/geografis.



Manfaat Kegunaan E-Learning Bagi Masyarakat

Kegunaan bagi Warga Masyarakat

1

Memahami alur pengajuan upaya “keberatan” terhadap adanya pelanggaran atas HKWN

2

Menggunakan Pengetahuan Konstitusi dalam Bermasyarakat dan bernegara



Efektivitas E-Learning Dalam Menjangkau Indonesia

01

Menghilangkan Batas Fisik dapat mengatasi tantangan jarak dan waktu dalam mendistribusikan Informasi terkait HKWN

02

Biaya Rendah, Dampak Tinggi, karena mengurangi biaya pelatihan offline yang mahal dan digantikan dengan platform yang dapat dijangkau jutaan orang

03

Fleksibilitas Waktu, memungkinkan pembelajaran Mandiri di waktu luang sesuai dengan ritme hidup masyarakat di berbagai profesi dan daerah.

E-Learning adalah Wujud dari “Keadilan Konstitusional yang Merata” bagi seluruh warga Indonesia



Manfaat Kegunaan E-Learning Bagi Masyarakat

Metode Pembelajaran yang menarik dan mudah dipahami

1

Microlearning dan Visualisasi, yakni metode pembelajaran dengan menggunakan video pendek animasi yang menarik, infografis, ringkasan visual untuk menjelaskan HKWN atau Pasal-Pasal dalam UUD yang Kompleks

2

Studi Kasus Populer, yakni metode analisis Putusan MK yang berdampak langsung kepada Kehidupan masyarakat, Masyarakat Adat, Masyarakat Pesisir dan Komunitas Lokal, yang disajikan dalam bahasa yang mudah dimengerti masyarakat awam.

3

Forum Interaktif, yakni metode menggunakan Fitur Question & Answer (Q & A), atau live chat dengan tenaga ahli MK untuk menerima konsultan menjembatani pertanyaan mendasar dari Warga Masyarakat



Tantangan Implementasi E-Learning

TANTANGAN TEKNIS

1

Belum adanya Jaringan Internet atau Jaringan Internet yang tidak stabil dan ketersediaan perangkat digital yang terbatas. Sering menjadi tantangan di banyak daerah, terutama 3T.

Untuk menghadapi tantangan teknis tersebut, perlu ada mode Offline dan Konten Light dengan menyediakan materi yang dapat diunduh (PDF, Video resolusi rendah, Podcast audio) untuk bisa dipelajari tanpa koneksi. Kolaborasi dengan pemerintah daerah untuk penyediaan hotspot komunitas

Tantangan Implementasi E-Learning

TANTANGAN TEKNIS

Literasi digital bagi sebagian besar masyarakat, terutama lansia atau di pedalaman, belum terbiasa menggunakan aplikasi E-Learning (perlu adanya modul pengenalan platform secara visual (Video Tutorial Singkat))

2





Tantangan Implementasi E-Learning

TANTANGAN NON TEKNIS

1

Minat Belajar yang minim, Materi hukum sering dianggap membosankan, berat, dan tidak relevan, sehingga mengurangi dorongan untuk belajar mandiri.

Untuk menghadapi tantangan tersebut, menggunakan moden Gamifikasi dan Storytelling dengan mengubah materi menjadi permainan, kuis berhadiah, atau narasi nyata (studi kasus) yang dramatis dan menarik, dengan menghubungkan pasal-pasal konstitusi serta isu viral atau masalah sehari-hari.

Tantangan Implementasi E-Learning

TANTANGAN NON TEKNIS

Verifikasi dan Kredibilitas harus terjamin, karena saat ini Indonesia masuk dalam dunia digital yang penuh Hoaks.

Branding Institusional yang Kuat, dimana setiap konten harus jelas berlogo dan diverifikasi oleh Pusdik MK dan menyediakan jalur tanya jawab resmi untuk mengkonfirmasi setiap informasi yang ditayangkan.

2





Terimakasih

Presentasi oleh :

VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Peran Strategis Wartawan dan Media dalam Memperkuat Transparansi dan Akuntabilitas Mahkamah Konstitusi pada Era Digital

Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.





Era disrupsi informasi dan kompleksitas hukum, peran jurnalisme konstitusional menjadi semakin **Strategis**.

Tugas dan Fungsi MK sesuai UUD 1945

1

Pengujian
Undang-Undang
terhadap
UUD 1945

2

Sengketa
Kewenangan
Lembaga
Negara (SKLN)

3

Pembubaran
Partai Politik

4

Perselisihan
Hasil
Pemilu/Pilkada
(Electoral
Justice)

5

Impeachment





Peran Konstitusional Mahkamah Konstitusi

- Penjaga konstitusi,
- Penafsir norma dasar negara
- Pengawal hak-hak konstitusional warga negara berdasarkan amanat UUD 1945.
- Keputusan-keputusan MK memiliki dampak luas terhadap kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat, fundamental.

Peran Fundamental Wartawan dan Media dalam Konteks Mahkamah Konstitusi



Media sebagai penyampai informasi



Media Sebagai Pilar Transparansi dan Kontrol Sosial (Constitutional Watchdog):

- Pengawasan Proses Persidangan Konstitusi
- Peliputan Independen
- Pencegahan Penyelewengan



Edukasi dan Literasi Hukum Konstitusi Publik:

- Penerjemah Bahasa Hukum
- Peningkatan Kesadaran Konstitusional
- Membangun Diskursus Publik



Pembentuk Opini Publik dan Katalis Kedaulatan Konstitusi:

- Mendorong Akuntabilitas Konstitusional
- Stimulus Reformasi Kebijakan dan Hukum
- Mengadvokasi Hak-Hak Konstitusional



Tantangan dan Dinamika Peran Wartawan dan Media dalam Peliputan Mahkamah Konstitusi di Era Digital



Kompleksitas Materi Hukum
Konstitusi dan Risiko Disinformasi:

- Interpretasi Normatif yang Mendalam
- Potensi Kesalahpahaman menyederhanakan isu konstitusional secara berlebihan atau salah menginterpretasikan implikasi hukum dari suatu putusan,
- "Trial by the Press" dalam Konteks Konstitusi: Pembentukan opini publik prematur yang bias atau parsial





Prospek ke Depan untuk Sinergi Konstruktif antara Mahkamah Konstitusi dan Media

Peningkatan Kapasitas dan Profesionalisme Jurnalisme Konstitusi

- Pelatihan Jurnalistik Hukum Konstitusi
- Kerja Sama Akademisi dan Media
- Penguatan Redaksi Hukum

Strategi Komunikasi Proaktif Mahkamah Konstitusi

- Keterbukaan Informasi Digital
- Juru Bicara yang Kompeten dan Aksesibel
- Briefing Media Reguler
- Penyediaan Data dan Dokumen yang Jelas

Penguatan Etika dan Verifikasi dalam Peliputan Konstitusi

- Implementasi Kode Etik Jurnalistik
- Kolaborasi Melawan Disinformasi
- Pendidikan Publik Bersama





Terima Kasih!

mkri.id



officialMKRI



Mahkamah Konstitusi RI



Mahkamahkonstitusi





mkri ai



ai.mkri.i
d





mkri ai

MKRI AI adalah Generative AI milik Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) yang berfungsi sebagai sarana pelayanan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hak konstitusionalnya. Dibekali fitur yang sangat lengkap, mulai dari pencarian, analisis, peringkasan, perbandingan, prediksi, hingga penyusunan resume risiko, dampak, dan drafting.

MKRI dirancang untuk membantu pengguna memperoleh informasi dan layanan dengan lebih cepat dan tepat. Saat ini MKRI AI telah berada pada fase siap dipublikasikan, dengan sebagian besar fitur berjalan dengan baik meskipun beberapa masih memerlukan pengembangan tambahan khususnya terkait waktu respons. Agar kualitas jawabannya semakin optimal, MKRI AI tetap perlu dilatih dan terus diperkaya melalui proses pembelajaran berkelanjutan. Tugas fine-tuning ini menjadi tanggung jawab bersama demi mewujudkan MKRI AI yang semakin andal dan bermanfaat.





mkriai

1



PENCARIAN KONSTITUSI

Mencari berbagai file putusan yang dimiliki MKRI yang telah dikelompokkan berdasarkan kategori tertentu

2



KONSULTASI KONSTITUSI

Sarana konsultasi mengenai berbagai isu konstitusi di Indonesia

3



REKOMENDASI KONSTITUSI

Memberikan rekomendasi analisis terhadap suatu topik berdasarkan sudut pandang konstitusional yang berlaku di Indonesia

Fitur MKRI AI

Bagian ini menjelaskan kapabilitas inti yang membentuk fungsi utama aplikasi dalam mengolah, menganalisis, dan menyajikan informasi konstitusional secara terstruktur. Fitur-fitur yang disajikan memberikan gambaran menyeluruh mengenai nilai operasional aplikasi dalam mendukung proses penelusuran dan pengambilan keputusan berbasis data.

4 ANALISA DAMPAK DAN RESIKO KONSTITUSI

Menganalisa dampak dan resiko terkait putusan



5 PENELUSURAN YURISPUDENSI KONSTITUSI

Menyajikan historical sebuah putusan panjang



6 RINGKASAN KONSTITUSI

Menganalisa dan memberikan rangkuman terhadap dokumen putusan



7 PREDIKSI PUTUSAN KONSTITUSI

Memberikan prediksi sebuah putusan



8 PERPUSTAKAAN PERADILAN KONSTITUSI

Menyajikan informasi dan perbandingan dari data library



9 DRAFT PUTUSAN KONSTITUSI

Menyajikan Draft Sebuah putusan



mkri ai

mkri ai

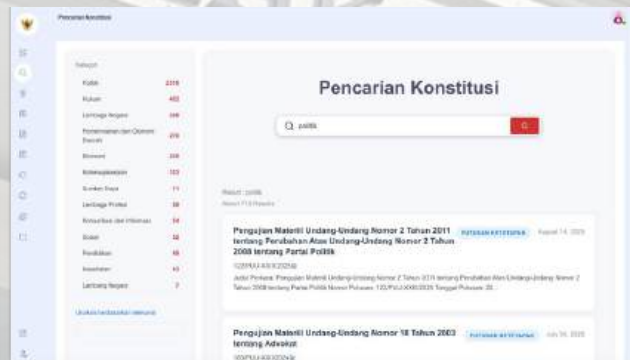
ai.mkri.id



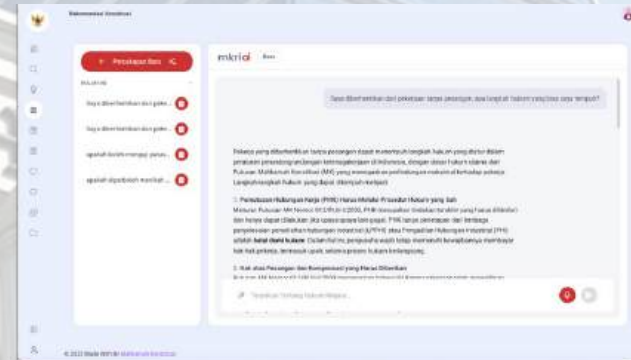
mkri ai

Tampilan Fitur

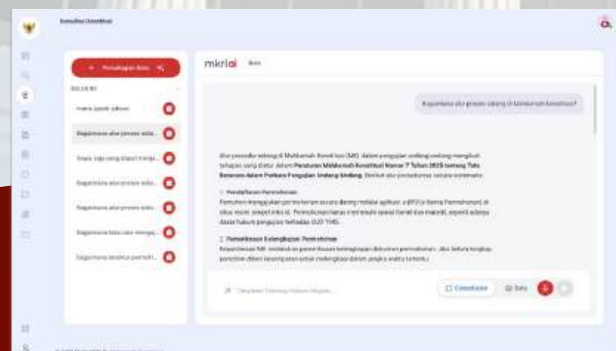
Pencarian Konstitusi



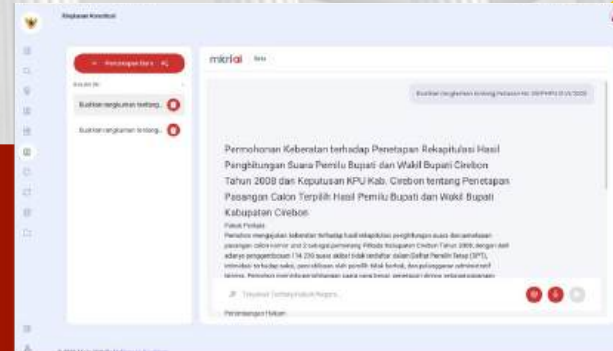
Rekomendasi Konstitusi



Konsultasi Konstitusi



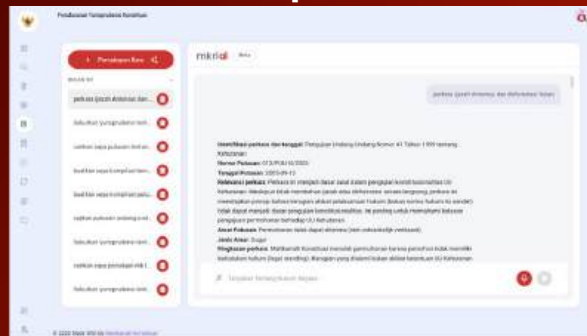
Ringkasan Konstitusi



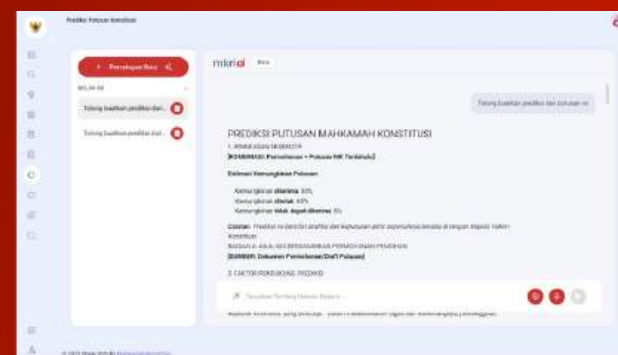


mkri ai

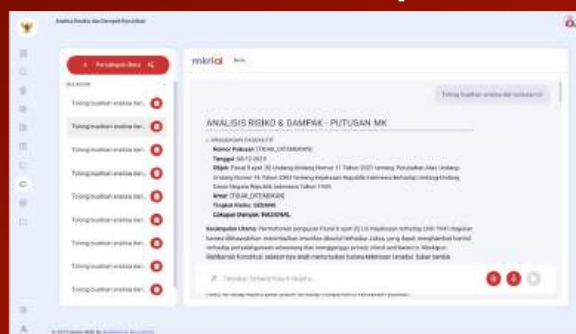
Penelusuran Yurisprudensi Konstitusi



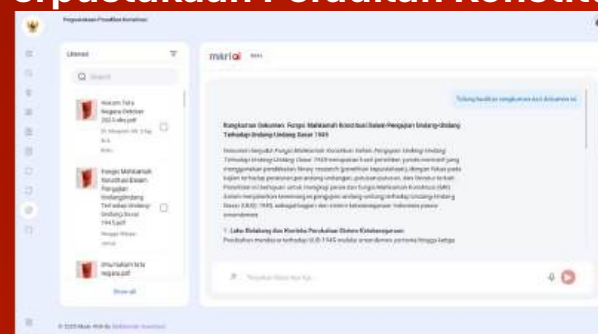
Prediksi Putusan Konstitusi



Analisa Resiko dan Dampak Konstitusi



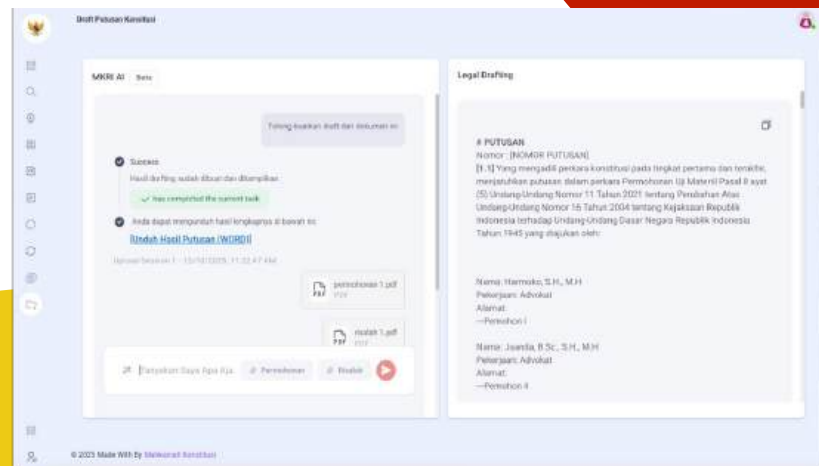
Perpustakaan Peradilan Konstitusi



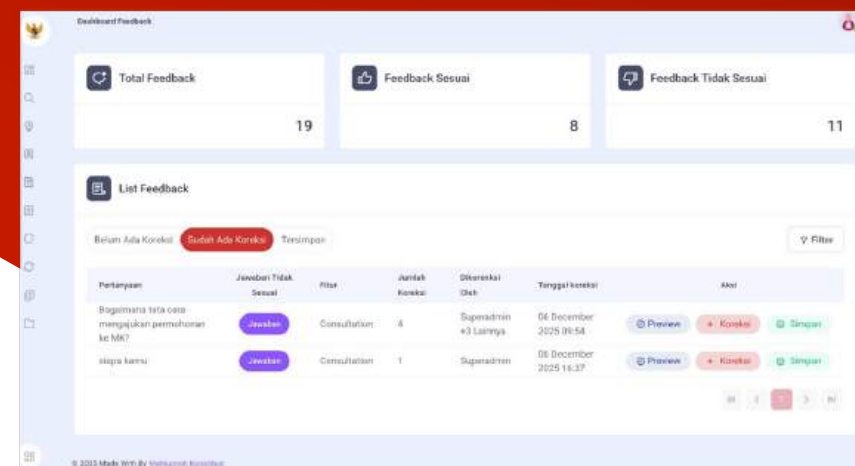


mkri ai

Draft Putusan Konstitusi



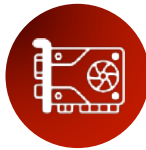
Dashboard Feedback





mkri ai

Implementasi Infrastruktur dan Keamanan



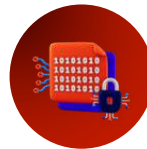
GPU

Mempercepat proses komputasi AI



PII Guard

Perlindungan dari kebocoran data pribadi



Penetration Testing

Upaya Perlindungan keamanan sistem



Fine-Tuning AI

Peningkatan akurasi dan keamanan model



VAPT

Identifikasi dini dan pemetaan kerentanan



mkri ai



MAHKAMAH KONSTITUSI

TERIMA KASIH



Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Template Presentation



mklc.mkri.id



Tujuan MKLC

Overview

Fitur-Fitur MKRI

Petunjuk Fitur dan Penggunaan.

Timeline Project

Rencana Agenda Selanjutnya.



Visi dan Misi Mahkamah Konstitusi



Visi

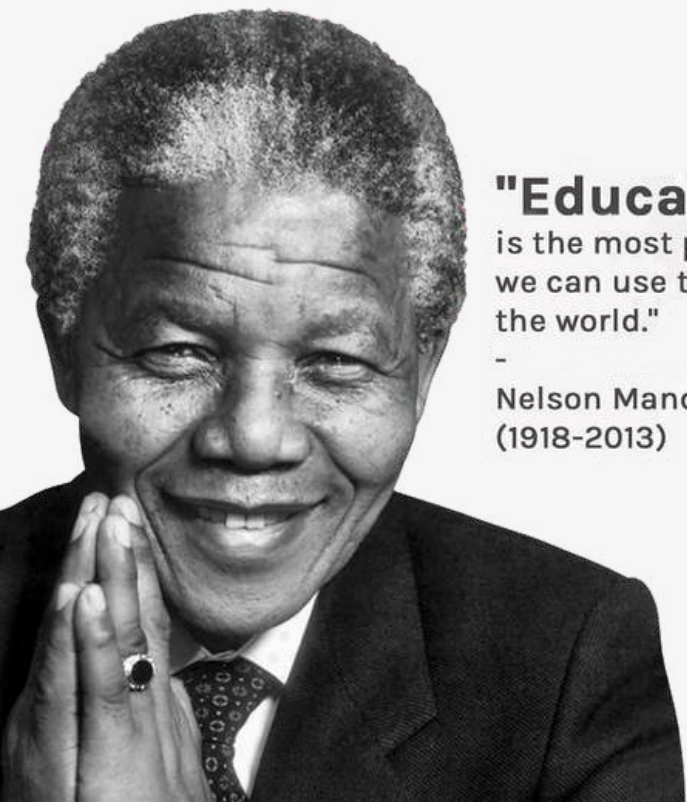
Menegakkan Konstitusi Melalui
Peradilan yang Modern dan Terpercaya

Misi

- 1) Memperkuat integritas peradilan konstitusi.
- 2) Meningkatkan kesadaran berkonstitusi warga negara dan penyelenggara negara.
- 3) Meningkatkan kualitas putusan.

Target Peserta

Meningkatkan Kesadaran Berkonstitusi Warga Negara dan Penyelenggara Negara



"Education

is the most powerful weapon
we can use to change
the world."

-
Nelson Mandela
(1918-2013)

Melalui MKLC, akses terhadap peserta
pembelajaran akan lebih mudah

Ini adalah awal

Peluncuran **Mahkamah Konstitusi Learning Center (MKLC)** adalah awal dari akses terbuka terhadap upaya peningkatan kesadaran berkonstitusi masyarakat dan fondasi kokoh bagi perwujudan supremasi konstitusi yang berkelanjutan di Indonesia.



Secara umum, MKLC didirikan dengan harapan untuk menjadi *center of excellence* dalam pengembangan ilmu, pengetahuan, dan pemahaman tentang konstitusi dan hukum tata negara di Indonesia.

Peningkatan Kesadaran Berkonstitusi Masyarakat

Sarana Pendidikan Hukum Konstitusi

Aksesibilitas dan Diseminasi Informasi

Penguatan Kelembagaan dan Jaringan

Program Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi



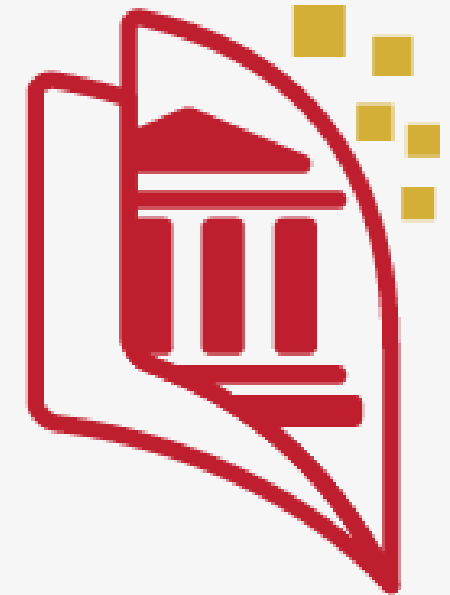
Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

- Target Seluruh Warga Negara
- Tujuan memberikan wawasan mendalam mengenai hak-hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam konstitusi, serta memberikan pemahaman mengenai Pancasila, Konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi.



Bimbingan Teknis Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

- Target Akademisi dan Organisasi Profesi di Bidang Hukum
- Tujuan memberikan pemahaman mendalam mengenai Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi secara praktis



Program Pendidikan Lainnya

- Target Seluruh Warga Negara
- Program pendidikan lain seperti webinar, sosialisasi, pelatihan dll.



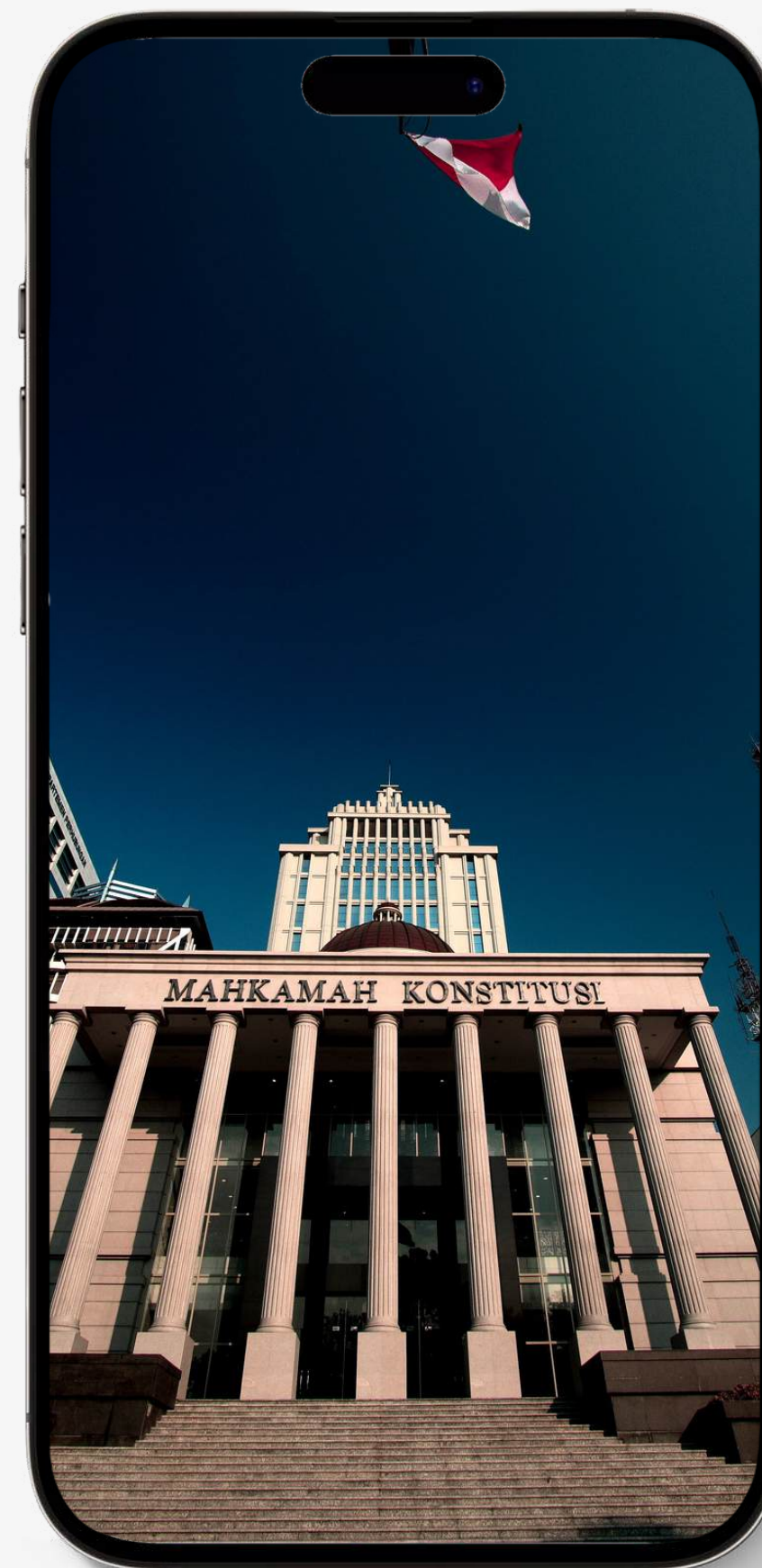
Rencana Aksi



Melakukan penyebaran informasi serta sosialisasi media pembelajaran Mahkamah Konstitusi Learning Center (MKLC) menggunakan media sosial kepada seluruh warga negara



Melakukan kerjasama kepada *stakeholder* untuk penyelenggaraan pendidikan menggunakan MKLC





RENCANA AKSI

KERJASAMA INTERNAL ORGANISASI

Kepaniteraan

Melakukan kerjasama penyusunan konten pembelajaran yang menarik dan interaktif di MKLC

Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan

Melakukan kerjasama penyelenggaraan diseminasi putusan Mahkamah Konstitusi melalui MKLC

Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi

Melakukan kerjasama penyelenggaraan pengembangan kompetensi pegawai berbasis E-Learning melalui MKLC dan pengembangan Corporate University (Corpu)

Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi

Melakukan pengembangan media pembelajaran MKLC, melakukan pengembangan mobile MKLC, dan mengintegrasikan MKRI AI dengan MKLC

Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol

Melakukan kerjasama penyelenggaraan penyebaran informasi Mahkamah Konstitusi (webinar dan sosialisasi) melalui MKLC dan melakukan penyebaran informasi kepada seluruh masyarakat melalui media sosial

Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara

Melakukan kerjasama pembuatan Knowledge Management System (KMS) terintegrasi dengan MKLC

Pembentukan Mahkamah Konstitusi Corporate University

Sistem pembelajaran strategis dan terintegrasi yang bertujuan mendukung visi dan strategi Mahkamah Konstitusi melalui pengembangan kompetensi SDM secara berkelanjutan

Integrasi Pembelajaran dengan Strategi Organisasi

Corpu tidak hanya fokus pada pelatihan formalitas, tetapi menghubungkan semua kegiatan pembelajaran dengan visi strategis Mahkamah Konstitusi

Pengembangan Kompetensi yang Terintegrasi

Mengembangkan pengetahuan (*knowledge*), keahlian (*skill*), dan integritas (*attitude*) SDM organisasi secara berkelanjutan dan terpadu

Ekosistem Pembelajaran yang Luas

Berupaya menciptakan *Learning Organization* yang memanfaatkan MKLC agar pembelajaran dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja.



Mahkamah Konstitusi Corporate University



Tahapan Strategis Pembentukan Corporate University

Diagnosis Awal : Penetapan Arah Strategis Pembelajaran

**Pembangunan Sistem Pembelajaran Terintegrasi : Pengembangan
Manajemen Pengetahuan**

Penguatan Kelembagaan Corpu : Pembentukan Struktur Corpu

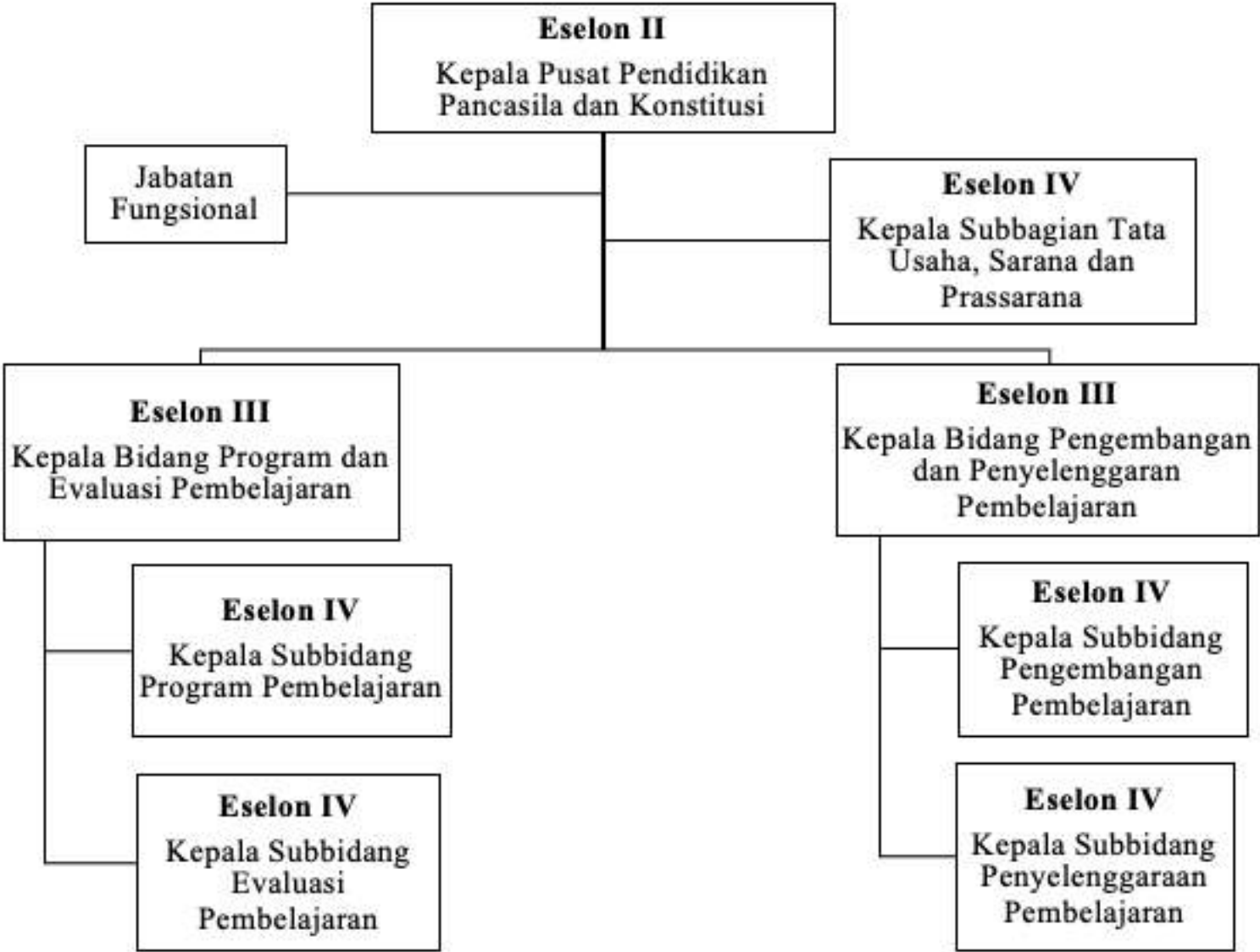
Pengembangan dan Implementasi Learning Management System (LMS)

Evaluasi dan Dampak Strategis

USULAN STRUKTUR ORGANISASI
PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI
SEBAGAI CORPORATE UNIVERSITY



USULAN STRUKTUR ORGANISASI
PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI
SEBAGAI CORPORATE UNIVERSITY





Terima Kasih

MKLC: Mencerdaskan Bangsa, Memperkuat Pilar Negara.



PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 1552/DK.06.00/12/2025
Lampiran : 3 (tiga) lembar
Perihal : **Permohonan menjadi Narasumber
dan Moderator Kegiatan**

09 Desember 2025

Yth. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
Bapak Pan Mohamad Faiz K. W., S.H., M.C.L., Ph.D.
di Jakarta

Dengan hormat, dalam rangka peningkatan pemahaman terhadap Pancasila, Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Berbasis E-Learning** yang akan diselenggarakan pada hari Kamis s.d. Sabtu, 11 s.d. 13 Desember 2025 secara luring (*offline*) di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

Berkenaan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenannya untuk dapat menjadi serangkaian kegiatan, pada:

Hari, Tanggal	Pukul	Agenda Kegiatan	Tempat
Jumat, 12 Desember 2025	09.00-11.00 WIB	Narasumber Sesi II: Peran Jurnalis dalam Penanganan Perkara di Mahkamah Konstitusi	Aula Grha Konstitusi 3
	14.30-17.30 WIB	Moderator Sesi III: Peran Wartawan sebagai Jurnalis dalam Menjaga Hak Konstitusionalitas dan Demokrasi melalui Penyampaian Berita yang Menjaga Etika dan independensi di Mahkamah Konstitusi	Aula Grha Konstitusi 3

Kami mengharapkan bahan paparan yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Kami telah menugaskan **Sdr. Edwin Aditya Irawan**, yang dapat dihubungi melalui kontak WhatsApp **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan perkenannya, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Mundiri

Tembusan Yth.:
Bapak Sekretaris Jenderal.



Digital Signature
mk839234683251209040848

Lampiran Surat

Nomor : 1552/DK.06.00/12/2025

Tanggal : 09 Desember 2025

Jadwal Kegiatan
Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Berbasis *E-Learning*

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER	LOKASI
PERTAMA				
Kamis, 11 Desember 2025	10.00-12.00	<i>Check in</i> dan Registrasi Peserta + <i>Coffee Break</i>	Panitia	Lobby Grha Konstitusi 2
	12.00-13.00	ISHOMA		
	13.00-13.30	Penjelasan Teknis	Kapusdik MK	Aula Grha Konstitusi 3
	13.30-14.00	Penjelasan Simultan dan <i>Pre Test</i>	Panitia	Aula Grha Konstitusi 3
	14.00-15.30	Sesi I : Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila melalui <i>Experiential Learning</i>	Panitia	<i>Outdoor</i>
	15.30-16.00	<i>Coffee Break</i>		
	16.00-18.00	Lanjutan Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila melalui <i>Experiential Learning</i>	Panitia	<i>Outdoor</i>
	18.00-19.00	ISHOMA		
KEDUA				
Jumat, 12 Desember 2025	06.00-07.00	Senam pagi		
	07.00-09.00	Makan Pagi		
	09.00-11.00	Sesi II : Peran Jurnalis dalam Penanganan Perkara di Mahkamah Konstitusi	Narasumber: Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D. Moderator: Dr. Andi Hakim, S.IP., M.A.	Aula Grha Konstitusi 3



	11.00 – 13.30	ISHOMA	Panitia	
	13.30 – 14.30	Pembukaan dan Launching MKLC: 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Hymne Mahkamah Konstitusi 3. Laporan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 4. Penayangan VT MKLC 5. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi 6. Mars Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa 8. Foto Bersama	Sekjen MK Ketua MK	Aula Grha Konstitusi 3
	14.30 – 17.30	Sesi III : Peran Wartawan sebagai Jurnalis dalam Menjaga Hak Konstitusionalitas dan Demokrasi melalui Penyampaian Berita yang Menjaga Etika dan independensi di Mahkamah Konstitusi	Narasumber: YM. Dr. Suhartoyo, S.H., M.H dan YM. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H Moderator: Pan M. Faiz	Aula Grha Konstitusi 3
	14.30 – 16.30	FGD Optimalisasi Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara 1. Paparan Narasumber 2. Diskusi	Pimpinan FGD Sekretaris Jenderal MK & Nanang Subekti Narasumber: 1. BPK 2. Ketua Tim DJA 3. Analisis DJA 4. Ketua APHAMK 5. Advokat MK Moderator: Santhy Kustrihardiani Peserta: Eselon II MK Pegawai MK	Ruang Kelas
		FGD Strategi Peningkatan Pemahaman Hak	Pimpinan FGD Sekretaris Jenderal MK & Nanang Subekti	



		Konstitusional Warga Negara melalui <i>E-Learning</i> 1. Paparan Narasumber 2. Diskusi	Narasumber: 1. Direktur Bappenas 2. Koordinator Bappenas 3. Kapusdiklatwas BPKP 4. Kapusinformas BPKP Moderator: Santhy Kustrihardiani Peserta: Eselon II MK Pegawai MK	
	16.30-19.30	ISHOMA	Panitia	
	19.30-21.30	Pentas Seni Musik	Panitia	Grha Konstitusi 7
KETIGA				
Sabtu, 13 Desember 2025	07.00-08.00	Penutupan: 1. Kesan dan Pesan Perwakilan Peserta 2. Sambutan dan Penutupan Kepala Pusdik Pancasila dan Konstitusi 3. Pembacaan Doa	Kapusdik MK	Aula Grha Konstitusi 3
	08.00-selesai	<i>Check out</i>	Panitia	





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 1541/DK.06.00/12/2025

09 Desember 2025

Lampiran : 3 (tiga) lembar

Perihal : Permohonan Membuka Kegiatan dan menjadi Narasumber

YM. Ketua Mahkamah Konstitusi

Bapak Dr. Suhartoyo, S.H., M.H.

di Jakarta

Dengan hormat, dalam rangka peningkatan pemahaman terhadap Pancasila, Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Berbasis E-Learning** yang akan diselenggarakan pada hari Kamis s.d. Sabtu, 11 s.d. 13 Desember 2025 secara luring (*offline*) di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Yang Mulia untuk dapat menghadiri serangkaian kegiatan, pada:

Hari,tanggal	Pukul	Agenda Kegiatan	Tempat
Jumat, 12 Desember 2025	13.30 – 14.30 WIB	Ceramah Kunci dan Membuka Kegiatan: Peluncuran Mahkamah Konstitusi <i>Learning Center</i> (MKLC)	Aula Grha 3 Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
	14.30 – 17.30 WIB	Narasumber PPHKWN dengan Wartawan Materi : Peran Wartawan sebagai Jurnalis dalam Menjaga Hak Konstitusionalitas dan Demokrasi melalui Penyampaian Berita yang Menjaga Etika dan Independensi di Mahkamah Konstitusi	

Kami telah menugaskan Sdr. Edwin Aditya Irawan, yang dapat dihubungi melalui kontak WhatsApp 085157929660, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan perkenan Yang Mulia, kami haturkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan



Digital Signature
mk-487668982251208064037

Lampiran Surat

Nomor : 1541/DK.06.00/12/2025

Tanggal : 09 Desember 2025

Jadwal Kegiatan

Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Berbasis E-Learning

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER	LOKASI
PERTAMA				
Kamis, 11 Desember 2025	10.00 – 12.00	Check in dan Registrasi Peserta + Coffe Break	Panitia	Lobby Grha Konstitusi 2
	12.00 – 13.00	Ishoma		
	13.00 – 13.30	Penjelasan Teknis	Kapusdik	Aula Grha Konstitusi 3
	13.30 – 14.00	Penjelasan Simultan + Pre test	Panitia	Aula Grha Konstitusi 3
	14.00 – 15.30	Sesi I : Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila melalui <i>Experiential Learning</i>	Panitia	Outdoor
	15.30 – 16.00	Coffee Break		
	16.00 – 18.00	Lanjutan Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila melalui <i>Experiential Learning</i>	Panitia	Outdoor
	18.00 – 19.00	Ishoma		
KEDUA				
Jumat, 12 Desember 2025	06.00 – 07.00	Senam pagi		
	07.00 – 09.00	Makan Pagi		
	09.00 – 11.00	Sesi II : Peran Jurnalis dalam Penanganan Perkara di Mahkamah Konstitusi	Narasumber: Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D. Moderator: Dr. Andi Hakim, S.IP., M.A.	Aula Grha Konstitusi 3
	11.00 – 13.30	Ishoma	Panitia	
	13.30 – 14.30	Peluncuran MKLC: 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya		Aula Grha Konstitusi 3



		2. Hymne Mahkamah Konstitusi 3. Laporan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 4. Penayangan VT MKLC 5. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi 6. Mars Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa 8. Foto Bersama	Sekjen MK Ketua MK	
	14.30 – 17.30	Sesi III : Peran Wartawan sebagai Jurnalis dalam Menjaga Hak Konstitusionalitas dan Demokrasi melalui Penyampaian Berita yang Menjaga Etika dan independensi di Mahkamah Konstitusi	Narasumber: YM. Dr. Suhartoyo, S.H., M.H YM. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H Moderator: Pan M. Faiz	Aula Grha Konstitusi 3
	14.00 – 16.00	FGD Optimalisasi Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara 1. Paparan Narasumber 2. Diskusi	Pimpinan FGD Sekjen MK Nanang Subekti Narasumber: 1. BPK 2. Ketua Tim DJA 3. Analis DJA 4. Ketua APHAMK 5. Advokat MK Moderator: Santhy Kustrihardiani Peserta: Eselon II MK Pegawai MK	Ruang Kelas
		FGD Strategi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara melalui e-learning 1. Paparan Narasumber 2. Diskusi	Pimpinan FGD Sekjen MK Nanang Subekti Narasumber: 1. Direktur Bappenas 2. Koordinator Bappenas 3. Kapusdiklatwas BPKP 4. Kapusinforwas BPKP	



			Moderator: Santhy Kustrihardiani Peserta: Eselon II MK Pegawai MK	
	16.00 – 19.30	Ishoma	Panitia	
	19.30 – 21.30	Pentas Seni Musik	Panitia	Grha Konstitusi 7
KEDUA				
Sabtu, 13 Desember 2025	07.00 – 08.00	Penutupan: 1. Kesan dan Pesan Perwakilan Peserta 2. Sambutan dan Penutupan Kepala Pusdik Pancasila dan Konstitusi 3. Pembacaan Doa	Kapusdik	Aula Grha Konstitusi 3
	08.00	Check out	Panitia	





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 1542/DK.06.00/12/2025
Lampiran : 3 (tiga) lembar
Perihal : Permohonan sebagai Narasumber

09 Desember 2025

YM. Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi

Bapak Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.

di Jakarta

Dengan hormat, dalam rangka peningkatan pemahaman terhadap Pancasila, Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Berbasis E-Learning** yang akan diselenggarakan pada hari Kamis s.d. Sabtu, 11 s.d. 13 Desember 2025 secara luring (*offline*) di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Yang Mulia untuk dapat menghadiri serangkaian kegiatan, pada:

Hari,tanggal	Pukul	Agenda Kegiatan	Tempat
Jumat, 12 Desember 2025	13.30 – 14.30 WIB	Peluncuran Mahkamah Konstitusi <i>Learning Center</i> (MKLC)	Aula Grha 3 Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
	14.30 – 17.30 WIB	Narasumber PPHKWN dengan Wartawan Materi : Peran Wartawan sebagai Jurnalis dalam Menjaga Hak Konstitusionalitas dan Demokrasi melalui Penyampaian Berita yang Menjaga Etika dan Independensi di Mahkamah Konstitusi	

Kami telah menugaskan Sdr. Edwin Aditya Irawan, yang dapat dihubungi melalui kontak WhatsApp 085157929660, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan perkenan Yang Mulia, kami haturkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan



Digital Signature
mk-1386138459251208070321

Lampiran Surat

Nomor : 1542/DK.06.00/12/2025

Tanggal : 09 Desember 2025

Jadwal Kegiatan

Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Berbasis E-Learning

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER	LOKASI
PERTAMA				
Kamis, 11 Desember 2025	10.00 – 12.00	<i>Check in</i> dan Registrasi Peserta + Coffe Break	Panitia	Lobby Grha Konstitusi 2
	12.00 – 13.00	Ishoma		
	13.00 – 13.30	Penjelasan Teknis	Kapusdik	Aula Grha Konstitusi 3
	13.30 – 14.00	Penjelasan Simultan + Pre test	Panitia	Aula Grha Konstitusi 3
	14.00 – 15.30	Sesi I : Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila melalui <i>Experiential Learning</i>	Panitia	<i>Outdoor</i>
	15.30 – 16.00	Coffee Break		
	16.00 – 18.00	Lanjutan Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila melalui <i>Experiential Learning</i>	Panitia	<i>Outdoor</i>
	18.00 – 19.00	Ishoma		
KEDUA				
Jumat, 12 Desember 2025	06.00 – 07.00	Senam pagi		
	07.00 – 09.00	Makan Pagi		
	09.00 – 11.00	Sesi II : Peran Jurnalis dalam Penanganan Perkara di Mahkamah Konstitusi	Narasumber: Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D. Moderator: Dr. Andi Hakim, S.IP., M.A.	Aula Grha Konstitusi 3
	11.00 – 13.30	Ishoma	Panitia	
	13.30 – 14.30	Peluncuran MKLC: 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya		Aula Grha Konstitusi 3



		2. Hymne Mahkamah Konstitusi 3. Laporan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 4. Penayangan VT MKLC 5. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi 6. Mars Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa 8. Foto Bersama	Sekjen MK Ketua MK	
	14.30 – 17.30	Sesi III : Peran Wartawan sebagai Jurnalis dalam Menjaga Hak Konstitusionalitas dan Demokrasi melalui Penyampaian Berita yang Menjaga Etika dan independensi di Mahkamah Konstitusi	Narasumber: YM. Dr. Suhartoyo, S.H., M.H YM. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H Moderator: Pan M. Faiz	Aula Grha Konstitusi 3
	14.00 – 16.00	FGD Optimalisasi Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara 1. Paparan Narasumber 2. Diskusi	Pimpinan FGD Sekjen MK Nanang Subekti Narasumber: 1. BPK 2. Ketua Tim DJA 3. Analis DJA 4. Ketua APHAMK 5. Advokat MK Moderator: Santhy Kustrihardiani Peserta: Eselon II MK Pegawai MK	Ruang Kelas
		FGD Strategi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara melalui e-learning 1. Paparan Narasumber 2. Diskusi	Pimpinan FGD Sekjen MK Nanang Subekti Narasumber: 1. Direktur Bappenas 2. Koordinator Bappenas 3. Kapusdiklatwas BPKP 4. Kapusinforwas BPKP	



			Moderator: Santhy Kustrihardiani Peserta: Eselon II MK Pegawai MK	
	16.00 – 19.30	Ishoma	Panitia	
	19.30 – 21.30	Pentas Seni Musik	Panitia	Grha Konstitusi 7
KETIGA				
Sabtu, 13 Desember 2025	07.00 – 08.00	Penutupan: 1. Kesan dan Pesan Perwakilan Peserta 2. Sambutan dan Penutupan Kepala Pusdik Pancasila dan Konstitusi 3. Pembacaan Doa	Kapusdik	Aula Grha Konstitusi 3
	08.00	Check out	Panitia	





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 1551/DK.06.00/12/2025
Lampiran : 3 (tiga) lembar
Perihal : **Permohonan menjadi Moderator**

09 Desember 2025

Yth. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Dalam Negeri
Bapak Dr. Andi Hakim, S.IP., M.A.
di Jakarta

Dengan hormat, dalam rangka peningkatan pemahaman terhadap Pancasila, Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Berbasis E-Learning** yang akan diselenggarakan pada hari Kamis s.d. Sabtu, 11 s.d. 13 Desember 2025 secara luring (*offline*) di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

Berkenaan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenannya untuk dapat menjadi moderator kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Berbasis *E-Learning*, pada:

hari, tanggal : Jumat, 12 Desember 2025
waktu : 09.00 s.d. 11.00 WIB
tempat : Aula Grha 3 Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Jl. Raya Puncak Km. 83 Cisarua, Bogor – Jawa Barat
agenda : (rincian jadwal terlampir)

Kami telah menugaskan **Sdr. Edwin Aditya Irawan**, yang dapat dihubungi melalui kontak WhatsApp **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Mundiri

Tembusan :
Yth. Bapak Kepala Biro Humas dan Protokol.



Digital Signature
mk-674927858251209035822

Lampiran Surat

Nomor : 1551/DK.06.00/12/2025

Tanggal : 09 Desember 2025

Jadwal Kegiatan

Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Berbasis E-Learning

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER	LOKASI
PERTAMA				
Kamis, 11 Desember 2025	10.00 – 12.00	Check in dan Registrasi Peserta + Coffee Break	Panitia	Lobby Grha Konstitusi 2
	12.00 – 13.00	Ishoma		
	13.00 – 13.30	Penjelasan Teknis	Kapusdik	Aula Grha Konstitusi 3
	13.30 – 14.00	Penjelasan Simultan + Pre test	Panitia	Aula Grha Konstitusi 3
	14.00 – 15.30	Sesi I : Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila melalui <i>Experiential Learning</i>	Panitia	<i>Outdoor</i>
	15.30 – 16.00	Coffee Break		
	16.00 – 18.00	Lanjutan Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila melalui <i>Experiential Learning</i>	Panitia	<i>Outdoor</i>
	18.00 – 19.00	Ishoma		
KEDUA				
Jumat, 12 Desember 2025	06.00 – 07.00	Senam pagi		
	07.00 – 09.00	Makan Pagi		
	09.00 – 11.00	Sesi II : Peran Jurnalis dalam Penanganan Perkara di Mahkamah Konstitusi	Narasumber: Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D. Moderator: Dr. Andi Hakim, S.IP., M.A.	Aula Grha Konstitusi 3
	11.00 – 13.30	Ishoma	Panitia	
	13.30 – 14.30	Peluncuran MKLC: 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Hymne Mahkamah Konstitusi		Aula Grha Konstitusi 3



		3. Laporan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 4. Penayangan VT MKLC 5. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi 6. Mars Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa 8. Foto Bersama	Sekjen MK Ketua MK	
	14.30 – 17.30	Sesi III : Peran Wartawan sebagai Jurnalis dalam Menjaga Hak Konstitusionalitas dan Demokrasi melalui Penyampaian Berita yang Menjaga Etika dan independensi di Mahkamah Konstitusi	Narasumber: YM. Dr. Suhartoyo, S.H., M.H YM. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H Moderator: Pan M. Faiz	Aula Grha Konstitusi 3
	14.00 – 16.00	FGD Optimalisasi Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara 1. Paparan Narasumber 2. Diskusi	Pimpinan FGD Nanang Subekti Narasumber: 1. BPK 2. Ketua Tim DJA 3. Analis DJA 4. Ketua APHAMK 5. Advokat MK Moderator: Santhy Kustrihardiani Peserta: Pegawai MK	Ruang Kelas
		FGD Strategi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara melalui e-learning 1. Paparan Narasumber 2. Diskusi	Pimpinan FGD Nanang Subekti Narasumber: 1. Direktur Bappenas 2. Koordinator Bappenas 3. Kapusdiklatwas BPKP 4. Kapusinforwas BPKP Moderator: Santhy Kustrihardiani Peserta: Pegawai MK	
	16.00 – 19.30	Ishoma	Panitia	
	19.30 – 21.30	Pentas Seni Musik	Panitia	Grha Konstitusi 7
KETIGA				
	07.00 – 08.00	Penutupan:	Kapusdik	Aula Grha Konstitusi 3



Sabtu, 13 Desember 2025		1. Kesan dan Pesan Perwakilan Peserta 2. Sambutan dan Penutupan Kepala Pusdik Pancasila dan Konstitusi 3. Pembacaan Doa		
	08.00	Check out	Panitia	





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 1521/DK.06.00/12/2025
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : **Permohonan Narasumber**

08 Desember 2025

Yth. Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
Bapak Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.
di tempat

Dengan hormat, dalam rangka peningkatan pemahaman terhadap Pancasila, Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Berbasis E-Learning** yang akan diselenggarakan pada hari Kamis s.d. Sabtu, 11 s.d. 13 Desember 2025 secara luring (*offline*) di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Bapak untuk dapat menghadiri kegiatan Peluncuran Mahkamah Konstitusi *Learning Center* (MKLC) dan menjadi narasumber *Focus Group Discussion* Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Berbasis *E-Learning* dimaksud, pada:

hari, tanggal : Jumat, 12 Desember 2025

waktu : Pukul 13.30 WIB s.d. selesai

tempat : Aula Grha 3 Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Jl. Raya Puncak Km. 83 Cisarua, Bogor – Jawa Barat

tema : Optimalisasi Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara.

Kami mengharapkan bahan paparan yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Kami telah menugaskan **Sdr. Edwin Aditya Irawan**, yang dapat dihubungi melalui kontak WhatsApp 085157929660, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud

Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal

Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Mundiri

Tembusan Yth.:

Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk1490778889251208011840

Lampiran Surat

Nomor : 1521/DK.06.00/12/2025

Tanggal : 08 Desember 2025

Jadwal Kegiatan

Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Berbasis E-Learning

Hari, Tanggal : Jumat, 12 Desember 2025

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi.

Jl. Raya Puncak Km. 83 Cisarua, Bogor – Jawa Barat

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER	LOKASI
Jumat, 12 Desember 2025	11.30-13.30	Makan Siang Bersama	Panitia	
	13.30-14.30	Pembukaan dan Launching MKLC: 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Hymne Mahkamah Konstitusi 3. Laporan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 4. Penayangan VT MKLC 5. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi 6. Mars Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa 8. Foto Bersama	Sekjen MK Ketua MK	Aula Grha Konstitusi 3
	14.30-16.30	FGD Tema 1 Optimalisasi Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Tema 2 Strategi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara melalui e-learning	Narasumber Tema 1: 1. BPK 2. DJA 3. APHAMK 4. Advokat MK Narasumber Tema 2: 1. Bappenas 2. BPKP	Ruang Kelas
	16.30-18.00	Istirahat		
	18.00-20.00	Makan Malam Bersama		





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 15207/2600/DK/12/2025
Lampiran : 5 (lima) berkas
Hal : Pemanggilan Peserta Kegiatan Peningkatan
Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

05 Desember 2025

Kepada Yth. Bapak/Ibu Pemimpin Redaksi Media Massa
(Daftar Nama Terlampir)
di Tempat

Dalam rangka peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Berbasis E-Learning** yang akan diselenggarakan pada tanggal 11 s.d. 13 Desember 2025 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk mengirimkan daftar nama sejumlah **1 (satu)** orang wartawan sebagai peserta kegiatan dimaksud. Kami mengharapkan daftar peserta sudah dapat kami terima paling lambat **tanggal 8 Desember 2025**. (Ketentuan kepesertaan, jadwal kegiatan, dan form daftar peserta terlampir).

Seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan menjadi beban Mahkamah Konstitusi. Kami telah menugaskan **Sdri. Tiara Agustina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **08121017130**, sebagai narahubung persiapan kegiatan.

Atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Mundiri

Tembusan Yth.:

1. Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Bapak Plt. Panitera Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk-1058122440251205114807

Lampiran I

Nomor : 15207/2600/DK/12/2025

Tanggal : 05 Desember 2025

DAFTAR UNDANGAN MEDIA MASSA

1. Antara TV
2. kompas.com
3. Harian Kompas
4. Tribunnews
5. IDN Times
6. Tirto
7. detik.com
8. Tempo
9. Kumparan
10. MNC portal
11. Republika
12. Forum Keadilan
13. Berita Satu
14. Media Indonesia
15. Liputan 6
16. Kata Data
17. merahputih.com
18. Hukum Online
19. TV One
20. Kompas TV
21. Metro TV
22. Garuda TV
23. Nusantara TV
24. RRI
25. Trijaya FM
26. SINPO TV
27. TVRI
28. Konstitusionalis TV
29. cnnindonesia.com
30. inilah.com



Lampiran II

Nomor : 15207/2600/DK/12/2025

Tanggal : 05 Desember 2025

**KETENTUAN KEPESERTAAN
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA
BERBASIS *E-LEARNING***

1. Kualifikasi Calon Peserta

- a. Peserta kegiatan sebanyak **30 (tiga puluh)** orang wartawan yang merupakan perwakilan dari organisasi media massa.
- b. Membawa Surat Tugas dari organisasi media massa yang ditandatangani oleh Atasan/Pimpinan Organisasi untuk mengikuti secara penuh kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Berbasis *E-Learning*.
- c. Daftar nama peserta diberikan paling lambat pada tanggal **8 Desember 2025**.
- d. Peserta wajib membawa laptop/ipad/tab untuk keperluan pembelajaran selama di Pusdik MK.
- e. Peserta bersedia mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (Pusdik MK).

2. Pembiayaan

- a. Biaya akomodasi dan konsumsi peserta selama kegiatan pendidikan serta biaya bahan/materi menjadi beban Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi.
- b. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menyediakan moda transportasi berupa bus untuk keberangkatan dan kepulangan dengan titik kumpul di gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta.
- c. Panitia tidak memberikan penggantian biaya transportasi peserta, selain moda transportasi berupa bus yang telah disediakan.
- d. Panitia memberikan uang saku kepada peserta.
- e. Panitia tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

3. Akomodasi

- a. Peserta wajib tinggal di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama kegiatan berlangsung.
- b. Peserta mendapatkan fasilitas 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- c. Fasilitas dalam kamar peserta meliputi:
 - Perlengkapan mandi (handuk, sabun mandi, shampo, sikat gigi, pasta gigi, dan sisir rambut)
 - Sandal kamar
 - Gula, kopi, teh, dan air mineral.



4. Konsumsi

- a. Peserta mendapatkan makan pagi, makan siang, dan makan malam, serta snack pagi, snack sore, dan snack malam.
- b. Fasilitas konsumsi peserta dimulai sejak saat registrasi sampai dengan berakhirnya kegiatan Penutupan.

5. Lain-lain

Peserta dihimbau membawa BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya.

6. Kontak

Informasi lebih lanjut tentang kegiatan ini bisa melalui pesan pada aplikasi WhatsApp pada nomor **085157929660** yang dapat dihubungi pada hari dan jam kerja yaitu Senin s.d. Jumat pukul 08.00 – 16.00 WIB.



Lampiran III

Nomor : 15207/2600/DK/12/2025

Tanggal : 05 Desember 2025

JADWAL KEGIATAN
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BERBASIS *E-LEARNING*

Waktu : Kamis s.d. Sabtu, 11 s.d. 13 Desember 2025

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jalan Raya Puncak Km.83 Cisarua – Bogor, Jawa Barat

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER	LOKASI
PERTAMA				
Kamis, 11 Desember 2025	08.00	Peserta berkumpul di titik kumpul keberangkatan		Gedung MKRI
	08.00 – 10.00	Perjalanan menuju Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	Panitia	
	10.00 – 12.00	<i>Check in</i> dan Registrasi Peserta	Panitia	Pusdik
	12.00 – 13.00	Ishoma		
	13.00 – 13.30	Penjelasan Teknis	Panitia	Pusdik
	13.30 – 14.00	Penjelasan Simultan dan <i>pre test</i>	Panitia	Pusdik
	14.00 – 15.30	Sesi I: Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila melalui <i>Experiential Learning</i>	Panitia	Puncak, Bogor



	15.30 – 16.00	<i>Coffee Break</i>		
	16.00 – 18.00	Lanjutan Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila melalui <i>Experiential Learning</i>	Panitia	Puncak, Bogor
	18.00 – 19.00	Ishoma		
KEDUA				
Jumat, 12 Desember 2025	06.00 – 07.00	Senam pagi		
	07.00 – 09.00	Makan pagi		
	09.00 – 11.00	Sesi II: Peran Jurnalis dalam Penanganan Perkara di Mahkamah Konstitusi	Narasumber: Biro Humas dan Protokol MK	Pusdik
	11.00 – 13.30	Ishoma	Panitia	
	13.30 – 14.30	Pembukaan PPHKWN dan <i>Launching</i> MKLC: 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Hymne Mahkamah Konstitusi 3. Laporan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 4. Penayangan VT MKLC 5. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi 6. Mars Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa 8. Foto Bersama	Sekretaris Jenderal MK Ketua MK	Pusdik



	14.30 – 17.30	Sesi III: Peran Wartawan sebagai Jurnalis dalam Menjaga Hak Konstitusionalitas dan Demokrasi melalui Penyampaian Berita yang Menjaga Etika dan independensi di Mahkamah Konstitusi	Narasumber: YM Ketua MK YM Wakil Ketua MK	Pusdik
	17.30 – 19.30	Ishoma	Panitia	
	19.30 – 21.30	Pentas Seni Musik	Panitia	Grha Konstitusi 7
KEDUA				
Sabtu, 13 Desember 2025	07.00 – 08.00	Penutupan: 1. Kesan dan Pesan Perwakilan Peserta 2. Sambutan dan Penutupan Kepala Pusdik Pancasila dan Konstitusi 3. Pembacaan Doa	Kapusdik	Pusdik
	08.00	<i>Check out</i>	Panitia	



Lampiran IV

Nomor : 15207/2600/DK/12/2025

Tanggal : 05 Desember 2025

REKAPITULASI DAFTAR PESERTA
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BERBASIS *E-LEARNING*

No	Nama + Gelar	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Jenis Kelamin	Jenjang Pendidikan Terakhir (SMA/S1/S2/S3)	Jabatan	Alamat Domisili	Nomor Handphone (WA wajib aktif)	Email
1									



Lampiran V

Nomor : 15207/2600/DK/12/2025

Tanggal : 05 Desember 2025

FORMAT SURAT TUGAS

SURAT TUGAS

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini Atasan/Pimpinan Organisasi Media Massa menugaskan kepada yang tersebut di bawah ini untuk menjadi peserta pada kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Berbasis *E-Learning* sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Asal Daerah (Alamat Lengkap)
1.			

Hari, Tanggal : Kamis s.d. Sabtu
11 s.d. 13 Desember 2025

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Hormat kami,
Nama Organisasi Media Massa
ttd
Atasan/Pimpinan





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 1547/DK/12/2025
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Undangan

09 Desember 2025

Kepada Yth.
Pegawai Mahkamah Konstitusi
(Daftar nama terlampir)
di
Jakarta

Dengan hormat, dalam rangka peningkatan pemahaman terhadap Pancasila, Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Berbasis E-Learning** yang akan diselenggarakan pada hari Kamis s.d. Sabtu, 11 s.d. 13 Desember 2025 secara luring (*offline*) di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat bersama ini kami memohon kehadiran Bapak/Ibu/Saudara dalam kegiatan Peluncuran Mahkamah Konstitusi *Learning Center* (MKLC) dan *Focus Group Discussion* Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Berbasis *E-Learning* dimaksud, pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 12 Desember 2025
Waktu : 13.00 WIB - selesai
Tempat : Graha 3 - Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Jl. Raya Puncak KM 83 Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua
Kabupaten Bogor, Jawa Barat
Agenda : 1. Peluncuran *e-Learning* (MKLC)
2. FGD Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Berbasis *e-Learning*

Atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Mundiri

Tembusan Yth.:
Sekretaris Jenderal



Digital Signature
mk1053018480251209012416

Lampiran Surat

Nomor : 1547/DK/12/2025

Tanggal : 09 Desember 2025

Daftar Nama Peserta

- | | |
|---------------------------|-------------------------------|
| 1. Heru Setiawan | 27. Edwin Aditya Irawan |
| 2. Wiryanto | 28. Angga Putri Gardina |
| 3. Tatang Garjito | 29. Bambang Sugito |
| 4. Sigit Purnomo | 30. Suhardi |
| 5. Fajar Laksono | 31. Muklis Nova |
| 6. Sri Handayani | 32. Dian Dwi Hapsoro |
| 7. Kurniasih Panti Rahayu | 33. Wijang Ardi Rahmadi |
| 8. Nanang Subekti | 34. Tiara Agustina |
| 9. Mundiri | 35. Sherly Octaviana Sari |
| 10. Budi Wijayanto | 36. Farhan Atha Nugraha |
| 11. Pan M. Faiz | 37. Yuwandi |
| 12. Santhy Kustrihardiani | 38. Muhamad Nur |
| 13. Mastiur Afrilidiany P | 39. Teguh Birawa |
| 14. Johan Yustisianto | 40. Hermanto |
| 15. Andi Hakim | 41. Ilham Erwin |
| 16. Achmad Dodi Haryadi | 42. Fauzan Febriyan |
| 17. Siska Yuniza | 43. Hafidz Ikhsan Baihaki |
| 18. Gunawan | 44. Adam Waluyo |
| 19. Bambang Sukmadi | 45. M. Hairuddin |
| 20. Medi Kurniadi | 46. Bambang Irawanto |
| 21. Hadian Taofik Rohman | 47. Aris Muda Nasution |
| 22. Santi Widiastuti | 48. Eko Dwi Cahyo |
| 23. Chandra Okantara | 49. Eri Iswandono |
| 24. Donny Yuniarto | 50. Malika Kamilatul Maharani |
| 25. Tarnoto | 51. Miftahul Madjid |
| 26. Chafid Sugianto | |



Lampiran Surat

Nomor : 1547/DK/12/2025

Tanggal : 09 Desember 2025

Jadwal Kegiatan

Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Berbasis E-Learning

Hari, Tanggal : Jumat, 12 Desember 2025

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi.

Jl. Raya Puncak Km. 83 Cisarua, Bogor – Jawa Barat

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER	LOKASI
Jumat, 12 Desember 2025	10.00-11.30	Registrasi	Panitia	
	11.30-13.30	Makan Siang Bersama	Panitia	Grha Konstitusi 2
	13.30-14.30	Pembukaan dan Peluncuran MKLC: 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Hymne Mahkamah Konstitusi 3. Laporan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 4. Penayangan VT MKLC 5. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi 6. Mars Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa 8. Foto Bersama	Sekjen MK Ketua MK	Aula Grha Konstitusi 3
	14.30-16.30	FGD Tema 1 Optimalisasi Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara 1. Paparan Narasumber 2. Diskusi	Pimpinan FGD Sekjen MK Nanang Subekti Narasumber: 1. BPK 2. Ketua Tim DJA 3. Analisis DJA 4. Ketua APHAMK 5. Advokat MK Moderator: Santhy K Peserta: Eselon II MK Pegawai MK	Ruang Kelas



		FGD Tema 2 Strategi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara melalui e-learning 1. Paparan Narasumber 2. Diskusi	Pimpinan FGD Sekjen MK Nanang Subekti Narasumber: 1. Direktur Bappenas 2. Koordinator Bappenas 3. Kapusdiklatwas BPKP 4. Kapusinforwas BPKP Moderator: Santhy K Peserta: Eselon II MK Pegawai MK	
	16.30-18.00	Istirahat		
	18.00-20.00	Makan Malam Bersama		Grha Konstitusi 2





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 1557/DK.06.00/12/2025

10 Desember 2025

Lampiran : 1 lembar

Perihal : **Undangan Rapat Persiapan Kegiatan PPHKWN berbasis E-Learning**

Kepada Yth.

(Daftar Nama Terlampir)

di –

t e m p a t

Dalam rangka persiapan kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara berbasis E-Learning** yang akan dilaksanakan pada hari Kamis s.d. Sabtu, 11 s.d. 13 Desember 2025, bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu/Saudara/i untuk menghadiri rapat persiapan kegiatan dimaksud yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Rabu, 10 Desember 2025

Tempat : Ruang Rapat Lantai 2 Grha Konstitusi 2 Pusdik

Waktu : Pukul 15.00 WIB s.d. selesai

Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan perkenanan Bapak/Ibu/Saudara/i, kami mengucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan
Konstitusi,

Mundiri



Digital Signature
mk-45179094251210104838

Lampiran Surat

Nomor : 1557/DK.06.00/12/2025

Tanggal : 10 Desember 2025

Peserta Rapat:

1. Mundiri
2. Mastiur Afrilidiany Pasaribu
3. Santhy Kustrihardiani
4. Santi Widyastuti
5. Bambang Sukmadi
6. Hadian Taofik Rochman
7. Medi Kurniadi
8. Angga Putri Gardina
9. Bambang Sugito
10. Chafid Sugianto
11. Edwin Aditya Irawan
12. Muhlis Nova
13. Suhardi
14. William Ivan Nathanael Panggabean
15. Miftahul Madjid
16. Malika Kamilatul Maharani





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 1522/DK.06.00/12/2025
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : **Permohonan Narasumber**

08 Desember 2025

Yth. Bapak Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H.
di tempat

Dengan hormat, dalam rangka peningkatan pemahaman terhadap Pancasila, Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Berbasis E-Learning** yang akan diselenggarakan pada hari Kamis s.d. Sabtu, 11 s.d. 13 Desember 2025 secara luring (*offline*) di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Bapak untuk dapat menghadiri kegiatan Peluncuran Mahkamah Konstitusi *Learning Center* (MKLC) dan menjadi narasumber *Focus Group Discussion* Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Berbasis *E-Learning* dimaksud, pada:

hari, tanggal : Jumat, 12 Desember 2025

waktu : Pukul 13.30 WIB s.d. selesai

tempat : Aula Grha 3 Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Jl. Raya Puncak Km. 83 Cisarua, Bogor – Jawa Barat

tema : Optimalisasi Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara.

Kami mengharapkan bahan paparan yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Kami telah menugaskan **Sdr. Edwin Aditya Irawan**, yang dapat dihubungi melalui kontak WhatsApp 085157929660, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud

Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Mundiri

Tembusan Yth.:
Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk-284958211251208012651

Lampiran Surat

Nomor : 1522/DK.06.00/12/2025

Tanggal : 08 Desember 2025

Jadwal Kegiatan

Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Berbasis E-Learning

Hari, Tanggal : Jumat, 12 Desember 2025

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi.

Jl. Raya Puncak Km. 83 Cisarua, Bogor – Jawa Barat

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER	LOKASI
Jumat, 12 Desember 2025	11.30-13.30	Makan Siang Bersama	Panitia	
	13.30-14.30	Pembukaan dan Launching MKLC: - Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya - Hymne Mahkamah Konstitusi - Laporan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi - Penayangan VT MKLC - Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi - Mars Mahkamah Konstitusi - Pembacaan Doa - Foto Bersama	Sekjen MK Ketua MK	Aula Grha Konstitusi 3
	14.30-16.30	FGD Tema 1 Optimalisasi Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Tema 2 Strategi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara melalui e-learning	Narasumber Tema 1: - BPK - DJA - APHAMK - Advokat MK Narasumber Tema 2: - Bappenas - BPKP	Ruang Kelas Grha Konstitusi 3
	16.30-18.00	Istirahat		
	18.00-20.00	Makan Malam Bersama		





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 1527/DK.06.00/12/2025
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : **Permohonan Narasumber**

08 Desember 2025

Yth. Direktur Pembangunan Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS
Bapak Hendra Wahanu Prabandani, SH, LLM.
di tempat

Dengan hormat, dalam rangka peningkatan pemahaman terhadap Pancasila, Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Berbasis *E-Learning*** yang akan diselenggarakan pada hari Kamis s.d. Sabtu, 11 s.d. 13 Desember 2025 secara luring (*offline*) di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Bapak atau yang mewakili, beserta 1 (satu) orang pejabat terkait untuk menghadiri kegiatan Peluncuran Mahkamah Konstitusi *Learning Center* (MKLC) dan menjadi narasumber *Focus Group Discussion* Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Berbasis *E-Learning* dimaksud, pada:

hari, tanggal : Jumat, 12 Desember 2025

waktu : Pukul 13.30 WIB s.d. selesai

tempat : Aula Grha 3 Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Jl. Raya Puncak Km. 83 Cisarua, Bogor – Jawa Barat

tema : Strategi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara melalui *E-Learning*.

Kami mengharapkan bahan paparan yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Kami telah menugaskan **Sdr. Edwin Aditya Irawan**, yang dapat dihubungi melalui kontak WhatsApp 085157929660, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud

Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Mundiri

Tembusan Yth.:
Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk1005424198251208023842

Lampiran Surat

Nomor : 1527/DK.06.00/12/2025

Tanggal : 08 Desember 2025

Jadwal Kegiatan

Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Berbasis E-Learning

Hari, Tanggal : Jumat, 12 Desember 2025

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi.

Jl. Raya Puncak Km. 83 Cisarua, Bogor – Jawa Barat

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER	LOKASI
Jumat, 12 Desember 2025	11.30-13.30	Makan Siang Bersama	Panitia	
	13.30-14.30	Pembukaan dan Launching MKLC: 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Hymne Mahkamah Konstitusi 3. Laporan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 4. Penayangan VT MKLC 5. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi 6. Mars Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa 8. Foto Bersama	Sekjen MK Ketua MK	Aula Grha Konstitusi 3
	14.30-16.30	FGD Tema 1 Optimalisasi Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Tema 2 Strategi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara melalui e-learning	Narasumber Tema 1: 1. BPK 2. DJA 3. APHAMK 4. Advokat MK Narasumber Tema 2: 1. Bappenas 2. BPKP	Ruang Kelas
	16.00-18.00	Istirahat		
	18.00-20.00	Makan Malam Bersama		





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 1524/DK.06.00/12/2025
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Narasumber**

08 Desember 2025

Yth. Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara I
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Bapak Sarjono, S.E., M.B.A., CSFA.
di tempat

Dengan hormat, dalam rangka peningkatan pemahaman terhadap Pancasila, Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Berbasis E-Learning** yang akan diselenggarakan pada hari Kamis s.d. Sabtu, 11 s.d. 13 Desember 2025 secara luring (*offline*) di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Bapak atau yang mewakili untuk dapat menghadiri kegiatan Peluncuran Mahkamah Konstitusi *Learning Center* (MKLC) dan menjadi narasumber *Focus Group Discussion* Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Berbasis *E-Learning* dimaksud, pada:

hari, tanggal : Jumat, 12 Desember 2025

waktu : Pukul 13.30 WIB s.d. selesai

tempat : Aula Grha 3 Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Jl. Raya Puncak Km. 83 Cisarua, Bogor – Jawa Barat

Tema : Optimalisasi Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

Kami mengharapkan bahan paparan yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Kami telah menugaskan **Sdr. Edwin Aditya Irawan**, yang dapat dihubungi melalui kontak WhatsApp 085157929660, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud

Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Mundiri

Tembusan Yth.:
Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk1409655475251208020655

Lampiran Surat

Nomor : 1524/DK.06.00/12/2025

Tanggal : 08 Desember 2025

Jadwal Kegiatan

Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Berbasis E-Learning

Hari, Tanggal : Jumat, 12 Desember 2025

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi.

Jl. Raya Puncak Km. 83 Cisarua, Bogor – Jawa Barat

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER	LOKASI
Jumat, 12 Desember 2025	11.30-13.30	Makan Siang Bersama	Panitia	
	13.30-14.30	Pembukaan dan Launching MKLC: 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Hymne Mahkamah Konstitusi 3. Laporan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 4. Penayangan VT MKLC 5. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi 6. Mars Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa 8. Foto Bersama	Sekjen MK Ketua MK	Aula Grha Konstitusi 3
	14.30-16.30	FGD Tema 1 Optimalisasi Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Tema 2 Strategi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara melalui e-learning	Narasumber Tema 1: 1. BPK 2. DJA 3. APHAMK 4. Advokat MK Narasumber Tema 2: 1. Bappenas 2. BPKP	Ruang Kelas Grha Konstitusi 3
	16.30-18.00	Istirahat		
	18.00-20.00	Makan Malam Bersama		





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 1528/DK.06.00/12/2025
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : **Permohonan Narasumber**

08 Desember 2025

**Yth. Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan RI**

Bapak Riko Amir
di tempat

Dengan hormat, dalam rangka peningkatan pemahaman terhadap Pancasila, Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Berbasis E-Learning** yang akan diselenggarakan pada hari Kamis s.d. Sabtu, 11 s.d. 13 Desember 2025 secara luring (*offline*) di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenannya menugaskan 2 (dua) orang untuk dapat berkenan menghadiri kegiatan Peluncuran Mahkamah Konstitusi *Learning Center* (MKLC) dan menjadi narasumber *Focus Group Discussion* Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Berbasis *E-Learning* dimaksud, pada:

hari, tanggal : Jumat, 12 Desember 2025
waktu : 13.30 WIB s.d. selesai
tempat : Aula Grha 3 Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Jl. Raya Puncak Km. 83 Cisarua, Bogor – Jawa Barat
tema : Optimalisasi Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional
Warga Negara

Kami mengharapakan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Kami telah menugaskan **Sdr. Edwin Aditya Irawan**, yang dapat dihubungi melalui kontak WhatsApp 085157929660, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud

Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan perkenannya, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Mundiri

Tembusan Yth.:
Sekretaris Jenderal.



Digital Signature
mk-123703954251208025352

Lampiran Surat

Nomor : 1528/DK.06.00/12/2025

Tanggal : 08 Desember 2025

Jadwal Kegiatan

Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Berbasis E-Learning

Hari, Tanggal : Jumat, 12 Desember 2025

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi.

Jl. Raya Puncak Km. 83 Cisarua, Bogor – Jawa Barat

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER	LOKASI
Jumat, 12 Desember 2025	12.30-13.30	Makan Siang Bersama	Panitia	
	13.30-14.00	Pembukaan dan Launching MKLC: - Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya - Hymne Mahkamah Konstitusi - Laporan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi - Penayangan VT MKLC - Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi - Mars Mahkamah Konstitusi - Pembacaan Doa - Foto Bersama	Sekjen MK Ketua MK	Aula Grha Konstitusi 3
	14.00-16.00	FGD Tema 1 Optimalisasi Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Tema 2 Strategi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara melalui e-learning	Narasumber Tema 1: - BPK - DJA - APHAMK - Advokat MK Narasumber Tema 2: - Bappenas - BPKP	Ruang Kelas
	16.00-18.00	Istirahat		
	18.00-20.00	Makan Malam Bersama		





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 1520/DK.06.00/12/2025
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : **Permohonan Narasumber**

08 Desember 2025

**Yth. Plt. Kepala Pusat Informasi Pengawasan
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Bapak Robbi Adhilni**
di tempat

Dengan hormat, dalam rangka peningkatan pemahaman terhadap Pancasila, Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Berbasis E-Learning** yang akan diselenggarakan pada hari Kamis s.d. Sabtu, 11 s.d. 13 Desember 2025 secara luring (*offline*) di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Bapak untuk dapat menghadiri kegiatan Peluncuran Mahkamah Konstitusi *Learning Center* (MKLC) dan menjadi narasumber *Focus Group Discussion* Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Berbasis *E-Learning* dimaksud, pada:

hari, tanggal : Jumat, 12 Desember 2025

waktu : Pukul 13.30 WIB s.d. selesai

tempat : Aula Grha 3 Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Jl. Raya Puncak Km. 83 Cisarua, Bogor – Jawa Barat

Tema : Strategi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara melalui *E-Learning*

Kami mengharapkan bahan paparan yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Kami telah menugaskan **Sdr. Edwin Aditya Irawan**, yang dapat dihubungi melalui kontak WhatsApp 085157929660, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud

Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Mundiri

Tembusan Yth.:
Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk-18125183251208011127

Lampiran Surat

Nomor : 1520/DK.06.00/12/2025

Tanggal : 08 Desember 2025

Jadwal Kegiatan

Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Berbasis E-Learning

Hari, Tanggal : Jumat, 12 Desember 2025

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi.

Jl. Raya Puncak Km. 83 Cisarua, Bogor – Jawa Barat

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER	LOKASI
Jumat, 12 Desember 2025	11.30-13.30	Makan Siang Bersama	Panitia	
	13.30-14.30	Pembukaan dan Launching MKLC: 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Hymne Mahkamah Konstitusi 3. Laporan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 4. Penayangan VT MKLC 5. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi 6. Mars Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa 8. Foto Bersama	Sekjen MK Ketua MK	Aula Grha Konstitusi 3
	14.30-16.30	FGD Tema 1 Optimalisasi Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Tema 2 Strategi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara melalui e-learning	Narasumber Tema 1: 1. BPK 2. DJA 3. APHAMK 4. Advokat MK Narasumber Tema 2: 1. Bappenas 2. BPKP	Ruang Kelas Grha Konstitusi 3
	16.30-18.00	Istirahat		
	18.00-20.00	Makan Malam Bersama		





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 1529/DK.06.00/12/2025
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : **Permohonan Narasumber**

08 Desember 2025

Yth. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Bapak Raden Murwantara Ak.,M.EcDev, Ph.D.
di tempat

Dengan hormat, dalam rangka peningkatan pemahaman terhadap Pancasila, Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Berbasis E-Learning** yang akan diselenggarakan pada hari Kamis s.d. Sabtu, 11 s.d. 13 Desember 2025 secara luring (*offline*) di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Bapak untuk dapat menghadiri kegiatan Peluncuran Mahkamah Konstitusi *Learning Center* (MKLC) dan menjadi narasumber *Focus Group Discussion* Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Berbasis *E-Learning* dimaksud, pada:

hari, tanggal : Jumat, 12 Desember 2025

waktu : Pukul 13.30 WIB s.d. selesai

tempat : Aula Grha 3 Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Jl. Raya Puncak Km. 83 Cisarua, Bogor – Jawa Barat

Tema : Strategi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara melalui *E-Learning*.

Kami mengharapkan bahan paparan yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Kami telah menugaskan **Sdr. Edwin Aditya Irawan**, yang dapat dihubungi melalui kontak WhatsApp 085157929660, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud

Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal

Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Mundiri

Tembusan Yth.:

Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk200841943251208013241

Lampiran Surat

Nomor : 1529/DK.06.00/12/2025

Tanggal : 08 Desember 2025

Jadwal Kegiatan

Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Berbasis E-Learning

Hari, Tanggal : Jumat, 12 Desember 2025

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi.

Jl. Raya Puncak Km. 83 Cisarua, Bogor – Jawa Barat

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER	LOKASI
Jumat, 12 Desember 2025	11.30-13.30	Makan Siang Bersama	Panitia	
	13.30-14.30	Pembukaan dan Launching MKLC: - Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya - Hymne Mahkamah Konstitusi - Laporan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi - Penayangan VT MKLC - Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi - Mars Mahkamah Konstitusi - Pembacaan Doa - Foto Bersama	Sekjen MK Ketua MK	Aula Grha Konstitusi 3
	14.30-16.30	FGD Tema 1 Optimalisasi Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Tema 2 Strategi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara melalui e-learning	Narasumber Tema 1: - BPK - DJA - APHAMK - Advokat MK Narasumber Tema 2: - Bappenas - BPKP	Ruang Kelas Grha Konstitusi 3
	16.30-18.00	Istirahat		
	18.00-20.00	Makan Malam Bersama		





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

SURAT TUGAS

Nomor : 269/ST.SPD/2000/12/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Mahkamah Konstitusi menugaskan kepada yang tersebut di bawah ini untuk melaksanakan Perjalanan Dinas sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Tanggal Perjalanan Dinas
1	Pan M Faiz Kusuma Wijaya	Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol	12 Desember 2025
2	Andi Hakim	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Luar Negeri	12 Desember 2025
3	Gunawan	Plt. Kepala Bagian Pengamanan Dalam	12 Desember 2025
4	Achmad Dodi Haryadi	Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat	12s/d13 Desember 2025
5	Siska Yuniza	Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan Kinerja	12 Desember 2025
6	Chandra Okantara	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	12 Desember 2025
7	Dian Dwi Hapsoro	Auditor Ahli Muda	12 Desember 2025
8	Wijang Ardi Rahmadi	Auditor Ahli Muda	12 Desember 2025
9	Adam Waluyo	Manggala Informatika Ahli Pertama	12 Desember 2025
10	Sherly Octaviana Sari	Penerjemah Ahli Muda	12 Desember 2025
11	Donny Yuniarto	Penerjemah Ahli Muda	12 Desember 2025
12	Farhan Atha Nugraha	Arsiparis Terampil	12 Desember 2025
13	Tiara Agustina	Pranata Hubungan Masyarakat Penyelia	11s/d13 Desember 2025
14	Ilham Erwin	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	12 Desember 2025
15	Fauzan Febriyan	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	12 Desember 2025

Tempat, Kota Tujuan : Pusdik Cisarua Bogor, Jawa Barat

Dalam rangka : Menghadiri acara Launching MKLC, Diskusi dengan Pers dan Paparan E-Learning MK, Corpu MK, MKRI AI dan Diskusi dengan Narsumber. di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Cisarua, Bogor.

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, **09 Desember 2025**

a.n. Ketua Mahkamah Konstitusi
Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan



Digital Signature
mk1474067278251209035549



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

SURAT TUGAS

Nomor 931.1/2000/12/2025

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Berbasis *E-Learning*, dipandang perlu untuk menghadiri dan melaksanakan tugas pada kegiatan tersebut;
- b. bahwa untuk mendukung maksud pada huruf a di atas, Ketua Mahkamah Konstitusi perlu menerbitkan Surat Tugas kepada yang tersebut di bawah ini untuk melaksanakan tugas pada kegiatan tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
2. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
3. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Memberi Tugas

Kepada : **Daftar Nama Terlampir**

Untuk : Melaksanakan tugas sebagai Narasumber dan Moderator pada kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Berbasis *E-Learning* di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Kab. Bogor pada tanggal 12 Desember 2025.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 10 Desember 2025

a.n. Ketua Mahkamah Konstitusi,

Sekretaris Jenderal,

Heru Setiawan



Digital Signature
mk219411671251215090520

Lampiran Surat Tugas

Nomor : 931.1/2000/12/2025

Tanggal : 10 Desember 2025

NARASUMBER DAN MODERATOR

**KEGIATAN PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA
NEGARA BERBASIS *E-LEARNING***

Narasumber PPHKWN : 1. Dr. Suhartoyo, S.H., M.H.
2. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.
3. Pan Mohamad Faiz Kusuma W.

Moderator PPHKWN : 1. Pan Mohamad Faiz Kusuma W.
2. Andi Hakim

Narasumber FGD PPHKWN : 1. Heru Setiawan
Berbasis *E-Learning* 2. Widodo Ekatjahjana
3. Fahrudin Latif
4. Iman Sufrian
5. Idola Pawestri
6. Robbi Adhilni
7. Hanik Inayatur Rohmah
8. Istiyanti
9. Viktor Santoso Tandiasa
10. Tanti Dian Ruhama
11. Septian Dwi Wibowo
12. Sekar Ayu Garindya
13. Nanang Subekti

Moderator FGD PPHKWN : 1. Santhy Kustrihardiani
Berbasis *E-Learning*





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

SURAT TUGAS NOMOR 8/ST.SPD/2600/12/2025

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Berbasis *E-Learning*, dipandang perlu untuk menghadiri dan melaksanakan tugas pada kegiatan tersebut;

b. bahwa untuk mendukung maksud pada huruf a di atas, Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi perlu menerbitkan Surat Tugas kepada yang tersebut di bawah ini untuk melaksanakan tugas pada kegiatan tersebut.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

2. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;

3. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Memberi Tugas

Kepada :

No	Nama	Penugasan	Tanggal
1.	<i>Terlampir</i>	<i>Terlampir</i>	<i>Terlampir</i>



Untuk : Melaksanakan tugas sebagai panitia dan pendukung pada kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Berbasis *E-Learning* di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Kab. Bogor pada tanggal 10 s.d. 13 Desember 2025.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Bogor, 09 Desember 2025

an. Sekretaris Jenderal,

Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,

Mundiri



Digital Signature
[mk1725720817251209030611](#)

Lampiran Surat Tugas

Nomor : 8/ST.SPD/2600/12/2025

Tanggal : 09 Desember 2025

**DAFTAR PANITIA YANG MELAKUKAN PERJALANAN DINAS PADA
KEGIATAN PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA
NEGARA BERBASIS *E-LEARNING***

NO	NAMA	PENUGASAN	TANGGAL
1.	Tarnoto	Panitia untuk dukungan teknologi dan informasi	11 s.d. 13 Desember 2025
2.	Hafidz Ikhsan Baihaki	Panitia untuk dukungan teknologi dan informasi	11 s.d. 13 Desember 2025
3.	Yuwandi	Panitia untuk dukungan publikasi dan dokumentasi	10 s.d. 13 Desember 2025
4.	Muhamad Nur	Panitia untuk dukungan publikasi dan dokumentasi	10 s.d. 13 Desember 2025
5.	Hermanto	Panitia untuk dukungan publikasi dan dokumentasi	10 s.d. 13 Desember 2025
6.	Teguh Birawaputra	Panitia untuk dukungan publikasi dan dokumentasi	11 s.d. 13 Desember 2025
7.	Roy Setiana	Panitia Pendukung untuk dukungan publikasi dan dokumentasi	11 s.d. 13 Desember 2025





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

SURAT TUGAS NOMOR 15.1/2600/12/2025

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Berbasis *E-Learning*, dipandang perlu untuk menugaskan tenaga pendukung pada kegiatan tersebut;
- b. bahwa untuk mendukung maksud pada huruf a di atas, Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi perlu menerbitkan Surat Tugas kepada yang tersebut di bawah ini untuk melaksanakan tugas pada kegiatan tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
2. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
3. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.



Memberi Tugas

Kepada : **Daftar Nama Terlampir**

Untuk : Melaksanakan tugas sebagai Tenaga Pendukung pada kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Berbasis *E-Learning* di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Kab. Bogor pada tanggal 12 Desember 2025.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 10 Desember 2025

an. Sekretaris Jenderal

Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,

Mundiri



Digital Signature
[mk2094546232251216083809](#)

Lampiran Surat Tugas

Nomor : 15.1/2600/12/2025

Tanggal : 10 Desember 2025

DAFTAR NAMA TENAGA PENDUKUNG
KEGIATAN PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA
NEGARA BERBASIS *E-LEARNING*

NO	NAMA	JABATAN
1	Wiwit Roso Putro	Operator Layanan Operasional
2	Hendrik Suhendrik	Operator Layanan Operasional
3	Upahrudin	Operator Layanan Operasional
4	Ernawati	Operator Layanan Operasional
5	Sutrisno Hermawanto	Operator Layanan Operasional
6	Fitriyani	Operator Layanan Operasional
7	Meri Silviani Kosasih	Operator Layanan Operasional
8	Nasution	Operator Layanan Operasional
9	M.Indra Saputra	Operator Layanan Operasional
10	Siti Nuraeni	Operator Layanan Operasional
11	M.Suwandi	Operator Layanan Operasional
12	Egi Noviadika	Operator Layanan Operasional
13	Dahlan	Operator Layanan Operasional
14	Iwan	Operator Layanan Operasional
15	Hambaliansyah	Operator Layanan Operasional
16	Angga Setiawan	Operator Layanan Operasional
17	Muh. Suhendri	Operator Layanan Operasional
18	Dadan Sumardan	Operator Layanan Operasional
19	Ade Siti Saidah	Operator Layanan Operasional
20	Siti Komariah	Pengelola Umum Operasional
21	M.Zamroni	Penata Layanan Operasional
22	Kiki Iqbal Fauzi	Operator Layanan Operasional
23	Aldi Aldiansyah	Operator Layanan Operasional



24	Andriana	Pengelola Umum Operasional
25	Rahmat Saleh	Operator Layanan Operasional
26	Masjum	Operator Layanan Operasional
27	Rusdi Saleh	Operator Layanan Operasional
28	M. Rudiatna	Operator Layanan Operasional
29	Lukman Suwandi	Operator Layanan Operasional
30	Agus	Operator Layanan Operasional
31	Harjanto	Operator Layanan Operasional





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

SURAT TUGAS

Nomor 9/ST.SPD/2600/12/2025

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Berbasis *E-Learning*, dipandang perlu untuk menghadiri dan melaksanakan tugas pada kegiatan tersebut;
- b. bahwa untuk mendukung maksud pada huruf a di atas, Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi perlu menerbitkan Surat Tugas kepada yang tersebut di bawah ini untuk melaksanakan tugas pada kegiatan tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
2. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
3. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Memberi Tugas

Kepada :	No	Nama	Penugasan	Tanggal
	1.	terlampir	Terlampir	terlampir

- Untuk : Melaksanakan tugas sebagai peserta pada kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Berbasis *E-Learning* di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Kab. Bogor pada tanggal 11 s.d. 13 Desember 2025.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Bogor, 10 Desember 2025

a.n. Sekretaris Jenderal,
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Mundiri



Digital Signature
mk335699243251215084324

Lampiran Surat Tugas

Nomor : 9/ST.SPD/2600/12/2025

Tanggal : 10 Desember 2025

DAFTAR PESERTA
KEGIATAN PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA
NEGARA BERBASIS *E-LEARNING*

NO	NAMA	MEDIA	TUJUAN	TANGGAL
1.	Fath Putra Mulya	Antara	Jakarta - Kab. Bogor (PP)	11 s.d. 13 Desember 2025
2.	Nino Citra Anugrahanto	Harian Kompas	Jakarta - Kab. Bogor (PP)	11 s.d. 13 Desember 2025
3.	M. Naufal	Tirto	Jakarta - Kab. Bogor (PP)	11 s.d. 13 Desember 2025
4.	Rizky Suryarandika	Republika	Jakarta - Kab. Bogor (PP)	11 s.d. 13 Desember 2025
5.	Syahrul Baihaqi	Forum Keadilan	Jakarta - Kab. Bogor (PP)	11 s.d. 13 Desember 2025
6.	Devi Harahap	Media Indonesia	Jakarta - Kab. Bogor (PP)	11 s.d. 13 Desember 2025
7.	Yosafat Diva Bayu Wisesa	IdnTimes	Jakarta - Kab. Bogor (PP)	11 s.d. 13 Desember 2025
8.	Romaida Uswatun Hasanah	JPNN	Jakarta - Kab. Bogor (PP)	11 s.d. 13 Desember 2025
9.	Raiza Andini	Berita Nasional	Jakarta - Kab. Bogor (PP)	11 s.d. 13 Desember 2025
10.	Firyalfatin	Hukum Online	Jakarta - Kab. Bogor (PP)	11 s.d. 13 Desember 2025
11.	Agus Sahbani	Hukum Online	Jakarta - Kab. Bogor (PP)	11 s.d. 13 Desember 2025
12.	Edwin	Kompas TV	Jakarta - Kab. Bogor (PP)	11 s.d. 13 Desember 2025
13.	Heryanto	Kompas TV	Jakarta - Kab. Bogor (PP)	11 s.d. 13 Desember 2025
14.	M. Isnén Suhandá	RRI	Jakarta - Kab. Bogor (PP)	11 s.d. 13 Desember 2025
15.	Yusuf Bagus	RRI	Jakarta - Kab. Bogor (PP)	11 s.d. 13 Desember 2025
16.	Berkat Mangasitua Munthe	SIN PO TV	Jakarta - Kab. Bogor (PP)	11 s.d. 13 Desember 2025



17.	Mario Christian Sumampow	Tribun	Jakarta - Kab. Bogor (PP)	11 s.d. 13 Desember 2025
18.	Didi Supandi	Konstitusionalis TV	Jakarta - Kab. Bogor (PP)	11 s.d. 13 Desember 2025
19.	Isam Saifudin	Konstitusionalis TV	Jakarta - Kab. Bogor (PP)	11 s.d. 13 Desember 2025
20.	Bahrul	TVRI	Jakarta - Kab. Bogor (PP)	11 s.d. 13 Desember 2025
21.	Surtika	TVRI	Jakarta - Kab. Bogor (PP)	11 s.d. 13 Desember 2025
22.	Shela Octavia	kompas.com	Jakarta - Kab. Bogor (PP)	11 s.d. 13 Desember 2025
23.	Umi Sjarifah	AMKI	Jakarta - Kab. Bogor (PP)	11 s.d. 13 Desember 2025
24.	Dadang Rachmat	AMKI	Jakarta - Kab. Bogor (PP)	11 s.d. 13 Desember 2025
25.	Herdiana	AMKI	Jakarta - Kab. Bogor (PP)	11 s.d. 13 Desember 2025
26.	Bambang Panji Erawan	Media MK	Jakarta - Kab. Bogor (PP)	11 s.d. 13 Desember 2025
27.	Nur Budiman	Media MK	Jakarta - Kab. Bogor (PP)	11 s.d. 13 Desember 2025
28.	Catur Aziyanto	AMKI	Jakarta - Kab. Bogor (PP)	11 s.d. 13 Desember 2025
29.	Eko Junanto	AMKI	Jakarta - Kab. Bogor (PP)	11 s.d. 13 Desember 2025
30.	Prafagasta Putra Aziyanto	AMKI	Jakarta - Kab. Bogor (PP)	11 s.d. 13 Desember 2025





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

SURAT TUGAS

Nomor : 466/ST.SPD/2300/12/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Mahkamah Konstitusi menugaskan kepada yang tersebut di bawah ini untuk melaksanakan Perjalanan Dinas sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Tanggal Perjalanan Dinas
1	IPTU Eko Dwi Cahyo	Penata Layanan Operasional dibidang Keamanan	12 Desember 2025
2	IPDA Eri Iswandono	Penata Layanan Keprotokolan	12 Desember 2025
3	Ajis Setiawan	Staf Pendukung	12 Desember 2025
4	Alex Hengki Fernando G	Staf Pendukung	12 Desember 2025
5	Idrus M	Staf Pendukung	12 Desember 2025
6	Japar Sodik	Staf Pendukung	12 Desember 2025
7	Dhiki Ramadhan	Staf Pendukung	12 Desember 2025
8	Fitrah Novanco	Staf Pendukung	12 Desember 2025
9	Riezky Pankualam	Staf Pendukung	12 Desember 2025
10	Madinah	Staf Pendukung	12 Desember 2025
11	Wildan Aqilla	Staf Pendukung	12 Desember 2025
12	Suryadi	Staf Pendukung	12 Desember 2025
13	Indra Purnama	Staf Pendukung	12 Desember 2025
14	Firmansyah	Staf Pendukung	12 Desember 2025
15	Agus Satrya H	Staf Pendukung	12 Desember 2025
16	Djandji L	Staf Pendukung	12 Desember 2025
17	Usman Fauzi	Staf Pendukung	12 Desember 2025
18	Baron Yulianto	Staf Pendukung	12 Desember 2025



19	Faisal	Staf Pendukung	12 Desember 2025
----	--------	----------------	------------------

Tempat, Kota Tujuan : Pusdik Cisarua Bogor, Jawa Barat

Dalam rangka : Layanan TUPP Acara Launching MKLC, Diskusi dengan Pers dan Paparan E-Learning MK, Corpu MK, MKRI AI dan Diskusi dengan Narsumber. di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Cisarua, Bogor.

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, **09 Desember 2025**

Kepala Biro Humas dan Protokol,

Pan M. Faiz Kusuma W



Digital Signature
mk537898307251209035849



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

SURAT TUGAS Nomor : 268/ST.SPD/2000/12/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Mahkamah Konstitusi menugaskan kepada yang tersebut di bawah ini untuk melaksanakan Perjalanan Dinas sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Tanggal Perjalanan Dinas
1.	Heru Setiawan	Sekretaris Jenderal	12 Desember 2025
2.	Tatang Garjito	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan	12 Desember 2025
3.	Fajar Laksono	Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan	12 Desember 2025
4.	Sri Handayani	Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi	12 Desember 2025
5.	Budi Wijayanto	Kepala Biro Umum	12 Desember 2025
6.	Sigit Purnomo	Inspektur	12 Desember 2025
7.	Nanang Subekti	Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi	12 Desember 2025
8.	Kurniasih Panti Rahayu	Kepala Pusat Penelitian dan Pengelolaan Perpustakaan	12 Desember 2025

Tempat, Kota Tujuan : Pusdik Cisarua Bogor, Jawa Barat
Dalam rangka : Menghadiri acara Launching MKLC, Diskusi dengan Pers dan Paparan E-Learning MK, Corpu MK, MKRI AI dan Diskusi dengan Narsumber. di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Cisarua, Bogor.

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, **09 Desember 2025**
a.n. Ketua Mahkamah Konstitusi
Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan



Digital Signature
mk-779528414251209035349



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

SURAT TUGAS

Nomor: 252/ST.SPD/2000/12/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Mahkamah Konstitusi menugaskan kepada yang tersebut di bawah ini untuk melaksanakan Perjalanan Dinas sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Tanggal Perjalanan Dinas
1.	Dr. Suhartoyo, S.H, M.H	Ketua Mahkamah Konstitusi	12 Desember 2025
2.	Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi	12 Desember 2025
3.	Dr. Wiryanto, S.H, M.H.	Plt. Panitera	12 Desember 2025
4.	Johan Yustisianto	Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol	12 Desember 2025
5.	IPDA. Bambang Irawanto	ADC Ketua MK	12 Desember 2025
6.	IPDA Aris Muda Nasution	Walpri Ketua MK	12 Desember 2025

Tempat, Kota Tujuan : Pusdik Cisarua Bogor, Jawa Barat
Dalam rangka : YM Ketua Mahkamah Konstitusi Dr. Suhartoyo, S.H., M.H, Wakil Ketua YM. Prof. Saldi Isra ,S.H, M.PA. dan Plt. Panitera MK Dr. Wiryanto, S.H.,M.H. Menghadiri acara Launching MKLC di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Cisarua, Bogor.

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, **05 Desember 2025**
a.n. Ketua Mahkamah Konstitusi
Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan



Digital Signature
mk393793012251209034937

Jakarta, 10 Desember 2025

SURAT TUGAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Uni Lubis
Jabatan : Pemimpin Redaksi, IDN Times
Email : uni.lubis@idntimes.com

Menugaskan jurnalis IDN Times:

Nama : Yosafat Diva Bayu Wisesa
Jabatan : Reporter, IDN Times
Email : yosafat.wisesa@idntimes.com

Untuk melakukan peliputan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Berbasis E- Learning yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 11 Desember 2025 - Sabtu, 13 Desember 2025
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Surat penugasan ini tidak dapat dipergunakan untuk keperluan lain selain peliputan. Jurnalis IDN Times tidak diperbolehkan meminta dan atau menerima imbalan dalam bentuk apapun saat meliput ataupun berkaitan dengan peliputan.

Demikian surat penugasan ini kami sampaikan, atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Uni Lubis

Pemimpin Redaksi, IDN Times

IDN HQ

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 27
Lt. 3, Kuningan
Jakarta (12950), Indonesia
+62 21 397 13888

IDN SURABAYA

Sentra Darmo Villa C 1-3
Jl. Raya Darmo Permai Selatan No. 6-14
Surabaya (60226), Indonesia
+62 31 731 8228

SURAT TUGAS
No. 034/S-KET/tribun/XII/2025

Dengan ini kami menugaskan :

N a m a / N I K : MARIO CHRISTIAN SUMAMPOW / 077766
J a b a t a n : Wartawan Tribunnews
A l a m a t : Tribunnews, Jl. Palmerah Selatan No. 3, Jakarta Pusat

Surat tugas ini dibuat untuk mengikuti kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara berbasis E-Learning pada tanggal 11-13 Desember 2025 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor.

Demikian Surat Tugas ini kami buat untuk digunakan seperlunya, atas kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Jakarta, 8 Desember 2025


Domuara Ambarita
News Vice Director

Tembusan :
- Arsip

SURAT TUGAS

Nomor: REP.085/XII/25

Yang bertanda tangan di bawah ini Pemimpin Redaksi Republika menugaskan kepada yang tersebut di bawah ini untuk menjadi peserta pada kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Berbasis E-Learning sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Asal Daerah (Alamat Lengkap)
1.	Rizky Suryarandika	Reporter	Gang langgar pedati 2-nomor 119 kabupaten Bogor

Hari, Tanggal : Kamis s.d. Sabtu
11 s.d. 13 Desember 2025

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jl. Raya Puncak
KM.83, Cisarua, Bogor

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Hormat kami,



Andi Muhyiddin
Pemimpin Redaksi Republika

Nomor : 089/TCS/ST/XII/2025

Jakarta, 8 Desember 2025

Lampiran : -

Perihal : **Surat Tugas**

Yang bertanda tangan di bawah ini bertindak atas nama Tirto.id:

Nama : Rachmadin Ismail

NIK : 2306302

Jabatan : Pemimpin Redaksi

Dengan ini memberikan tugas kepada:

Nama : Muhammad Naufal

NIK : 2309309

Jabatan : Reporter

Untuk mengikuti kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Berbasis *E-Learning*** yang akan diselenggarakan pada tanggal 11 s.d. 13 Desember 2025 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Demikian surat ini kami buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan penuh tanggung jawab.

Hormat kami,



Abdul Aziz

Redaktur Pelaksana

Mengetahui,



Rachmadin Ismail

Pemimpin Redaksi

Jakarta, 8 Desember 2025
No. 141/JSM/RDKS/XII/2025

**Kepada Yth.
Bapak Mundi
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Gedung Mahkamah Konstitusi RI
Jl. Medan Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110**

Perihal: Surat Tugas

Dengan hormat,

Semoga Bapak dalam keadaan sehat dan senantiasa sukses dalam menjalankan tugas sehari-hari.

Bersama ini kami menugaskan nama reporter di bawah ini untuk mengikuti secara penuh kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Berbasis E-Learning yang akan diselenggarakan pada tanggal 11 s.d. 13 Desember 2025 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Nama	Jabatan	Nomor HP
Firyalfatin	Reporter	0815-1983-9138

Demikian surat penugasan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**JUSTIKA
SIAR MEDIA**

**Fathan Qorib
Editor in Chief Hukumonline**

Jakarta, 9 Desember 2025
No. 151/JSM/RDKS/XII/2025

Kepada Yth.

Bapak Mundi

Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Gedung Mahkamah Konstitusi RI

Jl. Medan Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110

Perihal: Surat Tugas

Dengan hormat,

Semoga Bapak dalam keadaan sehat dan senantiasa sukses dalam menjalankan tugas sehari-hari.

Bersama ini kami menugaskan nama jurnalis di bawah ini untuk mengikuti secara penuh kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Berbasis E-Learning yang akan diselenggarakan pada tanggal 11 s.d. 13 Desember 2025 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Nama	Jabatan	Nomor HP
Agus Sahbani	Redaktur	0813-1590-2512

Demikian surat penugasan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**JUSTIKA
SIAR MEDIA**

Fathan Qorib

Editor in Chief Hukumonline

SURAT TUGAS**Nomor : 2427/RRI.PUSPEM/KP.01.06/12/2025**

- Menimbang : a. Bahwa menindaklanjuti surat Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 15207/2600/DK/12/2025 Hal. Pemanggilan Peserta Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara
- b. Bahwa berdasarkan poin "a" di atas, Kepala Pusat Pemberitaan menugaskan nama dibawah ini meliputi kegiatan dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik RRI;
5. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direksi Nomor 08 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
6. Keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Dewan Direksi LPP RRI Periode 2021-2026.
7. Keputusan Direktur Utama LPP RRI Nomor : 2701 Tahun 2025 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural

MEMBERI PERINTAH

- Kepada : 1. Muhamad Isnen Suhandi
2. Yusuf Bagus Prasetyo
- Untuk : 1. Melaksanakan kegiatan sebagaimana poin "a" di atas, pada tanggal 11 - 13 Desember 2025 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat
2. Biaya dari kegiatan tersebut ditanggung Mahkamah Konstitusi RI

Dikeluarkan : di Jakarta
Pada Tanggal : 8 Desember 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Pusat Pemberitaan LPP RRI

Muhammad Yusridarto

PUSAT PEMBERITAAN LPP RRI

Jl. Medan Merdeka Barat 4-5 Jakarta Pusat Telp. (021)-3523175 Fax. 3842083

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Nomor : B/DIV07.ANT/PO.00.01/3343/XII/2025
Hal : Penugasan wartawan ke Bogor

Jakarta, 08 Desember 2025

Kepada yang terhormat,
Kepala Pusat Pendidikan
Pancasila dan Konstitusi
Mundiri
di
Jakarta

Sehubungan dengan surat Mahkamah Konstitusi Nomor: 15207/2600/DK/12/2025 perihal Pemanggilan Peserta Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Berbasis E-learning yang diselenggarakan pada 11-13 Desember 2025 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat, bersama ini LKBN ANTARA menugaskan wartawan di bawah ini untuk meliput kegiatan tersebut.

Nama : **Fath Putra Mulya**
Nomor HP : +62 822-8426-5259

Demikian disampaikan surat penugasan ini, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Perum LKBN ANTARA
Redaktur Pelaksana

SIGIT PINARDI

Tembusan:

1. Direktur Pemberitaan LKBN ANTARA
2. Arsip



SURAT TUGAS
No. 1149/TV-News/XII/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini Atasan/Pimpinan Organisasi Media Massa menugaskan kepada yang tersebut di bawah ini untuk menjadi peserta pada kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Berbasis *E-Learning* sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Asal Daerah (Alamat Lengkap)
1.	Edwin Zhan	Reporter	Taman Seaman Indah, Jakarta Barat
2.	Mohamad Djamzari	Camera Person	Jl. Bhakti Mulya, Jakarta Barat

Hari, Tanggal : Kamis s.d. Sabtu
11 s.d. 13 Desember 2025

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 8 Desember 2025



Irwansyah Lubis
Executive Assignment Editor

SURAT PENUGASAN
Nomor : 565/BN/XI/2025

Kepada Yth,
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkama Konstitusi RI

Dengan hormat,

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Kelas Kajian Hukum Konstitusional yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dalam program Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Berbasis E-Learning, maka dengan ini Redaksi Berita Nasional.com menugaskan:

Nama : Raiza Andini
Jabatan : Staff Sosial Media
Hari/Tanggal : 11 s.d. 13 Desember 2025

Untuk mengikuti kegiatan Kelas Kajian Hukum Konstitusional tersebut.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 10 Desember 2025

Mengetahui,



**BERITA
NASIONAL**
Media Pencerah Bangsa

Kadirah
Pemimpin Redaksi

Jakarta, 10 Desember 2025

Nomor : 405/Red/XII/2025
Perihal : **Surat Tugas**

Dengan hormat,

Melalui surat ini kami memberitahukan bahwa harian *Kompas* (Kompas.id) menugaskan wartawan bernama:

Sdr. Nino Citra Anugrahanto

Untuk mengikuti pelatihan kegiatan **“Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Berbasis *E-Learning*”**. yang akan diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 11 s.d. 13 Desember 2025 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Atas perhatian dan kerja sama yang diberikan, kami sampaikan terima kasih.

Hormat kami,


A Tomy Trinugroho
Wakil Redaktur Pelaksana

Harian Pagi
KOMPAS
Jl. Palmerah Selatan No. 21
JAKARTA 10270

/van

Lampiran V

Nomor : 15207/2600/DK/12/2025

Tanggal : 05 Desember 2025

FORMAT SURAT TUGAS

SURAT TUGAS

Nomor: 010/FK-RED/XII/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini Atasan/Pimpinan Organisasi Media Massa menugaskan kepada yang tersebut di bawah ini untuk menjadi peserta pada kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Berbasis *E-Learning* sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Asal Daerah (Alamat Lengkap)
1.	Syahrul Baihaqi	Reporter	Pesanggarahan

Hari, Tanggal : Kamis s.d. Sabtu
11 s.d. 13 Desember 2025

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Hormat kami,
FORUM KEADILAN




Rafael Sebayang
Redaktur Eksekutif



SURAT TUGAS

No. 165/Srt.Eks/Sekred-MI/XII/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini Atasan/Pimpinan Organisasi Media Massa menugaskan kepada yang tersebut di bawah ini untuk menjadi peserta pada kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Berbasis *E-Learning* sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Asal Daerah (Alamat Lengkap)
1.	Devi Harahap	Wartawan	Jl. Bina Taruna II RT.10 RW.10, Pulogadung, Jakarta Timur.

Hari, Tanggal : Kamis s.d. Sabtu
11 s.d. 13 Desember 2025
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 10 Desember 2025

Hormat kami,

 PT. CITRA MEDIA NUSA PURNAMA

Ahmad Punto

Kepala Divisi Pemberitaan

SURAT TUGAS

Nomor: 039/RED/JPNN/XI/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini Antoni menugaskan kepada yang tersebut di bawah ini untuk menjadi peserta pada kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Berbasis *E-Learning* sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Asal Daerah (Alamat Lengkap)
1	Romaida Uswatun Hasanah	Reporter	Surya Jaya Indah Blok AB 3 No. 10 RT 003/009 Kel. Cempaka Kec. Cisoka Tangerang

Hari, Tanggal : Kamis s.d. Sabtu
11 s.d. 13 Desember 2025
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Hormat kami,

JPNN.com



Antoni

Jakarta, 10 Desember 2025

Kepada Yth.
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
di Tempat

SURAT PENUGASAN
975/Content-KOMPAS.com/XII/2025

Dengan hormat,

Terkait dengan kegiatan “**Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Berbasis E-Learning**” yang akan diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada **11 s.d. 13 Desember 2025** di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat, bersama ini Redaksi Kompas.com menugaskan seorang jurnalis sebagai peserta kegiatan dimaksud:

No	Nama Karyawan	Jabatan	No. Telp	Email
1	Shela Octavia	Jurnalis	0877-8814-6830	she.octavia@gmail.com

Jurnalis tersebut akan mengikuti seluruh rangkaian kegiatan serta melakukan koordinasi teknis sesuai ketentuan dari panitia.

Untuk kebutuhan komunikasi lebih lanjut, yang bersangkutan akan berkoordinasi dengan narahubung yang telah ditunjuk, yaitu **Sdri. Tiara Agustina**.

Demikian surat penugasan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Ana Shofiana Syatiri
Redaktur Pelaksana

Tembusan : - Arsip

Lampiran V

Nomor : 15207/2600/DK/12/2025

Tanggal : 08 Desember 2025

SURAT TUGAS
Nomor: 574/ST/SINPO/XII/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini Atasan/Pimpinan Organisasi Media Massa menugaskan kepada yang tersebut di bawah ini untuk menjadi peserta pada kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Berbasis *E-Learning* sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Asal Daerah (Alamat Lengkap)
1.	Berkat Mangasitua Munthe	Reporter	Jakarta, Graha Sin Po, Jl. Kramat Kwitang No.8 Lt. 3, Kwitang, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat

Hari, Tanggal : Kamis s.d. Sabtu
11 s.d. 13 Desember 2025

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Hormat kami,
SIN PO TV

 **SIN PO tv**

Edi Faisol
Pemimpin Redaksi



Lampiran
V Nomor
Tanggal : 15207/2600/DK/12/2025
5 : 05 Desember 2025

FORMAT SURAT TUGAS

SURAT TUGAS

Nomor: 01/KTU/XXII/2025

Yang bertanda tangandibawah iniAtasan/Pimpinan Organisasi Media Massa menugaskan kepada yang tersebut di bawah ini untuk menjadi peserta pada kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Berbasis *E-Learning* sebagai berikut:

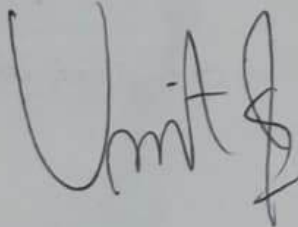
No	Nama	Jabatan	Asal Daerah (Alamat Lengkap)
1.	Isam Saifudin		Jl. Petamburan 3 No 19. Jakarta Pusat.

Hari, Tanggal : Kamis s.d. Sabtu
11 s.d. 13 Desember 2025

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Hormat kami,
Konstitusionalis TV



Eksekutif account Konstitusionalis TV

Viktor Santoso Tandiasa

Lampiran
V Nomor :
Tanggal 15207/2600/DK/12/202
5 : 05 Desember 2025

FORMAT SURAT TUGAS

SURAT TUGAS

Nomor: 02/KTU/X/11/2025

Yang bertanda tangandibawah iniAtasan/Pimpinan Organisasi Media Massa menugaskan kepada yang tersebut di bawah ini untuk menjadi peserta pada kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Berbasis *E-Learning* sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Asal Daerah (Alamat Lengkap)
1.	Didi Supandi		Jl. Petamburan 5 No 47, Jakarta Pusat.

Hari, Tanggal : Kamis s.d. Sabtu

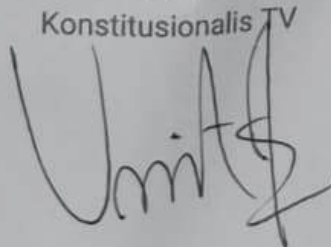
11 s.d. 13 Desember 2025

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Hormat kami,

Konstitusionalis TV



Eksekutif account Konstitusionalis TV

Viktor Santoso Tandiasa

Penjelasan Teknis

SUDAH ABSEN

IO	NAME	TTD
	Rizky Suryarandika	11-12-2025 14:00:27 WIB
	Romaida Uswatun	11-12-2025 14:22:51 WIB
	Raiza Andini	11-12-2025 14:23:05 WIB
	Devi Harahap	11-12-2025 14:25:43 WIB
	Fath Putra Mulya	11-12-2025 14:25:48 WIB
	SURTIKA DWINURASIH	11-12-2025 14:25:55 WIB
	M. Isnen Suhandia	11-12-2025 14:26:26 WIB
	Firyalfatin	11-12-2025 14:26:30 WIB
	Shela Octavia	11-12-2025 14:26:34 WIB
0	Yusuf Bagus Prasetyo	11-12-2025 14:26:34 WIB

IO	NAME	TTD
1	M. Naufal	11-12-2025 14:26:44 WIB
2	Didi Supandi	11-12-2025 14:27:13 WIB
3	Umi Sjarifah	11-12-2025 14:27:14 WIB
4	Nino Citra Anugrahanto	11-12-2025 14:27:20 WIB
5	Agus Sahbani	11-12-2025 14:27:30 WIB
6	Berkat Mangasitua Munthe	11-12-2025 14:27:46 WIB
7	Bahrul Ulum Latuconsina	11-12-2025 14:29:00 WIB
8	E D W I N	11-12-2025 14:29:43 WIB
9	Dadang Rachmat	11-12-2025 14:29:57 WIB
0	Herdiana	11-12-2025 14:30:21 WIB
1	Catur Aziyanto	11-12-2025 14:31:26 WIB
2	Syahrul Baihaqi	11-12-2025 14:39:09 WIB

Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila melalui Experiential Learning

SUDAH ABSEN

IO	NAME	TTD
	Rizky Suryarandika	11-12-2025 14:00:29 WIB
	Raiza Andini	11-12-2025 14:23:26 WIB
	SURTIKA DWINURASIH	11-12-2025 14:25:58 WIB
	Shela Octavia	11-12-2025 14:26:38 WIB
	Firyalfatin	11-12-2025 14:26:46 WIB
	M. Naufal	11-12-2025 14:26:49 WIB
	Yusuf Bagus Prasetyo	11-12-2025 14:26:51 WIB
	M. Isnen Suhandha	11-12-2025 14:27:07 WIB
	Umi Sjarifah	11-12-2025 14:27:20 WIB

IO	NAME	TTD
0	Didi Supandi	11-12-2025 14:27:36 WIB
1	Berkat Mangasitua Munthe	11-12-2025 14:29:04 WIB
2	E D W I N	11-12-2025 14:29:58 WIB
3	Herdiana	11-12-2025 14:30:09 WIB
4	Dadang Rachmat	11-12-2025 14:30:19 WIB
5	Bahrul Ulum Latuconsina	11-12-2025 14:30:24 WIB
6	Catur Aziyanto	11-12-2025 14:31:36 WIB
7	Syahrul Baihaqi	11-12-2025 14:39:11 WIB
8	Syahrul Baihaqi	11-12-2025 14:39:12 WIB

BELUM ABSEN

IO	NAME	JABATAN / BAGIAN
	Devi Harahap	Wartawan
	Vera Yuningsih	
	Syarif Hidayatullah	

Peran Jurnalis dalam Penanganan Perkara di Mahkamah Konstitusi

SUDAH ABSEN

IO	NAME	TTD
	Nino Citra Anugrahanto	12-12-2025 09:00:59 WIB
	Firyalfatin	12-12-2025 09:01:50 WIB
	Catur Aziyanto	12-12-2025 09:01:52 WIB
	M. Naufal	12-12-2025 09:02:31 WIB
	Yosafat Diva Bayu Wisesa	12-12-2025 09:03:02 WIB
	Rizky Suryarandika	12-12-2025 09:03:19 WIB
	Dadang Rachmat	12-12-2025 09:03:38 WIB
	Heryanto	12-12-2025 09:03:44 WIB
	Herdiana	12-12-2025 09:03:48 WIB
0	Fath Putra Mulya	12-12-2025 09:04:37 WIB

IO	NAME	TTD
1	Bahrul Ulum Latuconsina	12-12-2025 09:04:38 WIB
2	Raiza Andini	12-12-2025 09:04:54 WIB
3	Umi Sjarifah	12-12-2025 09:05:08 WIB
4	Berkat Mangasitua Munthe	12-12-2025 09:05:32 WIB
5	Eko Junanto	12-12-2025 09:06:34 WIB
6	Didi Supandi	12-12-2025 09:07:36 WIB
7	Shela Octavia	12-12-2025 09:07:45 WIB
8	Isam Saifudin	12-12-2025 09:08:00 WIB
9	Mario Christian Sumampow	12-12-2025 09:08:36 WIB
0	Yusuf Bagus Prasetyo	12-12-2025 09:09:03 WIB
1	EDWIN	12-12-2025 09:09:10 WIB
2	Syahrul Baihaqi	12-12-2025 09:09:14 WIB

Peluncuran MKLC dan MKRI AI

SUDAH ABSEN

IO	NAME	TTD
	M. Isnen Suhandu	12-12-2025 13:30:37 WIB
	Yusuf Bagus Prasetyo	12-12-2025 13:30:41 WIB
	Prafagasta Putra Aziyanto	12-12-2025 13:34:33 WIB
	Isam Saifudin	12-12-2025 13:39:13 WIB
	Didi Supandi	12-12-2025 13:39:53 WIB
	Romaida Uswatun	12-12-2025 13:48:28 WIB
	Herdiana	12-12-2025 13:50:04 WIB
	Catur Aziyanto	12-12-2025 13:57:57 WIB
	Shela Octavia	12-12-2025 13:58:05 WIB
0	Nino Citra Anugrahanto	12-12-2025 13:58:14 WIB

IO	NAME	TTD
1	Heryanto	12-12-2025 13:58:35 WIB
2	Dadang Rachmat	12-12-2025 13:58:38 WIB
3	Umi Sjarifah	12-12-2025 13:58:50 WIB
4	Eko Junanto	12-12-2025 13:58:52 WIB
5	Devi Harahap	12-12-2025 13:59:02 WIB
6	Firyalfatin	12-12-2025 14:00:23 WIB
7	E D W I N	12-12-2025 14:00:26 WIB
8	Fath Putra Mulya	12-12-2025 14:03:40 WIB
9	Bahrul Ulum Latuconsina	12-12-2025 14:03:41 WIB
0	Syahrul Baihaqi	12-12-2025 14:13:13 WIB
1	Yosafat Diva Bayu Wisesa	12-12-2025 14:13:35 WIB
2	Berkat Mangasitua Munthe	12-12-2025 14:14:20 WIB

Peran Wartawan sebagai Jurnalis dalam Menjaga Hak Konstitusionalita dan Demokrasi melalui Penyampaian Berita yang Menjaga Etika dan Independensi di MK

SUDAH ABSEN

IO	NAME	TTD
	SURTIKA DWINURASIH	12-12-2025 14:32:17 WIB
	Dadang Rachmat	12-12-2025 14:41:16 WIB
	E D W I N	12-12-2025 14:45:36 WIB
	Herdiana	12-12-2025 14:46:26 WIB
	Herdiana	12-12-2025 14:46:27 WIB
	Bahrul Ulum Latuconsina	12-12-2025 14:52:36 WIB
	Berkat Mangasitua Munthe	12-12-2025 14:54:34 WIB
	Didi Supandi	12-12-2025 14:54:40 WIB
	Shela Octavia	12-12-2025 14:54:58 WIB

IO	NAME	TTD
0	Isam Saifudin	12-12-2025 14:55:06 WIB
1	Prafagasta Putra Aziyanto	12-12-2025 14:55:24 WIB
2	Firyalfatin	12-12-2025 14:56:19 WIB
3	Devi Harahap	12-12-2025 14:57:32 WIB
4	Syahrul Baihaqi	12-12-2025 14:57:52 WIB
5	Heryanto	12-12-2025 15:04:13 WIB
6	Fath Putra Mulya	12-12-2025 15:09:44 WIB
7	Nino Citra Anugrahanto	12-12-2025 15:11:00 WIB
8	M. Isnen Suhandha	12-12-2025 15:23:27 WIB
9	Eko Junanto	12-12-2025 15:35:40 WIB
0	Raiza Andini	12-12-2025 16:00:24 WIB
1	Catur Aziyanto	12-12-2025 16:03:00 WIB

Penutupan Kegiatan

SUDAH ABSEN

IO	NAME	TTD
	Dadang Rachmat	13-12-2025 05:37:47 WIB
	Raiza Andini	13-12-2025 05:38:23 WIB
	Isam Saifudin	13-12-2025 05:48:14 WIB
	Heryanto	13-12-2025 05:58:51 WIB
	Herdiana	13-12-2025 05:59:55 WIB
	Fath Putra Mulya	13-12-2025 06:00:36 WIB
	Shela Octavia	13-12-2025 06:01:03 WIB
	Didi Supandi	13-12-2025 06:02:51 WIB
	Yusuf Bagus Prasetyo	13-12-2025 06:02:59 WIB
0	Syahrul Baihaqi	13-12-2025 06:02:59 WIB

IO	NAME	TTD
1	Devi Harahap	13-12-2025 06:03:03 WIB
2	Romaida Uswatun	13-12-2025 06:04:05 WIB
3	Firyalfatin	13-12-2025 06:04:11 WIB
4	Prafagasta Putra Aziyanto	13-12-2025 06:04:42 WIB
5	SURTIKA DWINURASIH	13-12-2025 06:05:17 WIB
6	Bahrul Ulum Latuconsina	13-12-2025 06:06:28 WIB
7	Agus Sahbani	13-12-2025 06:10:52 WIB
8	M. Isnen Suhandha	13-12-2025 06:14:18 WIB
9	Catur Aziyanto	13-12-2025 06:26:02 WIB
0	Eko Junanto	13-12-2025 06:32:32 WIB
1	Berkat Mangasitua Munthe	13-12-2025 06:37:12 WIB
2	M. Naufal	13-12-2025 08:12:40 WIB

Informasi Rapat

Setiap peserta dapat memeriksa dan melaporkan ke pembuat rapat jika ingin ada perubahan..

Judul : kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Berbasis E-Learning (MKLC)

Pembuat Rapat : Santi Widiastuti

Pengundang : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Waktu Mulai : 2025-12-12 13:00:00

Waktu Selesai : 2025-12-12 18:00:00

Lokasi :

Link SIKD : <https://sikd.mkri.id/index3.php?option=MailTL&id=816.091225092210>
(<https://sikd.mkri.id/index3.php?option=MailTL&id=816.091225092210>)
<https://arsipds.mkri.id/kehadiran.php?token=F9E2527B6D614401B8431FF02C873778>

Link absen : (<https://arsipds.mkri.id/kehadiran.php?token=F9E2527B6D614401B8431FF02C873778>)
Perhatian Dinyatakan hadir jika peserta absen 30 menit sebelum rapat dan setelah jam rapat selesai. Harap pembuat rapat menyesuaikan dan memperhatikan jam selesai rapat.

Link Notulensi Rapat : **Notulensi belum di Upload ()**

Link Zoom : ()

Keterangan :

Peserta Luar

No	Nama	Jabatan	Institusi
1	Robbi Adhilni Hadir : 14:29	Kepala Pusat Informasi Pengawasan	BPKP
2	Widodo Ekatjahjana Hadir : 15:47	Ketua APHAMK	APHAMK

No	Nama	Jabatan	Institusi
3	Tanti Dian Ruhama Hadir : 14:35	Koordinator Bidang Pembangunan Hukum	BAPPENAS
4	Septian Dwi Wibowo Hadir : 15:51	Staf Pendukung Substansi	BAPPENAS
5	Victor Santoso Tandiasa Hadir : 15:52	Advokat	Advokat
6	Fahrudin Latif Hadir : 15:53	Kepala Subdirektorat Pemeriksa I.A.2	BPK
7	Sekar Ayu Garindya Hadir : 15:56	Staf Pendukung Substansi	BAPPENAS
8	Iman Sufrian Hadir : 15:57	Pemeriksa Madya	BPK
9	Idola Pawestri Hadir : 15:57	Pemeriksa Madya	BPK
10	Hanik Inayatur Rohmah Hadir : 16:00	Pusdiklatwas	BPKP
11	Istiyanti Hadir : 15:59	Analisis Keuangan Negara	DJA
Jumlah Peserta Luar : 11 Jumlah hadir : 11			

Peserta Rapat

No	Nama	Jabatan	Institusi
1	Heru Setiawan Hadir : 13:46	Sekretaris Jenderal	MKRI

No	Nama	Jabatan	Institusi
2	Wiryanto Hadir : 16:17	Plt. Panitera	MKRI
3	Tatang Garjito Hadir : 14:23	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan	MKRI
4	Sri Handayani Hadir : 13:27	Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi	MKRI
5	Fajar Laksono	Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan	MKRI
6	Budi Wijayanto Hadir : 13:26	Kepala Biro Umum	MKRI
7	Mundiri Hadir : 14:14	Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	MKRI
8	Kurniasih Panti Rahayu Hadir : 16:33	Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan	MKRI
9	Nanang Subekti Hadir : 14:12	Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi	MKRI
10	Pan Mohamad Faiz Kusuma Hadir : 13:42	Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol	MKRI
11	Sigit Purnomo Hadir : 13:32	Inspektur	MKRI
12	Dian Dwi Hapsoro Hadir : 17:32	Auditor Muda (Dian Dwi Hapsoro)	MKRI
13	Tarnoto	Pranata Komputer Ahli Muda(Tarnoto)	MKRI
14	Wijang Ardi Rahmadi	Auditor Ahli Muda (Wijang Ardi Rahmadi)	MKRI
15	Hafidz Ikhsan Baihaki Hadir : 13:33	Pranata Komputer Ahli Pertama (Hafidz Ikhsan Baihaki)	MKRI

No	Nama	Jabatan	Institusi
16	William Ivan Nathanael Pangabea Hadir : 13:06	Pengolah Data dan Informasi (William Ivan Nathanael Pangabea)	MKRI
17	Andi Hakim Hadir : 13:35	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Kerjasama dalam Negeri(Andi Hakim)	MKRI
18	Adam Waluyo Hadir : 13:35	Manggala Informatika Ahli Pertama (Adam Waluyo)	MKRI
19	Johan Yustisianto Hadir : 14:04	Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol	MKRI
20	Mastiur Afrilidany Pasaribu Hadir : 12:55	Kepala Bagian Umum	MKRI
21	Santhy Kustrihardiani Hadir : 17:02	Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan	MKRI
22	Gunawan Hadir : 15:19	Kepala Subbagian Protokol	MKRI
23	Hadian Taofik Rochman Hadir : 16:03	Kepala Subbidang Penyelenggaraan (Hadian Taofik Rochman)	MKRI
24	Bambang Sukmadi Hadir : 12:56	Kepala Subbagian Tata Usaha (Bambang Sukmadi)	MKRI
25	Achmad Dodi Haryadi	Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat (Achmad Dodi Haryadi)	MKRI
26	Siska Yuniza Hadir : 13:35	Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan Kinerja(Siska Yuniza)	MKRI
27	Medi Kurniadi Hadir : 16:05	Kepala Subbagian Sarana dan Prasarana	MKRI
28	Santi Widiastuti Hadir : 13:36	Kepala Subbidang Program dan Evaluasi	MKRI

No	Nama	Jabatan	Institusi
29	Donny Yuniarto Hadir : 15:47	Penerjemah Ahli Muda pada Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Bapak Saldi Isra (Donny Yuniarto)	MKRI
30	Chandra Okantara Hadir : 13:46	Penelaah Teknis Kebijakan (Chandra Okantara)	MKRI
31	Tiara Agustina Hadir : 17:34	Pranata Hubungan Masyarakat Penyelia (Tiara Agustina)	MKRI
32	Bambang Sugito Hadir : 16:06	Pengadministrasi Perkantoran (Bambang Sugito)	MKRI
33	Chafid Sugianto Hadir : 13:46	Penyuluh Hukum Ahli Muda (Chafid Sugianto)	MKRI
34	Muhlis Nova Hadir : 16:07	Penelaah Teknis Kebijakan (Muhlis Nova)	MKRI
35	Edwin Aditya Irawan Hadir : 17:02	Penyuluh Hukum Ahli Pertama (Edwin Aditya Irawan)	MKRI
36	Sherly Octaviana Sari Hadir : 13:46	Penerjemah Ahli Muda (Sherly Octaviana Sari)	MKRI
37	Angga Putri Gardina Hadir : 14:56	Penyuluh Hukum Ahli Pertama (Angga Putri Gardina)	MKRI
38	Suhardi Hadir : 13:00	Penelaah Teknis Kebijakan (Suhardi)	MKRI
39	M.Hairuddin Hadir : 15:59	Perawat-Pengelola Layanan Operasional (M. Hairuddin)	MKRI
40	Yuwandi	Editor-Pengadministrasi Perkantoran (Yuwandi)	MKRI
41	Hermanto	Penata Desain Grafis-Pengadministrasi Perkantoran (Hermanto)	MKRI
42	Teguh Birawa Putra	Penata Desain Grafis-Pranata Humas Terampil (Teguh Birawa Putra)	MKRI

No	Nama	Jabatan	Institusi
43	Ilham Erwin	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama (Ilham Erwin)	MKRI
44	Farhan Atha Nugraha Hadir : 17:32	Arsiparis Terampil (Farhan Atha Nugraha)	MKRI
45	Fauzan Febriyan	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama (Fauzan Febriyan)	MKRI
46	IPDA. Aris Muda Nasution Hadir : 15:23	Analisis Keamanan (IPDA. Aris Muda Nasution)	MKRI
47	IPDA. Eri Iswandono Hadir : 15:23	Analisis Keamanan (IPDA. Eri Iswandono)	MKRI
48	Eko Dwi Cahyo Hadir : 12:36	Pengelola Persidangan (Eko Dwi Cahyo)	MKRI
49	Muhammad Nur Hadir : 16:10	Editor-Pengadministrasi Perkantoran (Muhammad Nur)	MKRI
50	Dhiki Ramadhan Hadir : 13:55	DR - Operator Layanan Operasional (Dhiki Ramadhan)	MKRI
51	Baron Yulianto Hadir : 14:39	DR - Operator Layanan Operasional (Baron Yulianto)	MKRI
52	Alex Hengki Fernando Gultom Hadir : 13:49	DR - Operator Layanan Operasional (Alex Hengki Fernando Gultom)	MKRI
53	Ajis Setiawan Hadir : 14:08	DR - Operator Layanan Operasional (Ajis Setiawan)	MKRI
54	Muhamad Wildan Aqilla Ananda Hadir : 13:42	DR - Operator Layanan Operasional (Muhamad Wildan Aqilla Ananda)	MKRI

No	Nama	Jabatan	Institusi
55	Madinah Hadir : 14:26	DR - Operator Layanan Operasional (Madinah)	MKRI
56	Japar Sodik Hadir : 12:47	DR - Operator Layanan Operasional (Japar Sodik)	MKRI
57	Fitrah Novanco Hadir : 13:42	DR - Pengelola Layanan Operasional (Fitrah Novanco)	MKRI
58	Usman Fauzi Hadir : 16:10	DR - Operator Layanan Operasional (Usman Fauzi)	MKRI
59	Riezky Pangkualam Hadir : 13:42	DR - Penata Layanan Operasional (Riezky Pangkualam)	MKRI
60	Imam Suryadi Hadir : 13:52	DR - Operator Layanan Operasional (Imam Suryadi)	MKRI
61	Faisal Hadir : 16:10	DR - Pengelola Umum Operasional (Faisal)	MKRI
Jumlah Peserta : 61 Jumlah hadir : 52			

POINT OF MEETING

Kegiatan : *Forum Group Discussion* Optimalisasi Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Strategi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara melalui *E-learning*

Waktu : 15.00 – selesai

Mahkamah Konstitusi	:	• MK selalu kolaboratif untuk mencapai tujuan organisasi • MKLC dan MKRI AI disusun untuk: a. Memperluas jangkauan pendidikan tentang Pancasila, konstitusi, hak konstitusional warga negara, dan MK b. Mempermudah masyarakat mendapatkan akses keadilan dan memperjuangkan hak-hak konstitusionalnya • Target MKLC selanjutnya: a. Mengembangkan target Pendidikan b. Strategi pembelajaran untuk membentuk corpu c. Melakukan perubahan SOTK Pusdik Pancasila dan Konstitusi untuk membentuk corpu • MKRI AI dapat langsung dicoba melalui ai.mkri.id dan fitur-fiturnya akan terus dikembangkan • MKRI AI akan ditempelkan pula di MKLC untuk mempermudah masyarakat untuk belajar
APHAMK	:	• Bagaimana MKLC dapat diintegrasikan dengan fitur penggunaan AI? • Masukan: a. Akses internet di masyarakat juga perlu menjadi perhatian dalam penggunaan MKLC ini karena negara juga perlu hadir untuk menyediakan akses internet ditengah perkembangan teknologi saat ini b. Perlu adanya selektifitas konten untuk menjelaskan konsep konstitusional yang abstrak dan kompleks kepada masyarakat c. Dapat terus dilanjutkan tentang penjelasan terkait sadar konstitusi dan sadar hak konstitusional d. Perlu inovasi tentang pengemasan konten agar lebih membumi e. Perlu pengembangan pada medsos yang lebih familiar di masyarakat agar bisa menjangkau pula di seluruh lapisan masyarakat f. Berikan konten yang menarik namun official yang ditempelkan di MKLC agar masyarakat semangat untuk belajar
Advokat	:	• Perlu ada langkah strategis untuk masyarakat adat dan masyarakat di perbatasan untuk memahami hak-hak konstitusionalnya • Perlu ada program <i>offline</i>, seperti file pdf yang bisa diunduh atau video dengan kapasitas rendah agar

		masyarakat yang berada di daerah susah sinyal dapat ikut belajar tentang konstitusi • Perlu ada video yang menyenangkan untuk remaja, seperti tutorial atau panduan tentang HKWN • Perlu menyusun konten yang ringan dan mudah dipahami oleh seluruh lapisan Masyarakat tentang HKWN • Di dalam konten perlu dilekatkan logo-logo MK untuk menghindari konten hoaks yang banyak beredar • MK perlu untuk terus mengembangkan teknologi dengan mencontoh negara-negara maju • Informasi yang dikeluarkan oleh MKRI AI harus akurat • Perlu ditekankan tentang apa pentingnya sertifikat untuk peserta pendidikan. Mungkin bisa menjadikan syarat ber perkara di MK adalah memiliki sertifikat MKLC. Nantinya ketika mengisi SIMPEL, juga diminta untuk mengupload sertifikat MKLC
Pusinfowas BPKP	:	• Perlu memperhatikan tentang perlindungan data (NIK) di MKLC • Pengisian biodata ketika membuat akun di MKLC (padahal belum melihat pendidikan yang tersedia) dapat membuat masyarakat yang ingin belajar menjadi demotivasi. Akan lebih baik jika pengisian biodata muncul ketika e-sertifikat akan diterbitkan • Perlu ada pertanyaan tentang peminatan hal yang ingin dipelajari oleh peserta ketika mengisi biodata diri • Nama “MKRI AI” dan “MKLC” masih terlalu kaku dan sulit untuk diucapkan oleh masyarakat
Pusdiklatwas BPKP	:	• Tidak ada persyaratan khusus untuk menjadi corpu. Yang terpenting adalah komitmen di tingkat atas hingga bawah. Corpu yang dibangun jangan hanya menggambarkan suatu unit, tetapi menggambarkan institusi. • Kepala Pusat Pendidikan bertindak sebagai rektor (<i>learning office</i>), sedangkan pimpinan yang lain sebagai dekan • Konten pembelajaran dan pengajar bukan hanya dari unit pusat pendidikan • Penyusunan program pendidikan yang ada di corpu, berangkat dari biro perencanaan di institusi
BPK	:	• Sustain suatu aplikasi menjadi tantangan yang lebih besar, dibanding membangun • Output kinerja kita adalah mendorong efisiensi dan transparansi • Perlu ada <i>backbone</i> yang kuat untuk mengaitkan aplikasi-aplikasi di MK • MKLC harus didorong dengan program unggulan lainnya, seperti mendorong advokat untuk mengikuti kegiatan di MKLC
DJA Kemenkeu	:	• Perlu melakukan penyesuaian pengisian di aplikasi anggaran

BAPPENAS	:	• Diharapkan untuk MKLC dapat lebih <i>user friendly</i>, terutama pada gen Z karena saat ini pengguna internet terbanyak adalah gen Z • Perlu pengembangan fitur yang lebih menarik, seperti kuis, dll • Meungkin dapat menjadikan hasil indeks kematangan demokrasi untuk menentukan target grup MKLC • Perlu memperhatikan ketersediaan SDM untuk mengembangkan modul, konten yang menarik, dan tenaga IT • Ada 2 hal yang perlu diperhatikan untuk mengembangkan AI: a. Bagaimana mengembangkan kapastisan SDM internal untuk bisa memintarkan ai b. Perlu memahami bagaimana manfaat, resiko, dan keterbatasan AI dalam pemanfaatannya • Perlu memperhatikan tentang kerahasiaan interaksi pribadi dengan AI di MK • Apakah ada rencana untuk menyambungkan web MKLC dan MKRI AI di web MKRI agar lebih fleksibel penggunaannya oleh masyarakat
Sekjen MK		• Akan ada perhatian khusus untuk melakukan penguatan sertifikasi untuk kegiatan pendidikan di MKLC • 2 aplikasi baru ini akan disambungkan dengan web mkri.id • Perlu dukungan seluruh lembaga negara terkait sustain aplikasi ini • Masyarakat perlu untuk memasukkan email ketika mengakses mkri ai, agar mengetahui tracking pengguna • Dialog seperti ini perlu secara kontinu untuk dilakukan dan perlu merangkul regulator (Kominfo)

Data Peserta Kegiatan
Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Jurnalis

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	INSTANSI	ASAL
1	Fath Putra Mulya, S.I.Kom.	Laki-laki	LKBN Antara	D.K.I. JAKARTA
2	Mario Christian Sumampow	Laki-laki	Tribun Network	D.K.I. JAKARTA
3	Yosafat Diva Bayu Wisesa	Laki-laki	IDN Times	D.K.I. JAKARTA
4	Nino Citra Anugrahanto	Laki-laki	Harian Kompas	BANTEN
5	M. Naufal, Sarjana Sastra	Laki-laki	Tirto	JAWA BARAT
6	Rizky Suryarandika, S.Ikom	Laki-laki	Republika	JAWA BARAT
7	Syahrul Baihaqi	Laki-laki	Forum Keadilan	D.K.I. JAKARTA
8	Agus Sahbani	Laki-laki	Hukum Online	D.K.I. JAKARTA
9	Shela Octavia	Perempuan	Kompas.com	D.K.I. JAKARTA
10	Devi Harahap	Perempuan	Media Indonesia	D.K.I. JAKARTA
11	Romaida Uswatun	Perempuan	JPNN	D.K.I. JAKARTA
12	SURTIKA DWINURASIH	Perempuan	TVRI	D.K.I. JAKARTA
13	Raiza Andini, Fabanyo	Perempuan	Berita Nasional	D.K.I. JAKARTA
14	Firyalfatin	Laki-laki	Hukum Online	D.K.I. JAKARTA
15	E D W I N	Laki-laki	KompasTV	D.K.I. JAKARTA
16	Heryanto, SE., SS.,MM	Laki-laki	AMKI/Semarak.co	D.K.I. JAKARTA
17	M. Isnen Suhandi	Laki-laki	RRI	JAWA BARAT
18	Yusuf Bagus Prasetyo, Amd	Laki-laki	RRI	D.K.I. JAKARTA
19	Berkat Mangasitua Munthe, A.Md.I.Kom.	Laki-laki	SIN PO TV	D.K.I. JAKARTA
20	Bahrul Ulum Latuconsina, S.I.Kom.	Laki-laki	TVRI	D.K.I. JAKARTA
21	Didi Supandi	Laki-laki	Konstitusionalis TV	D.K.I. JAKARTA
22	Isam Saifudin	Laki-laki	Konstitusionalis TV	D.K.I. JAKARTA
23	Dra. Umi Sjarifah, S.H., GRCE	Perempuan	AMKI / Sudut Pandang	D.K.I. JAKARTA
24	Catur Aziyanto	Laki-laki	AMKI / Transjabar	D.K.I. JAKARTA
25	Dadang Rachmat, SH	Laki-laki	AMKI / Mitrapol.com	D.K.I. JAKARTA
26	Herdiana	Laki-laki	AMKI / Seputar Publik.com	JAWA BARAT
27	Eko Junanto, SH	Laki-laki	AMKI / Ringsatu.id	JAWA BARAT
28	Prafagasta Putra Aziyanto	Laki-laki	AMKI / Transjabar	JAWA BARAT
29	Bambang Panji Erawan	Laki-laki	Mahkamah Konstitusi	D.K.I. JAKARTA
30	Nur Budiman	Laki-laki	Mahkamah Konstitusi	D.K.I. JAKARTA

LAPORAN KEUANGAN**Launching e-learning tanggal 11-13 Desember 2025**

NO	PENERIMA	KETERANGAN	NOMINAL
1	Istiyanti, dkk	Honor Narasumber	Rp 14,200,000
2	Widodo Ekatjahjana, dkk	Honor Narasumber	Rp 4,000,000
3	Tokopedia	Seminar Kit dalam rangka PPHKWN dan Launching e-learning	Rp 2,043,300
4	PT Kirana Mitra Utama Perkasa	Pembayaran Belanja Barang berupa Pengadaan Konsumsi dalam rangka Pelaksanaan PPHKWN Wartawan dan Launching e-learning PUSDIK TA 2025	Rp 33,290,000
5	PT Kirana Mitra Utama Perkasa	Pembayaran Belanja Barang berupa Pengadaan Konsumsi Makan dan Snack VIP dalam rangka Pelaksanaan PPHKWN Wartawan dan Launching e-learning	Rp 868,000
6	Yuwandi, dkk	SPD Humas	Rp 8,303,332
7	Koperasi Konstitusi	Biaya Perlengkapan dan Laundry	Rp 8,487,500
TOTAL			Rp 71,192,132

LAPORAN KEUANGAN
PPHKWN Wartawan tanggal 11-13 Desember 2025

NO	PENERIMA	KETERANGAN	NOMINAL
1	Suhartoyo, dkk	Honor Narasumber	Rp 11,900,000
2	Sugianto, dkk	Biaya Pentas Seni	Rp 1,846,153
3	Khai Event Organizer	Biaya Sewa Jeep	Rp 9,967,347
4	Fiany Prihartini	Biaya Instruktur Senam	Rp 500,000
5	Nino Citra Anugrahanto, dkk	SPD Wartawan	Rp 35,699,960
6	Hafidz Ikhsan Baihaki, dkk	SPD IT	Rp 3,206,666
TOTAL			Rp 63,120,126